

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN TEBO TAHUN 2022



Tebo Tuntas 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
Seentak Galah Serengkuh Dayung



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO INSPEKTORAT DAERAH

Temp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 No.
elp. (0744) 21609 Website : Inspektorat.tebokab.go.id Email: Inspektorat tebo@gmail.com
MUARA TEBO

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tebo untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor S.700/30/B.I/Itda/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini, namun secara umum kondisi tersebut telah ditindaklanjuti.

Muara Tebo, 24 Maret 2023

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TEBO**



Drs. HARI SUGIARTO

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670508 198512 1 001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 107 Jambi 36129
Telepon (0741) 65701, 61682, 61517 Faksimili (0741) 62703

Yth. Inspektur Tebo
di Muara Tebo

NOMOR : TU.00/SP-1392/PW05/1/2022

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tebo 2022 Nomor : PE.09.03/LHP -393/PW05/6/2022 Tanggal : 8 Desember 2022	1 Eks	Disampaikan dengan hormat untuk dapat digunakan seperlunya

Jambi, 19 Desember 2022

a.n. Kepala Perwakilan
Kepala Bagian Umum

Plh. Kepala Sub Koordinator
Pengelola BMN, Rumah Tangga dan
Kearsipan

Irwan
NIP 19820119 200312 1 001

Diterima oleh :
Nama :
Tanggal :
Tanda Tangan :
Cap :
Catatan : Lembar ke-dua tembusan pengantar ini setelah ditanda tangani dan dicap dikembalikan kepada kami.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107, Jambi 36129
Telepon (0741) 65701, 61682 (*Hunting*), Faksimile (0741) 62703
Alamat Surel: jambi@bpkp.go.id

**ASERSI HASIL EVALUASI JENJANG PERTAMA
ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2022 sebagaimana Laporan Nomor PE.09.03/LHP-393//PW05/6/2022 tanggal 8 Desember 2022 terlampir.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2022 berada pada Level 3 dengan Skor 3,13 dengan simpulan per elemen sebagai berikut:

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,72	3	0,63
2.	Praktik Profesional	4	0,72	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18	3	0,22
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6.	Peran dan Layanan	3	1,20	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,36	3	3,13

Evaluasi kami lakukan berdasarkan pemenuhan tiga komponen penilaian yang mempengaruhi efektivitas peran pengawasan Inspektorat Kabupaten Tebo sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*).

Evaluasi tersebut didukung *evidence* yang memadai, pemenuhan indikator tata kelola, dan setiap topik/elemen kapabilitas APIP telah diimplementasikan secara berkelanjutan selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) serta tidak terdapat permasalahan/kasus hukum dalam lingkup tahun penilaian yang dapat mempengaruhi tingkat kapabilitas yang dicapai.

Jambi, 8 Desember 2022

Kepala Perwakilan, 



Sueb Cahyadi

NIP.19640508 198603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Lintas Tebo - Bungo km.12

Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuli Dayung

Telp. (0744) 21290 Fax. 21582 & 21613

MUARA TEBO

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : BRRPP
No. Surat : LHE-393/PW-05/6/2022
Tgl. Surat : 8-12-2022

Diterima : 23-12-2022
No. Agenda : 62/824
Sifat :
 Sangat Segera
 Segera
 Rahasia

Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Peningkatan kapasitas APIP Level 3 Pada Inspektorat kab. Tebo Tahun 2022

Dihaturkan kepada :

- Yth. Bapak Bupati
- Yth. Bapak wakil Bupati

RISPOSISI BUPATI

*Inspektur
Kelayari dan Linda dan
gati Rista Pedanani*

DISPOSISI WABUP

24/12

DISPOSISI SEKDA

23/12

Diteruskan Yth. Bp Bupati
DISPOSISI ASISTEN



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Jambi

Laporan Hasil Evaluasi

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tebo



Nomor : PE.09.03/LHP-393/PW.05/6/2022

Tanggal: 8 Desember 2022



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107, Jambi 36129
Telepon: (0741) 65701, 61682 (Hunting), Faksimile: (0741) 62703
Alamat Surel: jambi@bpkp.go.id

Nomor : LHE-393/PW.05/6/2022

8 Desember 2022

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP
Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Tebo
Tahun 2022

Yth. Bupati Tebo
di Muaro Tebo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabuapten Tebo berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Dari hasil evaluasi kami menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Tebo telah berada pada **Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,13** dengan rincian sebagai berikut :

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1.	Pengelolaan SDM	0,72	4	0,63	3
2.	Praktik Profesional	0,72	4	0,54	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	3	0,22	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisai	0,18	3	0,18	3
5.	Struktur Tata Kelola	0,36	3	0,36	3
6.	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3
Nilai Skor		3,36	3	3,13	3

Dari hasil evaluasi masih dijumpai *Area of Improvement* (Aoi) yang perlu perbaikan, antara lain :

No	Topik	Area of Improvement (Aoi)
1.	Elemen 1 : Pengelolaan SDM	
	Topik 1 Perencanaan SDM Level 4	Analisa Jabatan dan Uraian Jabatan telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi secara berkelanjutan sesuai kebutuhan
	Topik 2 Pengembangan SDM Profesional Level 4	Pengembangan SDM telah memiliki Peta Kompetensi tetapi belum memuat analisis Gap Kompetensi
		Pengembangan SDM APIP telah dilaksanakan tetapi belum dievaluasi atas aturan standar kompetensi, peta kompetensi, gap kompetensi dan rencana pelatihan.
		SDM APIP telah memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh atas partisipasi pada organisasi profesi untuk meningkatkan pengawasan tetapi belum membuat rencana kerja pelatihan mandiri kepada auditor lainnya.
		Inspektorat Tebo belum menetapkan pejabat yang menjadi teladan beikut <i>role model</i> yang diembannya.
2.	Elemen 2 : Praktik Profesional	
	Topik 1 Perencanaan Pengawasan Level 4	Rencana pengawasan belum dievaluasi secara berkelanjutan.
	Topik 2 Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Level 4	Kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan kualitas (Quality Assurance and Improvement Program) belum dievaluasi secara berkelanjutan
		Notulen kegiatan berbagi pengetahuan yang dilakukan Inspektur belum terdokumentasi.

No	Topik	Area of Improvement (Aoi)
3.	Elemen 3 : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	
	Topik 3 Sistem Pengukuran Kinerja APIP Level 2	Kebijakan pengukuran kinerja belum mengatur mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan periode serta ruang lingkup.
	Topik 2 Pelaksanaan Anggaran Level 4	Sistem pelaksanaan anggaran APIP belum dievaluasi dan belum ada tindak lanjutnya selama 3 tahun berturut turut.
		Laporan Kinerja belum dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan informasi relevan, tepat guna dan dilakukan perbaikan.
4.	Elemen 4 : Budaya dan Hubungan Organisasi	
	Topik 1 Pengelolaan Komunikasi Intern Level 3	Belum dilaksanakan Survey kepuasan pegawai terhadap pelaksanaan apel pagi, rapat berkala, pengarahan, PPM dan ekspose LHP.
	Topik 1 Pengelolaan Komunikasi Intern Level 4	Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal belum dievaluai selama 3 tahun berturut- turut.
	Topik 2 Hubungan APIP dengan Manajemen Level 4	Belum terdapat Laporan hasil evaluasi tahunan yang memastikan bahwa Kepala Daerah memahami tujuan jangka panjang dan jangka pendek APIP.
		Belum terdapat Laporan hasil evaluasi atas partisipasi APIP dalam forum bersama minimal 3 tahun berturut-turut dan tindak lanjutnya.
		APIP telah membagikan pengetahuan dan pengalaman praktik terbaik dalam pengawasan kepada OPD namun belum tertuang dalam dokumen Laporan hasil evaluasi membagikan pengetahuan dan

No	Topik	Area of Improvement (Aoi)
		pengalaman praktik terbaik serta tindak lanjutnya.
		Belum terdapat Laporan Hasil Evaluasi atas identifikasi area pengawasan dan koordinasi dengan pihak lain terkait area penawasan selama 3 tahun berturut-turut dan tindak lanjutnya.
5.	Elemen 5 : Struktur Tata Kelola	
	Topik 1 Mekanisme Pendanaan Level 4	Alokasi anggaran pengawasan belum dievaluasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pengawasan intern yang ditetapkan melalui proses yang transparan.
	Topik 3 Hubungan Pelaporan Level 4	Kebijakan pelaporan kegiatan APIP belum dievaluasi secara berkala menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi.
6.	Elemen 6	
	Topik 1 Audit Ketaatan Level 3	Kertas Kerja penilaian SPI belum ada.
	Topik 2 Audit Kinerja Level 3	Perencanaan audit kinerja belum membuat kertas kerja survey pendahuluan
		Perencanaan audit kineja belum membuat Register Risiko dan Hasil Evaluasi Register Risiko
	Topik 1 Audit Ketaatan Level 4	Pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan belum dievaluasi sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.
	Topik 2 Audit Kinerja Level 4	Pedoman dan pelaksanaan audit kinerja belum dievaluasi sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.
		Belum terdapat surat atensi terkait perbaikan GRC yang didasarkan pada hasil audit kinerja.

No	Topik	Area of Improvement (Aoi)
		Belum terdapat Register Risiko unit kerja yang diaudit.
	Topik 3 Asurans GRC Level 4	Pedoman pelaksanaan asurans atas GRC belum dievaluasi secara terus menerus
	Topik 4 Jasa Konsultasi Level 4	Pedoman pelaksanaan pemberian jasa konsultasi belum dievaluasi secara terus menerus.
		Belum terdapat Laporan Hasil Pemberian Jasa Konsultasi ke luar kantor dan dokumen buku tamu pemberian jasa konsultasi di dalam kantor dalam 3 tahun terakhir.
		Belum terdapat tindak lanjut rencana aksi perbaikan jasa konsultasi dalam 3 tahun terakhir.

Sehubungan dengan capaian tersebut, kami menyarankan kepada Bupati Tebo agar menginstruksikan Inspektur Kabupaten Tebo untuk :

1. Menindaklanjuti *Area of Improvement (Aoi)* masing-masing elemen yang masih memerlukan perbaikan.
2. Melakukan *update* dokumen yang mendukung pernyataan dalam Peningkatan Kapabilitas APIP secara berkala untuk Penilaian Mandiri dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP tahun berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan, *[Signature]*

Sueb Cahyadi

NIP 19640508 198603 1 001

Tembusan Yth :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kabupaten Tebo



BUPATI TEBO

KATA PENGANTAR



Bismillaahirrahmaanirrahiim Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya semata, penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun untuk memenuhi amanah Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan LPPD Kabupaten Tebo Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Tebo memuat Capaian Kinerja Makro, Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tugas Pembantuan serta dilengkapi dengan Indikator Kinerja kunci (IKK) Output dan Outcome.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan rangkuman kegiatan Bupati Tebo serta kegiatan dari seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo, disamping sebagai pertanggungjawaban kepada publik, juga diharapkan dapat memberi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab.

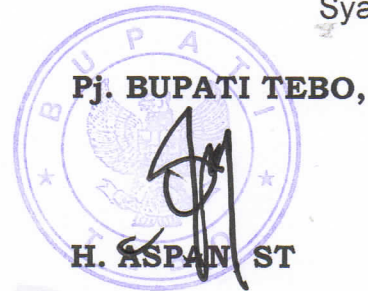
Dengan disusunnya Laporan ini, maka tersedia bahan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo, sehingga kedepan diharapkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien serta terwujudnya Visi Misi Tebo Tuntas 2022.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Oleh karena itu berbagai kritik saran kami harapkan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih menyempurnakan laporan ini pada khususnya dan pada akhirnya bagi kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tebo, segala kekurangan dalam penyampaian, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulusnya.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022, saya berharap semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kabupaten Tebo senantiasa memperoleh petunjuk serta Ridho Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muara Tebo, 20 Maret 2023 M
Sya'ban 1444 H





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Sejak berlakunya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sampai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) hingga Bulan Desember 2017 telah terbentuk 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Tebo yang dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Tebo terletak pada arah Barat Provinsi Jambi, dengan jarak 210 km. Secara geografis Kabupaten Tebo terletak dengan posisi pada titik koordinat antara 0'52'32" – 1'54'50" Lintang Selatan dan 101'48'57' – 102'49'17" Bujur Timur dengan derajat elevasi berada pada ketinggian 70-100 meter dari permukaan laut, dengan batas-batas wilayah:

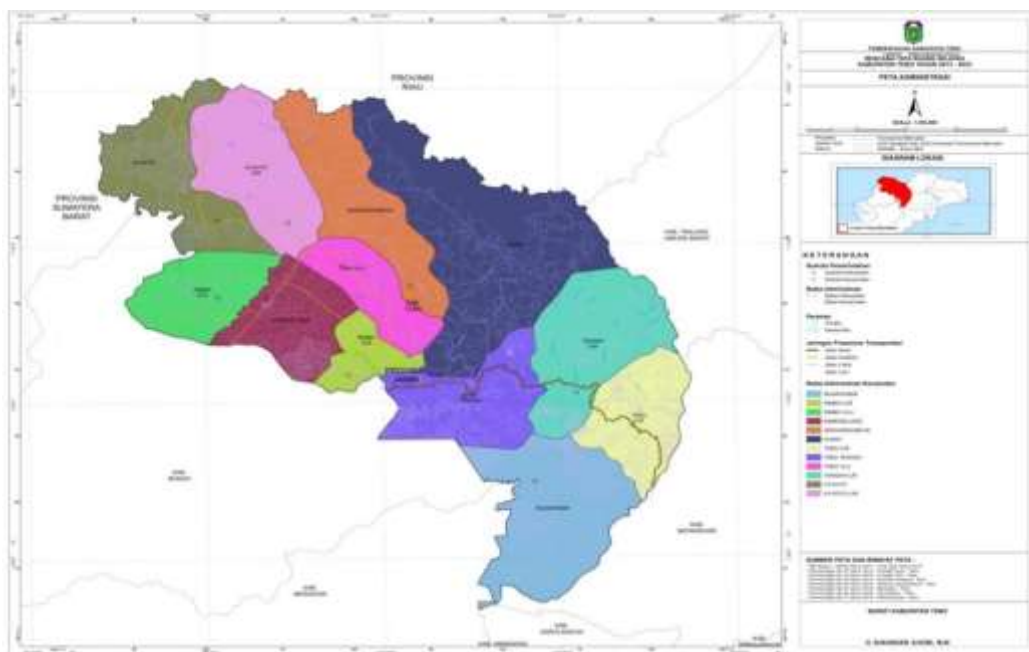
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Ulu Provinsi Riau, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Kabupaten Batang Hari.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang Hari.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batang Hari.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Luas Wilayah Kabupaten Tebo secara keseluruhan seluas \pm 6.427 Km² atau 11,86% dari luas Provinsi Jambi dimana Kabupaten Tebo pada sampai dengan Tahun 2022 secara administrasi sudah memiliki 12 Kecamatan, 122 Desa, dan 7 (tujuh) Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sumay 19,63% dari luas wilayah Kab. Tebo disusul dengan Kecamatan Tebo Tengah 15,22%, Kecamatan Tebo Ilir 10,97%, Kecamatan VII Koto 10,20%, Muara Tabir 7,88%, Kecamatan VII Koto Ilir 7,25%, Kecamatan Tebo Ulu 6,35%, Rimbo Bujang 6,30%, Kecamatan Serai 4,89%, Kecamatan Rimbo Ulu 4,58%, Kecamatan Tengah Ilir 3,43% dan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rimbo Ilir 3,32% dari luas wilayah Kabupaten Tebo.

Adapun Peta Kabupaten Tebo dan Data Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Diagram Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Gambar dan Tabel di bawah ini :

Gambar. I.1. Peta Kabupaten Tebo



Sumber : Peta Imajiner Kabupaten Tebo

Tabel. I.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tebo

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas	
			Km ²	%
1	Tebollir	Sungai Bengkal	691,7	10,97
2	Muara Tabir	PintasTuo	495,3	7,88
3	Tebo Tengah	Muara Tebo	983,56	15,22
4	Sumay	TelukSingkawang	1.268,00	19,63
5	Tengah Ilir	Mengupeh	221,44	3,43
6	RimboBujang	Wirotho Agung	406,92	6,30
7	Rimbo Ulu	SukaDamai	293,74	4,58



8	Rimbolir	KarangDadi	213,34	3.32
9	Tebo Ulu	PulauTemiang	410,3	6,35
10	VII Koto	Sungai Abang	658,79	10,20
11	Serai Serumpun	Sekutur Jaya	315,7	4,89
12	VII Koto Ilir	Balai Rajo	468,21	7,25
Jumlah			6.427,00	100,00

: BappedaLitbang Kabupaten Tebo

Wilayah Kabupaten Tebo memiliki topografi yang bervariasi meliputi dataran rendah dan sedikit berbukit-bukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut kawasan Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. < 99 M dpl : 84.96%
2. 100 – 499 M dpl : 14.98%
3. 500 – 999 M dpl : 0.06%

Berdasarkan keadaan alam, wilayah Kabupaten Tebo merupakan wilayah datar, bergelombang dan terdapat sedikit wilayah berbukit dan rawa-rawa. Wilayah dataran terdapat di sebagian Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan VII Koto. Rawa-rawa tersebar terutama disepanjang aliran Sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sumay dan Batang Pelepat.

Kabupaten Tebo beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25,80°C – 28,7°C dengan rata-rata curah hujan 300 MM pertahun dan tingkat kelembaban lebih kurang antara 56% - 85%. Suhu. Ditinjau dari fisiografis wilayah KabupatenTebo termasuk jalur Zone 11 Bukit Barisan. Pada umumnya Kabupaten Tebo mempunyai iklim tropis basah dengan beberapa variasi kecil curah hujan yang hampir merata disetiap tahun, sedangkan perbedaan terjadi antara musim kemarau (BulanFebruari – Bulan Agustus) dan musim hujan (Bulan September – Bulan Januari) tidak terlalu bervariasi besar. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Tebo terdapat 4 (empat) jenis tanah, yaitu :

1. Podzolik 438.000 Ha (67.79%)
2. Latosol 204.600 Ha (31.67%)
3. Aluvial 2.200 Ha (0.034%)
4. Organosol 1.300 Ha (0.020%)

Dengan rincian penyebarannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. I.2. Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tebo

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		PMK	Latosol	Alluvial	Organosol	
1	Tebo Tengah	80.789	3.537	13.747	283	98.356
2	Tebollir	32.246	24.096	-	14.528	70.870
3	Sumay	56.566	49.991	6.722	13.521	126.800
4	Tebo Ulu	34.920	819	2.035	3.256	41.030
5	VII Koto	44.301	18.828	2.350	400	65.879
6	RimboBujang	32.563	2.641	3.252	2.236	40.692
7	Rimbollir	20.944	220	152	118	21.434
8	Rimbo Ulu	26.900	650	-	2.024	29.574
9	Tengah Ilir	12.456	9.688	-	-	22.144
10	VII Koto Ilir	26.358	18.114	2.349	-	46.821
11	Serai Serumpun	18.981	12.589	-	-	31.570
12	Muara Tabir	50.930	-	-	-	50.930
Jumlah		437.954	141.173	30.607	36.366	646.100
% Kabupaten		67,78	21,85	4,74	5,63	100

Sumber :Bappedalitbang KabupatenTebo

c. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tebo pada Tahun 2022 sebanyak 350.234 jiwa yang terdiri dari 179.743 jiwa laki-laki (51,32%) dan 170.491 jiwa perempuan (48,68%) dengan total keluarga sebanyak 108.735 Kepala Keluarga, untuk lebih jelasnya dapat dirinci per Kecamatan pada tabel berikut :

**Tabel. I.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan**

No.	KECAMATAN	Jumlah KK	PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK (L+P)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6
1	Tebo Tengah	12.383	21.126	20.300	41.426
2	Tebo Ilir	9.159	14.892	13.718	29.198
3	Tebo Ulu	10.941	17.292	16.850	34.142
4	Rimbo Bujang	20.075	33.218	31.471	64.689
5	Sumay	7.286	12.532	11.516	24.048
6	VII Koto	6.017	10.011	9.557	19.568
7	Rimbo Ulu	12.206	19.757	18.776	38.533
8	Rimbo Ilir	7.655	12.046	11.603	23.649
9	Tengah Ilir	8.265	14.309	13.154	27.463
10	Serai Serumpun	3.270	5.466	5.052	10.518
11	VII Koto Ilir	5.758	9.754	9.161	18.915
12	Muara Tabir	5.720	9.340	8.745	18.085
Jumlah		108.735	179.743	170.491	350.234

Sumber : SIAK Semester II Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2021

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (untuk Kabupaten/Kota)

Sejak awal pembentukan, Kabupaten Tebo terdiri dari 4 (empat) Kecamatan definitif yaitu:

1. Kecamatan Tebo Tengah terdiri dari 2 Kelurahan dan 14 Desa.
2. Kecamatan Tebo Ilir terdiri dari 1 Kelurahan dan 17 Desa.
3. Kecamatan Tebo Ulu terdiri dari 1 Kelurahan dan 16 Desa, dan
4. Kecamatan Rimbo Bujang terdiri dari 3 Kelurahan dan 13 Desa.

Serta ada 2 (dua) Kecamatan Pembantu yaitu:

1. Kecamatan Pembantu Sumay terdiri dari 12 Desa, dan
2. Kecamatan Pembantu VII Koto terdiri dari 10 Desa.

Dalam kurun waktu 23 Tahun Kabupaten Tebo pada saat ini telah memiliki 12 Kecamatan yang telah definitif, 122 Desa dan 7 Kelurahan.



Tabel. I.4. Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Kabupaten Tebo

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
1	2	3	4
I.	TEBO TENGAH	1. Muara Tebo 2. Tebing Tinggi	1. Bedaro Rampak 2. Mengun Jayo 3. Teluk Pandak 4. Tengah Ulu 5. Semabu 6. Kandang 7. Pelayang 8. Sungai Keruh 9. Amburan Batang Tebo 10. Sungai Alai
II.	TEBO ILIR	1. Sungai Bengkal	1. Sungai Aro 2. Teluk Rendah Pasar 3. Teluk Rendah Ulu 4. Teluk Rendah Ilir 5. Tuo Ilir 6. Betung Bedarah Timur 7. Betung Bedarah Barat 8. Kunangan 9. Muara Ketalo 10. Sungai Bengkal 11. Kemantan
III.	TEBO ULU	1. Pulau Temiang	1. Sungai Rambai 2. Pagar Puding 3. Teluk Kembang Jambu 4. Teluk Kasai Rambahan 5. Rantau Langkap 6. Tanjung Aur 7. Bungo Tanjung 8. Pulau Panjang 9. Lubuk Benteng 10. Teluk Kualii 11. Melako Intan 12. Jambu 13. Medan Seri Rambahan 14. Ulak Banjir Rambahan 15. Teluk Pandan Rambahan 16. PulauJ elmu
IV.	RIMBO BUJANG	1. Wirotho Agung 2. Mandiri Agung 3. Sarana Agung	1. Perintis 2. Rimbo Mulyo 3. Purwoharjo 4. Tegal Arum 5. Tirta Kencana 6. Sapta Mulya 7. Pematang Sapat 8. Perintis Jaya 9. Jaya Mulya

MEWUJUDKAN



			<ol style="list-style-type: none">10. Purwo Dadi11. Tegal Asri12. Mekar Kencana
V.	SUMAY		<ol style="list-style-type: none">1. Teluk Singkawang2. Lembak Bungur3. Teluk Langkap4. Tambun Arang5. Punti Kalo6. Jati Belarik7. Tuo Sumay8. Teriti9. Suo-Suo10. Muara Sekalo11. Semambu12. Pelayungan
VI.	VII KOTO		<ol style="list-style-type: none">1. Tanjung Pucuk Jambi2. Kuamang3. Teluk Kayu Putih4. Sungai Abang5. Aur Cino6. Dusun Baru7. Muara Niro8. Tabun9. Muara Tabun10. Teluk Lancang
VII.	RIMBO ULU		<ol style="list-style-type: none">1. Suka Damai2. Wanareja3. Sumber Sari4. Sido Rukun5. Sungai Pandan6. Suka Maju7. Mekar Sari8. Wana Arum9. Wana Mulya10. Damai Makmur11. Suka Jaya12. Sido Mulyo
VIII.	RIMBO ILIR		<ol style="list-style-type: none">1. Giriwinangun2. Sidorejo3. Pulungrejo4. Karang Dadi5. Giri Purno6. Sumber Agung7. Sari Mulya8. Sepakat Bersatu9. Rantau Kembang10. Giri Mulyo
IX.	TENGAH ILIR		<ol style="list-style-type: none">1. Muara Kilis2. Penapalan3. Mengupeh



			<ol style="list-style-type: none"> 4. Rantau Api 5. Lubuk Mandarsah 6. Lubuk Mandarsah Ulu
X.	SERAI SERUMPUN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pinang Belai 2. Sekutur Jaya 3. Bukit Pemuatan 4. Napal Putih 5. Sako Makmur 6. Pagar Puding Lamo 7. Tanjung Aur Seberang 8. Teluk Melintang
XI.	VII KOTO ILIR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teluk Kepayang Pulau Indah 2. Balai Rajo 3. Cermin Alam 4. Sungai Karang 5. Paseban 6. PasirMayang
XII.	MUARA TABIR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Garo 2. Pintas Tuo 3. Embacang Gedang 4. Bangun Seranten 5. Tambun Arang 6. Sungai Jernih 7. Bangko Pintas 8. OlakKemang
	12 Kecamatan	12 Kelurahan	122 Desa

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupatenTebo

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki 13 (tiga belas) Perangkat Daerah dengan Tipe A, 6 (enam) Perangkat Daerah dengan Tipe B, 2 (dua) Dinas dengan Tipe C, 3 (tiga) Badan dengan Tipe A dan 1 (satu) Badan dengan Tipe B, 1 (satu) Kantor, 1 (satu) RSUD dan 12 Kecamatan sebagaimana tabel sebagai berikut :



Tabel. I.5. Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Tebo

	DINAS DAERAH	BADAN	KECAMATAN
TIPE A			
1. SEKRETARIAT DAERAH	1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN	1. TEBO TENGAH
2. INSPEKTORAT DAERAH	2. DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 4. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN 6. DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN 8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2. BADAN KEUANGAN DAERAH	2. TEBO ILIR 3. TEBO ULU 4. RIMBO BUJANG 5. SUMAY 6. VII KOTO 7. RIMBO ULU 8. RIMBO ILIR 9. TENGAH ILIR 10. VII KOTO ILIR 11. SERAI SERUMPUN 12. MUARA TABIR
TIPE B			
3. SEKRETARIAT DPRD	10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 13. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA		
TIPE C			
	15. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 16. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
NOMENKLATUR LAMA			
1. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDIN			

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Tebo

Tabel. I.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah

No.	Nomenklatur	Tipe	Jumlah Pegawai	Ket
1.	Sekretariat Daerah	A	79	
2.	Sekretariat DPRD	B	21	
3.	Inspektorat	A	43	
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	59	
5.	Dinas Kesehatan & KB	A	57	
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	A	55	
7.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	A	31	



8.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Ketahanan Pangan	A	61	
9.	Dinas Lingkungan Hidup & Perhubungan	A	51	
10.	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	A	22	
11.	Dinas Perkebunan, Perikanan & Peternakan	A	25	
12.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	A	21	
13.	Satua Polisi Pamong Praja	B	30	
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	B	19	
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	25	
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	19	
17.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	B	18	
18.	Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan	C	22	
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	C	19	
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penelitian Pengembangan	A	32	
21.	Badan Keuangan Daerah	A	46	
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	18	
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	29	
24.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	16	
26.	Rumah Sakit Umum Daerah STS	-	202	
27.	Puskesmas		572	
28.	Kecamatan		163	12 Kec



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



PEMERINTAHAN KAB. TEBO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2022

01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.175.676.863.205,61	1.174.829.007.742,31	99,93	1.167.195.696.528,30
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.740.463.914,03	86.173.512.980,31	90,01	92.915.275.640,96
4.1.01	Pajak Daerah	20.423.730.743,00	23.343.449.484,64	114,30	22.539.888.831,22
4.1.01.06	Pajak Hotel	35.000.000,00	42.518.500,00	121,48	39.585.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	35.000.000,00	42.518.500,00	121,48	39.585.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	35.000.000,00	42.518.500,00	121,48	39.585.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.899.013.784,64	158,25	1.581.681.220,22
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000,00	1.899.013.784,64	158,25	1.581.681.220,22
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000,00	1.899.013.784,64	158,25	1.581.681.220,22
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.000.000,00	2.943.350,00	147,17	150.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	2.000.000,00	2.943.350,00	147,17	0,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	2.000.000,00	2.943.350,00	147,17	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	375.000.000,00	478.883.804,00	127,70	446.673.022,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	375.000.000,00	478.883.804,00	127,70	446.673.022,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	375.000.000,00	478.883.804,00	127,70	446.673.022,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	14.500.000.000,00	16.170.889.499,00	111,52	15.895.146.082,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.500.000.000,00	16.170.889.499,00	111,52	15.895.146.082,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.500.000.000,00	16.170.889.499,00	111,52	15.895.146.082,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	75.000.000,00	107.352.000,00	143,14	90.250.400,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	75.000.000,00	107.352.000,00	143,14	90.250.400,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	75.000.000,00	107.352.000,00	143,14	90.250.400,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.516.163,00	100,65	3.114.422,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.516.163,00	100,65	3.114.422,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.516.163,00	100,65	3.114.422,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	12.835.000,00	128,35	12.657.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	12.835.000,00	128,35	12.657.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	12.835.000,00	128,35	12.657.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	460.458.243,00	92,09	489.437.987,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	460.458.243,00	92,09	489.437.987,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	460.458.243,00	92,09	489.437.987,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.593.230.743,00	2.261.737.973,00	87,22	2.342.386.948,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.593.230.743,00	2.261.737.973,00	87,22	2.342.386.948,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.593.230.743,00	2.261.737.973,00	87,22	2.342.386.948,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.131.000.000,00	1.904.301.168,00	168,37	1.638.806.750,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.131.000.000,00	1.904.301.168,00	168,37	1.638.806.750,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.131.000.000,00	1.904.301.168,00	168,37	1.638.806.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.908.000.000,00	3.071.828.524,00	78,60	2.830.768.040,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.912.000.000,00	2.409.094.790,00	82,73	2.292.448.400,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.100.000.000,00	1.780.384.790,00	84,78	1.677.111.400,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.100.000.000,00	1.780.384.790,00	84,78	1.677.111.400,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	120.000.000,00	114.816.000,00	95,68	123.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	120.000.000,00	114.816.000,00	95,68	123.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65.000.000,00	59.350.000,00	91,31	61.997.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65.000.000,00	59.350.000,00	91,31	61.997.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	427.000.000,00	360.565.000,00	84,44	383.208.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	177.000.000,00	168.425.000,00	95,16	163.440.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	250.000.000,00	192.140.000,00	76,86	219.768.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165.000.000,00	61.174.000,00	37,08	19.187.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165.000.000,00	61.174.000,00	37,08	19.187.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00	0,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000,00	30.805.000,00	102,68	27.945.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya	30.000.000,00	30.805.000,00	102,68	27.945.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	896.000.000,00	565.243.450,00	63,09	500.363.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	631.000.000,00	493.223.450,00	78,17	431.260.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	300.000.000,00	303.590.000,00	101,20	352.719.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000,00	15.131.400,00	60,53	25.594.100,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	306.000.000,00	174.502.050,00	57,03	52.946.900,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	200.000.000,00	13.170.000,00	6,59	10.107.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	200.000.000,00	13.170.000,00	6,59	10.107.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.196.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.196.000,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	23.850.000,00	79,50	23.800.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	23.850.000,00	79,50	23.800.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	97.490.284,00	97,49	37.956.640,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	37.956.640,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	37.956.640,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00	97.490.284,00	97,49	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00	97.490.284,00	97,49	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.693.391.104,03	10.693.391.104,03	100,00	8.777.303.549,16
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	0,00	0,00	0,00	8.777.303.549,16
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	0,00	0,00	0,00	8.777.303.549,16
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	0,00	0,00	0,00	8.777.303.549,16
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	10.693.391.104,03	10.693.391.104,03	100,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	10.693.391.104,03	10.693.391.104,03	100,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada	10.693.391.104,03	10.693.391.104,03	100,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.715.342.067,00	49.064.843.867,64	80,81	58.767.315.220,58
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	556.104.800,00	287.125.800,00	51,63	656.939.500,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	385.915.500,00
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	385.915.500,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	445.000.000,00	169.300.000,00	38,04	271.024.000,00
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	103.000.000,00	19.800.000,00	19,22	16.000.000,00
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	92.000.000,00	6.000.000,00	6,52	10.024.000,00
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	250.000.000,00	143.500.000,00	57,40	245.000.000,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	111.104.800,00	117.825.800,00	106,05	0,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	111.104.800,00	117.825.800,00	106,05	0,00
4.1.04.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Memukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	(103.316,84)	0,00	103.316,84
4.1.04.02.07	Hasil Selisih Lebih Tukar Memukar Aset Tidak Berwujud	0,00	(103.316,84)	0,00	103.316,84
4.1.04.02.07.0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Memukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-	0,00	(103.316,84)	0,00	103.316,84
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000,00	400.000,00	40,00	135.500.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.000.000,00	400.000,00	40,00	135.500.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.000.000,00	400.000,00	40,00	135.500.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.900.000.000,00	2.421.589.013,93	127,45	1.636.531.639,04
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.600.000.000,00	2.378.333.946,06	148,65	1.579.967.600,48
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.600.000.000,00	2.378.333.946,06	148,65	1.579.967.600,48
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	300.000.000,00	43.332.392,77	14,44	56.564.038,56
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	300.000.000,00	43.332.392,77	14,44	56.564.038,56
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	(77.324,90)	0,00	0,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	(77.324,90)	0,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.415.503.867,00	2.431.052.126,72	23,34	3.945.071.429,77
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.415.503.867,00	2.431.052.126,72	23,34	3.945.071.429,77
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.415.503.867,00	2.431.052.126,72	23,34	3.945.071.429,77
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.250.000.000,00	8.338.834.577,11	81,35	1.276.114.100,49
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	10.250.000.000,00	8.338.834.577,11	81,35	1.276.114.100,49
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	10.250.000.000,00	8.338.834.577,11	81,35	1.276.114.100,49
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.022.234.000,00	1.542.200.088,54	150,87	715.753.678,99
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.022.234.000,00	1.542.200.088,54	150,87	715.753.678,99
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.022.234.000,00	1.542.200.088,54	150,87	715.753.678,99
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.730.000.000,00	1.191.130.265,28	43,63	814.009.352,61
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal	0,00	0,00	0,00	814.009.352,61
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal	0,00	0,00	0,00	814.009.352,61
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.730.000.000,00	1.191.130.265,28	43,63	0,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.730.000.000,00	1.191.130.265,28	43,63	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	26.148.499.400,00	25.821.133.886,90	98,75	41.646.710.902,84
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	26.148.499.400,00	25.821.133.886,90	98,75	41.646.710.902,84
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	26.148.499.400,00	25.821.133.886,90	98,75	41.646.710.902,84
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat	7.500.000.000,00	7.029.671.426,00	93,73	7.932.581.300,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.500.000.000,00	7.029.671.426,00	93,73	7.932.581.300,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.500.000.000,00	7.029.671.426,00	93,73	7.932.581.300,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	192.000.000,00	1.810.000,00	0,94	8.000.000,00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	192.000.000,00	1.810.000,00	0,94	8.000.000,00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	192.000.000,00	1.810.000,00	0,94	8.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.740.463.914,03	86.173.512.980,31	90,01	92.915.275.640,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.079.936.399.291,58	1.075.002.494.762,00	99,54	1.017.377.596.682,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.003.793.125.541,00	999.216.814.233,00	99,54	950.568.704.531,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	883.326.202.541,00	878.749.933.533,00	99,48	830.312.232.151,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	92.347.700.541,00	112.313.366.709,00	121,62	105.448.308.409,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	26.537.091.727,00	39.347.994.864,00	148,28	45.540.319.799,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.339.590.759,00	4.487.609.000,00	84,04	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	168.836.000,00	168.836.000,00	100,00	5.568.027.700,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	54.728.000,00	8.978.890,00	16,41	44.057.798,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	13.091.875.000,00	21.626.115.388,00	165,19	11.897.874.468,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	19.387.224.000,00	20.151.220.567,00	103,94	17.199.949.658,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-	21.018.471.000,00	21.018.471.000,00	100,00	18.254.347.364,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	4.791.573.055,00	3.545.830.000,00	74,00	5.269.231.472,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	528.684.400.000,00	528.139.803.682,00	99,90	528.393.374.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	528.684.400.000,00	528.139.803.682,00	99,90	528.393.374.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	124.410.389.000,00	119.661.886.924,00	96,18	109.644.246.148,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	749.277.000,00	748.239.427,00	99,86	252.263.900,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	21.527.722.000,00	21.415.581.108,00	99,48	12.953.221.996,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.743.656.000,00	11.418.643.740,00	97,23	13.317.342.179,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	4.499.450.000,00	4.410.615.822,00	98,03	0,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	12.807.541.160,00
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	42.932.616.513,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.239.047.000,00	2.083.698.653,00	93,06	2.177.484.572,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penurunan AKI dan AKB	12.572.565.000,00	11.358.593.829,00	90,34	0,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	961.111.000,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian	1.744.392.000,00	1.573.175.189,00	90,18	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	876.100.000,00	824.910.880,00	94,16	1.054.302.973,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penurunan Stunting (KB)	236.964.000,00	236.872.000,00	99,96	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	0,00	0,00	0,00	2.554.421.500,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengawasan	0,00	0,00	0,00	593.125.850,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.577.268.000,00	7.470.121.000,00	98,59	11.120.320.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.606.661.000,00	9.334.921.700,00	97,17	0,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengawasan	0,00	0,00	0,00	5.748.167.215,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.079.329.000,00	5.079.329.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengawasan	0,00	0,00	0,00	2.399.602.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengawasan	0,00	0,00	0,00	772.725.290,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem	45.957.958.000,00	43.707.184.576,00	95,10	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	137.883.713.000,00	118.634.876.218,00	86,04	86.826.303.594,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.466.680.000,00	47.647.103.904,00	92,58	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.620.000.000,00	1.580.000.000,00	97,53	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	54.551.100.000,00	46.849.154.839,00	85,88	59.454.986.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.383.000.000,00	1.383.000.000,00	100,00	1.284.000.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.109.600.000,00	4.570.057.000,00	89,44	4.277.700.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.088.500.000,00	1.294.500.000,00	118,93	1.801.200.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.275.332.000,00	1.275.332.000,00	100,00	14.791.989.566,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	240.902.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	16.565.517.000,00	10.146.724.311,00	61,25	0,00
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	278.402.000,00	185.775.079,00	66,73	691.106.735,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.604.687.000,00	2.873.525.621,00	79,72	2.550.665.125,00
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.144.632.168,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	360.216.000,00	249.144.464,00	69,17	326.122.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	385.479.000,00	385.479.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	195.200.000,00	195.080.000,00	99,94	263.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	883.326.202.541,00	878.749.933.533,00	99,48	830.312.232.151,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.781.555.000,00	19.781.555.000,00	100,00	8.806.688.000,00
4.2.01.02.01	DID	19.781.555.000,00	19.781.555.000,00	100,00	8.806.688.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	19.781.555.000,00	19.781.555.000,00	100,00	8.806.688.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	100.685.368.000,00	100.685.325.700,00	100,00	111.449.784.380,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	100.685.368.000,00	100.685.325.700,00	100,00	111.449.784.380,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	100.685.368.000,00	100.685.325.700,00	100,00	111.449.784.380,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -	120.466.923.000,00	120.466.880.700,00	100,00	120.256.472.380,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.143.273.750,58	75.785.680.529,00	99,53	66.808.892.151,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.743.273.750,58	64.385.680.529,00	99,45	60.088.892.151,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.743.273.750,58	64.385.680.529,00	99,45	60.088.892.151,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.979.199.150,60	13.317.684.019,00	88,91	13.657.834.538,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.555.600.632,74	11.260.640.462,00	106,68	9.844.834.869,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.318.068.691,30	22.100.740.491,00	99,03	20.858.367.113,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	18.062.931,48	14.025.508,00	77,65	16.486.275,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.872.342.344,46	17.692.590.049,00	104,86	15.711.369.356,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	100,00	6.720.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	100,00	6.720.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	100,00	6.720.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	76.143.273.750,58	75.785.680.529,00	99,53	66.808.892.151,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.079.936.399.291,58	1.075.002.494.762,00	99,54	1.017.377.596.682,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	13.653.000.000,00	0,00	56.902.824.205,34
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	13.653.000.000,00	0,00	11.230.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	13.653.000.000,00	0,00	11.230.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	13.653.000.000,00	0,00	11.230.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	13.653.000.000,00	0,00	11.230.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	45.672.824.205,34
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	45.672.824.205,34
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	45.672.824.205,34
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	45.672.824.205,34



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	13.653.000.000,00	0,00	56.902.824.205,34
	JUMLAH PENDAPATAN	1.175.676.863.205,61	1.174.829.007.742,31	99,93	1.167.195.696.528,30
5	BELANJA DAERAH	1.448.960.037.377,00	1.338.008.631.206,07	92,34	1.145.760.283.465,25
5.1	BELANJA OPERASI	839.764.850.401,00	774.282.457.062,07	92,20	740.017.958.805,14
5.1.01	Belanja Pegawai	416.213.775.834,00	380.310.681.385,00	91,37	395.520.603.353,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	253.073.222.886,00	237.177.863.062,00	93,72	249.029.086.830,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	189.490.084.092,00	177.154.495.765,00	93,49	186.254.250.140,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	189.490.084.092,00	177.154.495.765,00	93,49	186.254.250.140,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.688.594.949,00	17.005.541.814,00	96,14	17.759.980.734,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.688.594.949,00	17.005.541.814,00	96,14	17.759.980.734,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.755.615.929,00	5.404.225.000,00	93,89	5.462.983.632,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.755.615.929,00	5.404.225.000,00	93,89	5.462.983.632,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.310.739.595,00	11.781.429.600,00	95,70	12.315.085.900,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.310.739.595,00	11.781.429.600,00	95,70	12.315.085.900,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.747.172.309,00	2.476.130.000,00	90,13	2.669.870.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.747.172.309,00	2.476.130.000,00	90,13	2.669.870.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.004.969.439,00	10.495.613.340,00	95,37	11.019.203.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.004.969.439,00	10.495.613.340,00	95,37	11.019.203.220,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	312.185.668,00	242.628.901,00	77,72	260.991.101,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	312.185.668,00	242.628.901,00	77,72	260.991.101,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.510.310,00	2.530.977,00	72,10	2.661.785,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.510.310,00	2.530.977,00	72,10	2.661.785,00
5.1.01.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.933.524.801,00	11.145.339.816,00	93,40	11.754.187.483,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.933.524.801,00	11.145.339.816,00	93,40	11.754.187.483,00
5.1.01.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	498.375.327,00	374.803.046,00	75,20	382.770.936,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	467.918.175,00	363.953.046,00	77,78	382.770.936,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	30.457.152,00	10.850.000,00	35,62	0,00
5.1.01.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.328.450.467,00	1.095.124.803,00	82,44	1.147.101.899,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.328.450.467,00	1.095.124.803,00	82,44	1.147.101.899,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	64.161.543.802,00	59.584.095.453,00	92,87	55.412.926.567,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.075.373.039,00	28.999.838.353,00	93,32	9.675.543.275,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.075.373.039,00	28.999.838.353,00	93,32	9.675.543.275,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.314.645.588,00	4.000.764.229,00	92,73	1.161.599.861,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.314.645.588,00	4.000.764.229,00	92,73	1.161.599.861,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	890.752.738,00	774.250.000,00	86,92	3.593.591.815,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	890.752.738,00	774.250.000,00	86,92	3.593.591.815,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	27.880.772.437,00	25.809.242.871,00	92,57	40.982.191.616,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	27.880.772.437,00	25.809.242.871,00	92,57	40.982.191.616,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.204.722.926,00	64.941.206.348,00	80,97	72.342.788.709,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	760.380.000,00	622.963.068,00	81,93	567.103.708,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.400.000,00	1.134.939,00	81,07	1.352.842,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	40.000.000,00	36.209.949,00	90,52	38.373.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	80.000,00	59.759,00	74,70	17.592,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12.000.000,00	11.999.656,00	100,00	9.663.046,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	540.000.000,00	529.865.383,00	98,12	472.716.161,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	800.000,00	799.951,00	99,99	591.540,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	100.000,00	49.221,00	49,22	74.632,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	400.000,00	97.113,00	24,28	385.114,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan	20.000.000,00	1.942.266,00	9,71	5.277.600,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	41.600.000,00	40.804.831,00	98,09	38.652.181,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	60.304.169.561,00	50.601.310.700,00	83,91	58.630.447.319,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	60.304.169.561,00	50.601.310.700,00	83,91	58.630.447.319,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.024.753.400,00	142.317.600,00	2,83	72.004.200,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.024.753.400,00	142.317.600,00	2,83	72.004.200,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.451.750.000,00	1.317.000.000,00	90,72	1.230.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.451.750.000,00	1.317.000.000,00	90,72	1.230.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.826.117.965,00	5.606.751.580,00	96,23	4.627.495.132,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.826.117.965,00	5.606.751.580,00	96,23	4.627.495.132,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.058.872.000,00	5.882.699.400,00	97,09	6.532.830.850,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	5.287.411.000,00	5.181.338.400,00	97,99	5.657.285.850,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	711.461.000,00	641.361.000,00	90,15	809.545.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	66.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	778.680.000,00	768.164.000,00	98,65	682.907.500,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	21.220.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	778.680.000,00	768.164.000,00	98,65	661.687.500,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.999.331.501,00	17.866.488.905,00	99,26	17.823.583.098,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	100,00	782.040.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	100,00	782.040.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.186.358,00	89.434.800,00	98,08	88.962.300,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.186.358,00	89.434.800,00	98,08	88.962.300,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.291.200,00	104.291.200,00	100,00	96.059.520,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.291.200,00	104.291.200,00	100,00	96.059.520,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	72.618.000,00	67.032.000,00	92,31	67.032.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	72.618.000,00	67.032.000,00	92,31	67.032.000,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00	1.133.958.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00	1.133.958.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.442.150,00	101.946.600,00	92,31	101.946.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.442.150,00	101.946.600,00	92,31	101.946.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.741.100,00	17.539.200,00	58,97	16.991.100,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.741.100,00	17.539.200,00	58,97	16.991.100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	100,00	4.410.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	100,00	4.410.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	100,00	1.102.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	100,00	1.102.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	363.182.623,00	355.715.187,00	97,94	354.324.510,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	363.182.623,00	355.715.187,00	97,94	354.324.510,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	88.484,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	88.484,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.459.621.032,00	4.436.191.918,00	99,47	4.403.929.068,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	123.894.504,00	101.001.646,00	81,52	68.738.796,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.742.832,00	1.608.768,00	92,31	1.608.768,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.228.496,00	4.826.304,00	92,31	4.826.304,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.328.755.200,00	4.328.755.200,00	100,00	4.328.755.200,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.265.840.000,00	5.265.840.000,00	100,00	5.265.840.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.265.840.000,00	5.265.840.000,00	100,00	5.265.840.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	73.822.554,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	73.822.554,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	266.854.719,00	232.927.617,00	87,29	311.018.149,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.764.000,00	1.764.000,00	100,00	4.116.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1.764.000,00	1.764.000,00	100,00	4.116.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	46.884.700,00	45.830.000,00	97,75	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	46.884.700,00	45.830.000,00	97,75	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.810.500,00	1.810.500,00	100,00	5.069.400,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.810.500,00	1.810.500,00	100,00	5.069.400,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	300.119,00	300.119,00	100,00	748.106,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	300.119,00	300.119,00	100,00	748.106,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	800,00	800,00	100,00	2.120,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	800,00	800,00	100,00	2.120,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.412.400,00	2.370.000,00	98,24	5.382.720,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.412.400,00	2.370.000,00	98,24	5.382.720,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	46.800,00	46.800,00	100,00	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	46.800,00	46.800,00	100,00	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	140.400,00	140.400,00	100,00	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	140.400,00	140.400,00	100,00	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	190.095.000,00	157.264.998,00	82,73	142.370.523,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	350.000,00	337.500,00	96,43	339.465,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	10.000.000,00	9.125.000,00	91,25	9.699.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	20.000,00	15.000,00	75,00	4.398,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	2.424.750,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	135.000.000,00	133.750.000,00	99,07	118.618.770,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	200.000,00	200.000,00	100,00	150.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	25.000,00	12.498,00	49,99	18.750,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung	100.000,00	25.000,00	25,00	96.990,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan	5.000.000,00	500.000,00	10,00	1.319.400,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas	10.400.000,00	10.300.000,00	99,04	9.699.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	508.100.000,00	508.100.000,00	100,00	601.200.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	306.500.000,00	306.500.000,00	100,00	399.600.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	306.500.000,00	306.500.000,00	100,00	399.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.243.737.356,00	379.865.428.669,07	93,74	301.502.764.818,14
5.1.02.01	Belanja Barang	105.722.063.452,00	100.490.280.770,00	95,05	69.912.802.267,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	105.662.256.842,00	100.430.524.160,00	95,05	69.903.454.702,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.460.060.179,00	2.428.705.499,00	98,73	3.464.618.136,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.586.723.960,00	1.426.605.071,00	89,91	891.225.249,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.025.195.715,00	890.697.879,00	86,88	2.356.222.948,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	149.970.650,00	149.970.650,00	100,00	1.747.250.607,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	590.885.178,00	563.418.158,00	95,35	304.663.610,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	70.960.000,00	65.670.000,00	92,55	19.560.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	859.758.000,00	810.621.556,00	94,28	885.026.598,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	143.789.775,00	111.201.760,00	77,34	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	692.107.510,00	688.639.884,00	99,50	277.379.961,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	62.512.870,00	45.663.450,00	73,05	207.775.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.870.805.701,00	4.392.158.291,00	74,81	9.579.717.570,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.609.050.900,00	2.433.141.969,00	93,26	1.718.553.261,00
5.1.02.01.01.0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.370.000,00	3.370.000,00	100,00	0,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	686.080.890,00	599.600.975,00	87,40	91.256.875,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	24.763.280,00	24.763.160,00	100,00	23.953.200,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	15.760.000,00	9.589.000,00	60,84	192.897.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.729.472.532,00	5.652.208.656,00	98,65	6.751.306.135,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.528.254.688,00	1.480.971.079,00	96,91	152.437.317,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.407.961.447,00	8.135.333.107,00	96,76	8.812.604.017,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	378.122.000,00	373.634.500,00	98,81	403.538.760,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi	161.332.783,00	40.290.000,00	24,97	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.169.949.680,00	2.985.588.684,00	94,18	1.581.108.131,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	600.682.610,00	597.538.320,00	99,48	38.092.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.822.139.790,00	1.804.590.883,00	99,04	1.447.363.240,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.755.749.960,00	1.716.583.220,00	97,77	1.737.321.425,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	917.338.586,00	916.337.125,00	99,89	940.171.533,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	91.825.200,00	91.225.200,00	99,35	1.640.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.509.104.950,00	1.470.013.165,00	97,41	479.527.476,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.961.097.271,00	5.765.891.262,00	96,73	1.558.407.900,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	69.277.140,00	67.023.080,00	96,75	6.547.914.466,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	34.562.654.010,00	33.808.372.429,00	97,82	410.284.830,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	749.984.601,00	748.885.779,00	99,85	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.192.917.530,00	1.106.120.735,00	92,72	1.750.891.100,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	545.591.250,00	491.172.150,00	90,03	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	172.699.520,00	170.323.570,00	98,62	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.732.671.150,00	9.907.074.290,00	92,31	8.179.009.307,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.846.315.560,00	3.808.709.914,00	99,02	1.687.516.100,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.800.000,00	30.800.000,00	100,00	65.400.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	909.084.013,00	790.768.700,00	86,99	678.398.250,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	13.560.000,00	2.000.000,00	14,75	624.280.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.852.945.000,00	2.739.706.500,00	96,03	3.069.046.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	58.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	42.547.700,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	147.550.000,00	147.380.000,00	99,88	99.850.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	336.168.050,00	328.510.550,00	97,72	240.175.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	337.730.223,00	332.812.860,00	98,54	335.100.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	227.732.190,00	227.091.100,00	99,72	402.824.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	59.806.610,00	59.756.610,00	99,92	9.347.565,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	46.666.500,00	46.666.500,00	100,00	4.100.000,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	5.750.000,00	5.700.000,00	99,13	3.050.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	7.390.110,00	7.390.110,00	100,00	2.197.565,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	131.719.889.377,00	124.087.341.407,00	94,21	107.093.285.946,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	91.246.767.414,00	85.564.781.969,00	93,77	81.864.962.200,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	8.100.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	2.773.422.500,00	2.462.077.500,00	88,77	1.018.570.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.959.920.000,00	4.661.864.000,00	93,99	3.627.490.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyaluhan atau Pendampingan	986.810.000,00	918.810.000,00	93,11	867.780.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	102.072.000,00	97.772.000,00	95,79	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengeloa Teknologi Informasi dan Pengeloa	74.500.064,00	71.500.064,00	95,97	4.600.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	52.303.076,00	52.303.076,00	100,00	121.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	548.275.000,00	545.755.000,00	99,54	39.520.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	448.300.000,00	433.900.000,00	96,79	449.390.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	17.347.182.740,00	17.221.612.740,00	99,28	17.826.784.200,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.399.509.486,00	4.067.509.162,00	75,33	14.537.196.049,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	35.900.000,00	33.955.000,00	94,58	48.055.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	560.375.000,00	552.830.000,00	98,65	149.615.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	81.750.000,00	81.750.000,00	100,00	1.654.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.580.520.000,00	1.579.720.000,00	99,95	1.976.640.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.254.960.000,00	1.232.820.000,00	98,24	598.800.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	790.400.000,00	789.550.000,00	99,89	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	399.400.000,00	399.400.000,00	100,00	520.700.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	419.340.000,00	419.340.000,00	100,00	1.166.900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.308.466.500,00	6.129.466.500,00	97,16	5.117.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	671.150.000,00	606.150.000,00	90,32	569.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.154.420.000,00	6.418.585.000,00	89,71	2.707.515.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.874.570.280,00	4.540.689.500,00	93,15	3.721.293.450,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.922.441.852,00	6.783.186.168,00	97,99	4.788.133.651,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.945.500.000,00	1.930.361.800,00	99,22	1.869.139.368,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	447.800.000,00	444.800.000,00	99,33	916.650.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	0,00	0,00	138.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.785.000,00	3.785.000,00	100,00	168.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveilance ISO	1.389.760.000,00	1.382.397.000,00	99,47	0,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	194.839.000,00	162.203.220,00	83,25	99.850.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.931.308,00	30.931.308,00	100,00	6.546.500,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.779.810.000,00	1.729.246.908,00	97,16	19.800.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00	128.850.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat	5.945.000,00	5.945.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.480.000,00	0,00	0,00	35.748.680,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	13.535.000,00	13.340.000,00	98,56	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.642.724.540,00	1.519.560.886,00	92,50	362.411.323,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	171.780.000,00	137.218.787,00	79,88	156.193.540,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	670.235.418,00	374.292.336,00	55,84	236.845.172,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.551.192.623,00	10.213.679.157,00	96,80	7.025.124.071,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.717.123.000,00	2.584.863.900,00	95,13	2.606.667.600,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.556.538.545,00	2.871.813.462,00	80,75	2.169.602.368,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	14.600.000,00	857.500,00	5,87	666.160,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	33.391.782,00	33.391.782,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	774.120.700,00	486.725.323,00	62,87	490.910.268,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.449.657.000,00	1.446.892.890,00	99,81	3.801.234.800,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.690.000,00	12.690.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.478.992.545,00	12.315.480.526,00	98,69	7.056.673.086,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	270.585.400,00	234.212.828,00	86,56	151.057.600,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	11.544.568.000,00	11.499.527.200,00	99,61	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	0,00	0,00	0,00	6.465.342.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	197.597.645,00	154.382.385,00	78,13	43.306.749,04
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	2.694.382,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.349.796,00	124.829.452,00	91,55	49.081.165,96
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	329.891.704,00	302.528.661,00	91,71	345.190.389,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	50.000.000,00	24.581.634,00	49,16	24.581.634,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00	24.581.634,00	49,16	24.581.634,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.988.979.820,00	1.927.240.320,00	96,90	1.068.408.464,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	581.158.220,00	569.908.220,00	98,06	278.170.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	72.092.600,00	71.292.600,00	98,89	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	18.400.000,00	18.400.000,00	100,00	4.750.000,00
5.1.02.02.04.0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	33.459.000,00	33.450.000,00	99,97	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.051.528.000,00	1.014.237.500,00	96,45	560.296.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	106.320.000,00	97.130.000,00	91,36	206.761.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	3.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.985.000,00	14.985.000,00	100,00	1.498.604,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0310	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0312	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	0,00	0,00	2.532.860,00
5.1.02.02.04.0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	320.000,00	320.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0318	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	12.730.000,00	12.730.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.035.000,00	15.035.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	19.922.000,00	19.922.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	10.780.000,00	10.780.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0508	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Udara	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	785.210.000,00	638.737.240,00	81,35	241.290.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	119.050.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	692.900.000,00	608.310.000,00	87,79	28.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	90.810.000,00	28.927.240,00	31,85	87.990.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	439.650.000,00	416.750.000,00	94,79	236.490.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	22.000.000,00	18.700.000,00	85,00	0,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	386.000.000,00	366.400.000,00	94,92	234.490.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	31.650.000,00	31.650.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	23.395.758.423,00	21.980.483.618,00	93,95	15.172.265.562,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	59.300.000,00	57.600.000,00	97,13	2.318.596.250,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	10.840.975.533,00	10.487.484.762,00	96,74	4.653.529.712,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	275.000.000,00	268.383.570,00	97,59	0,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan	1.000.000.000,00	988.577.500,00	98,86	0,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan	10.000.000,00	4.370.000,00	43,70	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	11.098.132.890,00	10.069.471.636,00	90,73	8.200.139.600,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	10.000.000,00	3.291.150,00	32,91	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000,00	99.715.000,00	99,72	0,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan	2.350.000,00	1.590.000,00	67,66	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	344.550.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	344.550.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	30.000.000,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	1.204.531.175,00	1.089.286.100,00	90,43	1.054.065.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	652.060.000,00	628.561.100,00	96,40	922.530.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	58.330.070,00	55.349.750,00	94,89	700.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	333.983.105,00	318.430.250,00	95,34	26.460.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	160.158.000,00	86.945.000,00	54,29	104.375.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	51.319.828.641,00	49.850.431.826,00	97,14	48.698.552.076,10
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	349.998.540,00	349.311.408,00	99,80	16.553.000,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	349.998.540,00	349.311.408,00	99,80	0,00
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.198.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.228.715.651,00	11.579.502.469,00	94,69	9.290.076.881,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	82.212.000,00	80.879.934,00	98,38	0,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	107.040.000,00	28.883.140,00	26,98	0,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	179.999.980,00	142.174.780,00	78,99	0,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	77.992.000,00	7.008.000,00	8,99	0,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	8.850.438.354,00	8.590.571.973,00	97,06	6.260.171.099,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	486.941.728,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	0,00	0,00	0,00	89.927.312,00
5.1.02.03.02.0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan	22.750.000,00	22.750.000,00	100,00	34.205.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	26.982.137,00	26.982.137,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat	82.879.100,00	82.879.100,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan	13.704.400,00	13.704.400,00	100,00	8.100.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	133.953.100,00	132.519.100,00	98,93	219.441.350,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-	83.731.000,00	83.731.000,00	100,00	2.294.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	837.108.210,00	805.874.305,00	96,27	734.654.916,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	591.112.000,00	557.809.800,00	94,37	397.140.000,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	0,00	0,00	0,00	5.795.320,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga	11.409.000,00	11.409.000,00	100,00	54.139.500,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	350.000,00	350.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-	45.083.500,00	44.925.400,00	99,65	6.160.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan	4.723.100,00	4.722.500,00	99,99	0,00
5.1.02.03.02.0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat	49.637.720,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	42.726.000,00
5.1.02.03.02.0312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah	1.611.000,00	1.611.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	900.000,00	900.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	622.924.950,00	551.956.100,00	88,61	245.034.325,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	45.395.000,00	41.395.000,00	91,19	0,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	13.570.000,00	13.570.000,00	100,00	2.421.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	102.234.600,00	97.014.600,00	94,89	106.825.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer	193.674.600,00	188.765.200,00	97,47	527.105.331,00
5.1.02.03.02.0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00
5.1.02.03.02.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga	8.714.900,00	8.531.000,00	97,89	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan	8.835.000,00	8.835.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.250.639.682,00	4.190.742.640,00	98,59	15.950.557.195,10
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	2.392.647.552,00	2.367.185.625,00	98,94	2.419.537.502,10
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	0,00	0,00	0,00	729.000.443,00
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	3.104.000,00	3.104.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	375.000,00	375.000,00	100,00	314.448.250,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat	600.000,00	600.000,00	100,00	34.833.500,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat	56.870.000,00	56.870.000,00	100,00	12.015.379.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	810.692.190,00	805.096.000,00	99,31	0,00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk	107.999.940,00	107.948.327,00	99,95	0,00
5.1.02.03.03.0026	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat	651.937.000,00	623.301.075,00	95,61	314.902.000,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	0,00	0,00	0,00	21.417.500,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	45.065.000,00	45.065.000,00	100,00	11.950.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat	0,00	0,00	0,00	48.580.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	30.889.000,00
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan	144.999.000,00	144.847.613,00	99,90	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.104.704.806,00	33.345.105.347,00	97,77	23.420.045.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	33.940.619.806,00	33.230.242.597,00	97,91	23.408.865.000,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air	3.085.000,00	3.085.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air	5.920.000,00	5.920.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit	155.080.000,00	105.857.750,00	68,26	0,00
5.1.02.03.04.0117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	385.769.962,00	385.769.962,00	100,00	21.320.000,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku	369.663.412,00	369.663.412,00	100,00	0,00
5.1.02.03.05.0021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.05.0022	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian- Alat Musik	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.05.0030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian- Alat Peraga Kesenian	8.306.550,00	8.306.550,00	100,00	0,00
5.1.02.03.05.0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan- Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00	20.970.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.201.053.054,00	70.695.772.900,66	95,28	49.601.175.629,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.101.053.054,00	70.695.772.900,66	95,40	48.861.724.109,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.706.296.618,00	46.525.067.200,66	97,52	29.417.378.249,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	20.050.000,00	13.200.000,00	65,84	337.413.147,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.906.757.728,00	19.972.059.135,00	91,17	15.508.156.681,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	872.044.000,00	771.988.400,00	88,53	1.545.126.900,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.595.904.708,00	3.413.458.165,00	94,93	2.053.649.132,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00	0,00	0,00	739.451.520,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa* ¹ Luar Negeri	100.000.000,00	0,00	0,00	739.451.520,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	2.353.710.220,00	2.144.433.650,00	91,11	2.523.363.700,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.060.190.220,00	878.051.150,00	82,82	1.225.633.700,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.018.190.220,00	836.051.150,00	82,11	848.875.200,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	33.397.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	1.243.361.500,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.293.520.000,00	1.266.382.500,00	97,90	397.730.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.057.520.000,00	1.030.382.500,00	97,43	390.730.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	236.000.000,00	236.000.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.927.192.612,00	32.597.168.115,41	81,64	23.673.585.200,04
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.927.192.612,00	32.597.168.115,41	81,64	23.673.585.200,04
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.927.192.612,00	32.597.168.115,41	81,64	23.673.585.200,04
5.1.04	Belanja Subsidi	1.070.513.315,00	1.055.683.730,00	98,61	1.070.513.315,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.070.513.315,00	1.055.683.730,00	98,61	1.070.513.315,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.070.513.315,00	1.055.683.730,00	98,61	1.070.513.315,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.070.513.315,00	1.055.683.730,00	98,61	1.070.513.315,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.076.823.896,00	12.890.663.278,00	75,49	41.924.077.319,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	790.000.000,00	780.000.000,00	98,73	100.000.000,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	790.000.000,00	780.000.000,00	98,73	100.000.000,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	790.000.000,00	780.000.000,00	98,73	100.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang	8.807.773.475,00	8.267.625.155,00	93,87	40.803.709.196,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	6.666.200.000,00	6.126.657.000,00	91,91	5.537.554.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	6.666.200.000,00	6.126.657.000,00	91,91	1.230.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	0,00	0,00	0,00	4.307.554.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat	1.225.573.475,00	1.224.968.155,00	99,95	5.975.150.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki	1.168.500.000,00	1.168.500.000,00	100,00	5.975.150.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki	57.073.475,00	56.468.155,00	98,94	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	916.000.000,00	916.000.000,00	100,00	29.291.005.196,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat	916.000.000,00	916.000.000,00	100,00	1.430.999.753,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat	0,00	0,00	0,00	27.860.005.443,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	6.158.682.298,00	2.522.670.000,00	40,96	0,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.635.952.298,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.635.952.298,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.522.730.000,00	2.522.670.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.522.730.000,00	2.522.670.000,00	100,00	0,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.368.123,00	1.020.368.123,00	100,00	1.020.368.123,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.368.123,00	1.020.368.123,00	100,00	1.020.368.123,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.368.123,00	1.020.368.123,00	100,00	1.020.368.123,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	839.764.850.401,00	774.282.457.062,07	92,20	740.017.958.805,14
5.2	BELANJA MODAL	431.859.093.974,00	387.530.343.306,00	89,74	222.212.719.378,11
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.163.451.195,00	71.223.599.340,00	74,84	31.186.838.055,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.052.902.400,00	3.926.770.800,00	64,87	18.695.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.855.172.000,00	3.731.766.000,00	63,73	0,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	3.198.942.000,00	2.710.566.000,00	84,73	0,00
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader	1.491.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	1.164.630.000,00	1.021.200.000,00	87,68	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	197.730.400,00	195.004.800,00	98,62	18.695.000,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	8.593.000,00	8.593.000,00	100,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	189.137.400,00	186.411.800,00	98,56	16.695.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.361.959.580,00	4.083.885.580,00	93,63	3.399.553.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.307.369.100,00	4.029.364.570,00	93,55	3.384.553.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.175.115.000,00	2.100.865.000,00	96,59	456.800.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	102.006.000,00	92.700.000,00	90,88	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	558.457.100,00	558.457.100,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	95.700.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.422.291.000,00	1.227.842.470,00	86,33	2.832.053.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6.695.480,00	6.626.010,00	98,96	0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	6.695.480,00	6.626.010,00	98,96	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	47.895.000,00	47.895.000,00	100,00	15.000.000,00
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	47.895.000,00	47.895.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	84.283.846,00	38.543.196,00	45,73	123.768.524,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.443.800,00	4.394.700,00	98,90	1.140.000,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	4.443.800,00	4.394.700,00	98,90	0,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	12.037.000,00	9.237.000,00	76,74	64.105.524,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.033.600,00	1.033.200,00	99,96	54.905.524,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	545.500,00	545.500,00	100,00	0,00
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	1.282.500,00	1.027.500,00	80,12	0,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	9.175.400,00	6.630.800,00	72,27	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	67.803.046,00	24.911.496,00	36,74	58.523.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	8.953.046,00	8.953.046,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.03.03.0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	15.000.000,00	7.863.450,00	52,42	7.684.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	43.850.000,00	8.095.000,00	18,46	825.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	224.821.550,00	183.440.230,00	81,59	56.549.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	224.821.550,00	183.440.230,00	81,59	56.549.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	176.403.200,00	157.039.140,00	89,02	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	27.959.230,00	7.011.090,00	25,08	47.849.000,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	19.179.120,00	18.750.000,00	97,76	0,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	1.280.000,00	640.000,00	50,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.796.807.009,00	14.180.476.408,00	95,83	5.844.342.140,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.612.338.590,00	1.530.120.559,00	94,90	1.083.093.727,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.228.860,00	1.102.000,00	89,68	600.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	125.166.120,00	124.548.420,00	99,51	221.824.574,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.485.943.610,00	1.404.470.139,00	94,52	845.669.153,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.171.154.329,00	12.637.087.849,00	95,95	4.548.685.913,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.425.206.775,00	10.979.355.009,00	96,10	2.446.560.799,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	7.654.480,00	7.616.000,00	99,50	2.700.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	73.562.823,00	65.093.020,00	88,49	61.559.990,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	564.827.370,00	555.746.952,00	98,39	412.292.250,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	42.887.046,00	42.686.686,00	99,53	5.972.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	904.015.835,00	873.203.682,00	96,59	1.601.608.874,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	153.000.000,00	113.386.500,00	74,11	17.992.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.314.090,00	13.268.000,00	99,65	212.562.500,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	76.275.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	29.941.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	13.314.090,00	13.268.000,00	99,65	19.378.000,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	73.268.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	583.003.126,00	579.789.066,00	99,45	351.520.220,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	573.308.966,00	570.249.066,00	99,47	191.615.890,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	73.887.716,00	73.887.716,00	100,00	27.686.090,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	318.879.050,00	317.342.090,00	99,52	92.429.800,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	51.275.000,00	49.999.900,00	97,51	37.500.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	31.386.000,00	31.386.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	89.881.200,00	89.633.360,00	99,72	26.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.244.160,00	6.090.000,00	97,53	250.000,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	6.244.160,00	6.090.000,00	97,53	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	159.654.330,00
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.03.0019	Belanja Modal Switcher Antena	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.03.0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena	0,00	0,00	0,00	159.654.330,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	30.666.330.299,00	26.681.261.224,00	87,01	11.999.422.660,20
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	26.962.704.743,00	24.121.314.224,00	89,46	11.994.222.660,20
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.497.019.598,00	8.553.661.877,00	81,49	9.293.894.381,20
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	1.794.384.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.783.430.046,00	4.654.784.000,00	97,31	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.295.661.390,00	3.065.696.409,00	93,02	144.251.963,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.288.713.991,00	1.249.265.494,00	96,94	49.981.227,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	10.760.635,00	0,00	0,00	10.935.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	4.982.701.250,00	4.637.586.664,00	93,07	256.842.576,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	37.772.510,00	36.925.260,00	97,76	0,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.066.645.323,00	1.923.394.520,00	93,07	0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	0,00	443.933.513,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.703.625.556,00	2.559.947.000,00	69,12	5.200.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.703.625.556,00	2.559.947.000,00	69,12	5.200.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.401.739.926,00	11.301.060.907,00	99,12	948.564.500,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.261.942.136,00	2.165.701.217,00	95,75	593.953.750,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.257.547.136,00	2.161.306.217,00	95,74	64.469.550,00
5.2.02.08.01.0042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	1.845.000,00	1.845.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	152.484.200,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	0,00	0,00	0,00	377.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	9.139.797.790,00	9.135.359.690,00	99,95	354.110.750,00
5.2.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	3.285.000,00	3.285.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	7.728.500,00	7.728.500,00	100,00	7.570.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	719.888.800,00	719.608.800,00	99,96	0,00
5.2.02.08.03.0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	3.177.900,00	3.177.900,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama	1.200.000,00	1.020.000,00	85,00	3.790.000,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	5.328.000,00	5.328.000,00	100,00	1.650.000,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	14.745.000,00	14.745.000,00	100,00	3.200.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	75.000.000,00	74.998.800,00	100,00	336.900.750,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	8.301.044.590,00	8.297.067.690,00	99,95	1.000.000,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	430.000,00
5.2.02.08.05.0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	430.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.389.566.215,00	6.210.924.360,00	97,20	8.396.345.410,80
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.071.496.284,00	3.947.424.971,00	96,95	3.864.466.019,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	216.204.800,00	216.030.000,00	99,92	50.700.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.840.728.204,00	2.769.240.821,00	97,48	2.764.612.019,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.014.563.280,00	962.154.150,00	94,83	1.049.154.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.318.069.931,00	2.263.499.389,00	97,65	4.531.879.391,80
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	182.920.200,00	175.718.550,00	96,06	71.016.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00	58.845.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	277.887.953,00	277.668.922,00	99,92	404.503.486,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	375.547.060,00	360.626.440,00	96,03	664.336.649,80
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.474.154.718,00	1.441.925.477,00	97,81	3.333.178.256,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	84.714.400,00	81.429.000,00	96,12	237.600,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	84.714.400,00	81.429.000,00	96,12	237.600,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	80.752.000,00	80.679.000,00	99,91	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	3.962.400,00	750.000,00	18,93	237.600,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	19.100.000,00	19.100.000,00	100,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	19.100.000,00	19.100.000,00	100,00	0,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	19.100.000,00	19.100.000,00	100,00	0,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	7.775.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	7.775.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	275.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	43.525.600,00	43.522.000,00	99,99	15.765.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	43.525.600,00	43.522.000,00	99,99	15.765.000,00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	7.475.000,00	7.475.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	24.300.600,00	24.297.000,00	99,99	15.765.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.454.697.244,00	3.893.396.569,00	19,03	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.454.697.244,00	3.893.396.569,00	19,03	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.454.697.244,00	3.893.396.569,00	19,03	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.125.781.089,00	84.642.985.302,00	98,28	57.478.356.391,03
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	79.533.929.389,00	78.067.366.319,00	98,16	53.443.265.218,03
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	79.533.929.389,00	78.067.366.319,00	98,16	53.443.265.218,03
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.797.507.920,00	3.739.246.701,00	98,47	4.455.675.697,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	130.800.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	35.234.378.354,00	34.464.954.871,00	97,82	34.854.467.521,03
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.365.976.152,00	6.330.714.712,00	99,45	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.621.065.944,00	25.147.272.685,00	98,15	13.672.922.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	127.699.000,00	127.479.730,00	99,83	0,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	4.499.450.000,00	4.410.615.822,00	98,03	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.554.900.080,00	2.553.312.000,00	99,94	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.277.951.939,00	1.238.894.548,00	96,94	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	55.000.000,00	54.875.250,00	99,77	400.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.591.851.700,00	6.575.618.983,00	99,75	4.035.091.173,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.591.851.700,00	6.575.618.983,00	99,75	4.035.091.173,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	234.500.000,00	234.200.000,00	99,87	0,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	100.000.000,00	99.915.583,00	99,92	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	6.257.351.700,00	6.241.503.400,00	99,75	4.035.091.173,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	245.703.928.906,00	226.851.955.350,00	92,33	127.881.482.652,08
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	216.508.284.897,00	198.974.295.679,00	91,90	106.203.006.768,30
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	204.864.952.647,00	187.422.811.738,00	91,49	101.042.789.768,30
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	185.127.542.527,00	167.927.017.374,00	90,71	90.186.851.314,50
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	19.737.410.120,00	19.495.794.364,00	98,78	10.855.938.453,80
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.643.332.250,00	11.551.483.941,00	99,21	5.160.217.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	3.332.930.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	11.643.332.250,00	11.551.483.941,00	99,21	1.827.287.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.555.103.300,00	13.972.182.440,00	96,00	8.082.590.089,28
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.962.484.900,00	7.764.600.983,00	97,51	3.726.764.841,11
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.962.484.900,00	7.764.600.983,00	97,51	3.726.764.841,11
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	1.055.800.000,00	700.987.742,00	66,39	1.559.617.373,17
5.2.04.02.03.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	1.055.800.000,00	700.987.742,00	66,39	1.559.617.373,17
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	165.000.000,00	164.888.028,00	99,93	529.467.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	165.000.000,00	164.888.028,00	99,93	529.467.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	19.394.000,00	19.394.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	19.394.000,00	19.394.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.352.424.400,00	5.322.311.687,00	99,44	2.266.740.875,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	5.352.424.400,00	5.322.311.687,00	99,44	2.266.740.875,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	191.669.310,00	189.914.000,00	99,08	410.829.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	385.379.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	385.379.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	189.669.310,00	187.914.000,00	99,07	21.850.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	189.669.310,00	187.914.000,00	99,07	21.850.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.448.871.399,00	13.715.563.231,00	94,92	13.185.056.794,50
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	11.154.330.000,00	10.436.440.436,00	93,56	7.324.940.054,50
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	11.154.330.000,00	10.436.440.436,00	93,56	7.324.940.054,50
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.271.749.079,00	3.256.330.475,00	99,53	5.839.272.781,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.271.749.079,00	3.256.330.475,00	99,53	5.839.272.781,00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	22.792.320,00	22.792.320,00	100,00	20.843.959,00
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	22.792.320,00	22.792.320,00	100,00	20.843.959,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.865.932.784,00	4.811.803.314,00	98,89	5.666.042.280,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.434.853.034,00	4.381.300.854,00	98,79	5.291.569.780,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.239.269.894,00	4.189.144.994,00	98,82	4.935.102.780,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	3.843.297.144,00	3.793.172.244,00	98,70	4.883.262.780,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	825.000,00	825.000,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	73.656.103,00	73.656.103,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	39.169.168,00	39.169.168,00	100,00	0,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	61.312.125,00	61.312.125,00	100,00	38.200.000,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	149.083.511,00	149.083.511,00	100,00	11.480.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	15.062.000,00	15.062.000,00	100,00	2.160.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	52.369.343,00	52.369.343,00	100,00	0,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	4.495.500,00	4.495.500,00	100,00	0,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	195.583.140,00	192.155.860,00	98,25	356.467.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	195.583.140,00	192.155.860,00	98,25	356.467.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	147.103.650,00	146.918.760,00	99,87	76.168.500,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	124.156.300,00	124.138.610,00	99,99	45.668.500,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	82.802.190,00	82.784.500,00	99,98	35.163.500,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	2.200.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	7.354.110,00	7.354.110,00	100,00	8.305.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	22.947.350,00	22.780.150,00	99,27	30.500.000,00
5.2.05.02.02.0001	Belanja Modal Pahatan	8.500.800,00	8.500.800,00	100,00	0,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	0,00
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	167.200,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	6.029.350,00	6.029.350,00	100,00	30.500.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	125.250.000,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0,00	0,00	0,00	125.250.000,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	0,00	0,00	0,00	125.250.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	283.976.100,00	283.583.700,00	99,86	133.054.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	283.976.100,00	283.583.700,00	99,86	133.054.000,00
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	13.948.100,00	13.948.100,00	100,00	0,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	270.028.000,00	269.635.600,00	99,85	133.054.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	431.859.093.974,00	387.530.343.306,00	89,74	222.212.719.378,11
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
5.4	BELANJA TRANSFER	175.921.751.128,00	175.838.080.838,00	99,95	180.806.720.902,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.433.173.074,00	2.349.545.084,00	96,56	2.202.349.122,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.042.373.074,00	1.973.354.429,00	96,62	1.763.753.307,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.042.373.074,00	1.973.354.429,00	96,62	1.763.753.307,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.042.373.074,00	1.973.354.429,00	96,62	1.763.753.307,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	390.800.000,00	376.190.655,00	96,26	438.595.815,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	390.800.000,00	376.190.655,00	96,26	438.595.815,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	390.800.000,00	376.190.655,00	96,26	438.595.815,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	173.488.578.054,00	173.488.535.754,00	100,00	178.604.371.780,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	173.488.578.054,00	173.488.535.754,00	100,00	178.604.371.780,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada	0,00	0,00	0,00	178.604.371.780,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada	0,00	0,00	0,00	178.604.371.780,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada	173.488.578.054,00	173.488.535.754,00	100,00	0,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada	173.488.578.054,00	173.488.535.754,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	175.921.751.128,00	175.838.080.838,00	99,95	180.806.720.902,00
	JUMLAH BELANJA	1.448.960.037.377,00	1.338.008.631.206,07	92,34	1.145.760.283.465,25
	SURPLUS/DEFISIT	(273.283.174.171,39)	(163.179.623.463,76)	59,71	21.435.413.063,05
6	PEMBIAYAAN DAERAH	273.283.174.171,61	276.157.744.368,61	101,05	120.416.340.538,56
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	291.851.753.601,61	286.795.444.369,61	98,27	124.916.340.538,56
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.851.753.601,61	141.851.753.601,61	100,00	124.916.340.538,56
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	6.215.492.342,16	0,00	0,00	0,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	6.215.492.342,16	0,00	0,00	0,00
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada	6.215.492.342,16	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	99.624.591.952,06	141.851.753.601,61	142,39	18.433.702.902,64
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	99.624.591.952,06	141.851.753.601,61	142,39	18.433.702.902,64
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	0,00	141.851.753.601,61	0,00	125.803.637,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	70.552.047.624,73	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0015	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	0,00	0,00	0,00	495.984.500,00
6.1.01.02.01.0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	0,00	0,00	0,00	234.875.200,00
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	1.426.257.548,00	0,00	0,00	12.050,00
6.1.01.02.01.0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	1.988.512.100,00	0,00	0,00	30.000,00
6.1.01.02.01.0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	20.380.000,00	0,00	0,00	195.508.080,00
6.1.01.02.01.0031	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.508.849.632,00	0,00	0,00	53.064.095,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
6.1.01.02.01.0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	800,00	0,00	0,00	11.652.400,00
6.1.01.02.01.0034	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	12.464.000,00
6.1.01.02.01.0039	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Balai Pelatihan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	9.375.000,00
6.1.01.02.01.0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	200,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0044	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	45.710.600,00
6.1.01.02.01.0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik	52.172.600,00	0,00	0,00	122.221.082,00
6.1.01.02.01.0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	0,00	0,00	0,00	4.645.980,00
6.1.01.02.01.0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
6.1.01.02.01.0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	12.854,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0059	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	0,00	0,00	0,00	23.259.000,00
6.1.01.02.01.0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	0,00	0,00	0,00	3.609.000,00
6.1.01.02.01.0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	52.696.673,53	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	3.753.069.561,00	0,00	0,00	2.928.530.880,00
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	68.750.000,00	0,00	0,00	14.750.000,00
6.1.01.02.01.0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	5.024.753.400,00	0,00	0,00	5.096.757.600,00
6.1.01.02.01.0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini	343.500.000,00	0,00	0,00	659.100.000,00
6.1.01.02.01.0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	125.750.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-	5.139.576.689,00	0,00	0,00	2.277.745.874,00
6.1.01.02.01.0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	193.788.600,00	0,00	0,00	3.877.500,00
6.1.01.02.01.0080	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	1.085.427.400,00	0,00	0,00	705.605.000,00
6.1.01.02.01.0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	92.626.921,00	0,00	0,00	132.135.265,00
6.1.01.02.01.0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	731.161.379,00	0,00	0,00	770.729.875,00
6.1.01.02.01.0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	117.557.475,00	0,00	0,00	41.788.831,64
6.1.01.02.01.0087	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	2.236.508.958,80	0,00	0,00	4.446.067.453,00
6.1.01.02.01.0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	111.071.536,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0104	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	1.375.931.744,00	0,00	0,00	82.996.747.062,88
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	(4.163.454,00)	0,00	0,00	19.294.623.000,22
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	0,00	19.294.623.000,22
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	(4.163.454,00)	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	9.952.367.701,79
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	8.561.393.893,50
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	409.356.532,29
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,00	0,00	0,00	836.336.534,00
6.1.01.05.02.0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	145.280.742,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	47.567.656.360,87
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	47.567.656.360,87
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	1.380.095.198,00	0,00	0,00	6.182.100.000,00
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke	1.380.095.198,00	0,00	0,00	6.182.100.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana	0,00	0,00	0,00	895.728,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	895.728,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	895.728,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	34.635.737.563,39	0,00	0,00	23.484.994.845,04
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	34.242.150.456,39	0,00	0,00	17.595.861.483,59
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	34.242.150.456,39	0,00	0,00	17.595.861.483,59
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	393.587.107,00	0,00	0,00	618.557.262,29
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	393.587.107,00	0,00	0,00	618.557.262,29
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	5.270.576.099,16
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	5.270.576.099,16
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00	144.943.690.768,00	96,63	0,00
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	150.000.000.000,00	144.943.690.768,00	96,63	0,00
6.1.04.01.06	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan	150.000.000.000,00	144.943.690.768,00	96,63	0,00
6.1.04.01.06.0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan	150.000.000.000,00	144.943.690.768,00	96,63	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	291.851.753.601,61	286.795.444.369,61	98,27	124.916.340.538,56
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.568.579.430,00	10.637.700.001,00	57,29	4.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00



Kode Rekening	U R A	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.068.579.430,00	5.137.700.001,00	39,31	0,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	13.068.579.430,00	5.137.700.001,00	39,31	0,00
6.2.03.01.06	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan	13.068.579.430,00	5.137.700.001,00	39,31	0,00
6.2.03.01.06.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan	13.068.579.430,00	5.137.700.001,00	39,31	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.568.579.430,00	10.637.700.001,00	57,29	4.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	273.283.174.171,61	276.157.744.368,61	101,05	120.416.340.538,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,22	112.978.120.904,85	0,00	141.851.753.601,61

Kab. Tebo, 06 Maret 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Nazar Efendi, SE, M.Si
NIP. 198005012002121002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tebo yang merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1. Permasalahan Pembangunan

- a) Masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Tebo terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan kecenderungan tingginya ketergantungan keuangan Kabupaten Tebo terhadap Pemerintah Pusat. Pada sisi lain, akan membatasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang sangat urgen bagi masyarakat.
- b) Masih rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, oleh karenanya, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi yang tepat dimana pada satu sisi terjadi peningkatan PAD dan pada sisi lain menghindari semakin meningkatnya pajak dan retribusi yang ditanggung oleh masyarakat.
- c) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tebo tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan serta masih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya dalam Provinsi Jambi.
- d) Belum berkembangnya sektor agroindustri dalam rangka peningkatan nilai tambah dari komoditas sektor pertanian. Kendala yang dihadapi antara lain pengembangan agro industri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran serta tata niaga bahan pokok yang belum terkendali dengan baik.
- e) Kinerja ekspor yang belum optimal antara lain disebabkan karena nilai tambah ekspor yang masih rendah, lemahnya sistem jaringan informasi pasar ekspor terutama dalam mendukung peningkatan daya saing ekspor.
- f) Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Kurang berkembangnya investasi di Kabupaten Tebo mengindikasikan kurangnya daya tarik investor untuk berinvestasi.
- g) Berbagai potensi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya belum digali dan dikembangkan secara optimal.



- h) Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum memadai.
 - i) Masih rendahnya pendapatan petani yang menunjukkan bahwa kemampuan daya beli petani masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Nilai Tukar Petani (NTP) masih dibawah angka 100.
 - j) Pengelolaan sumber daya perikanan khususnya perikanan budidaya belum optimal.
 - k) Produksi dan kelestarian perikanan di perairan umum menghadapi tantangan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan pencemaran air sungai akibat PETI.
 - l) Meskipun produksi padi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi masih perlu upaya untuk mencapai angka kecukupan beras masyarakat di Kabupaten Tebo yang saat ini masih berada pada angka -8%. Selain itu, perlu juga dicapai angka yang ideal untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Permasalahan kebutuhan dasar
- a) Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melanjutkan sekolah terutama ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya rata-rata lama sekolah serta adanya penurunan angka partisipasi sekolah.
 - b) Distribusi tenaga pendidik masih belum merata dan belum semua tenaga pendidik bersertifikasi.
 - c) Jumlah tenaga medis tertentu masih terbatas. Kualitas tenaga medis seperti bidan dan perawat masih perlu ditingkatkan, begitu juga kualitas sebagian sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu
 - d) Angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang cukup tinggi.
 - e) Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur serta rendahnya penerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah maupun budaya nasional yang unggul.
3. Permasalahan infrastruktur
- a) Kondisi jalan Kabupaten belum sepenuhnya dalam kondisi baik, sehingga perlu ditingkatkan.
 - b) Jaringan infrastruktur air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih terbatas, sehingga perlu untuk ditingkatkan.
 - c) Sarana prasarana jaringan irigasi belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pertanian tanaman pangan.

**b. Visi Dan Misi Kepala Daerah;**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagi Daerah Undang-undang ini menegaskan rencana pembangunan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RPJMD 2017 – 2022 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komperhensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya.

Dengan pertimbangan kondisi pembangunan di Kabupaten Tebo yang didukung oleh jajaran pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, kalangan akademis, para cerdik pandai, alim ulama dan LSM serta segenap kalangan masyarakat luas, Kabupaten Tebo akan melaksanakan pembangunan daerah dengan Visi :

**“TEBO TUNTAS 2022 (Tebu Tertib, Unggul,
Tenram, Adil dan Sejahtera Tahun 2022”**

Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pilar-pilar Visi yang diterjemahkan pengertiannya sebagai berikut :

- Mewujudkan pengelolaan Pemerintahan dan Masyarakat yang teratur;
- Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi;
- Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat;
 - Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai prioritas dan kebutuhan; dan
 - Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spritual secara wajar.

Visi Kabupaten Tebo tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2023 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang dituangkan dalam Peraturan



Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021 yaitu “JAMBI TUNTAS” (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil, dan Sejahtera). Keterkaitan Visi sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi Tebo yang Unggul dengan berdaya saing tinggi selaras dengan visi pembangunan nasional mandiri dan visi pembangunan Provinsi Jambi yang mandiri, dimana pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran;
2. Visi Adil selaras dengan visi Provinsi Jambi yaitu mencapai Jambi yang Adil yang berarti tercapainya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan; dan
3. Visi Kabupaten Tebo yang Tertib, Tenram dan Sejahtera selaras dengan visi nasional Berkepribadian dan visi Provinsi Jambi Sejahtera yang berarti terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tebo, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tebo 2017 – 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan program sesuai dengan urusan dan kewenangan serta misi pembangunan daerah. Penetapan program



pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama:** Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.

Program untuk mendukung misi ini berdasarkan urusan adalah:

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari

1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - b. Program Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan.
 - c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
 - f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - g. Program Pengaturan Jasa Konstruksi.
 - h. Program Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - i. Program Perencanaan Tata Ruang.
 - j. Program Pemanfaatan Ruang.
 - k. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - l. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Berbasis Kawasan.
 - m. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
 - n. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah.
 - o. Program Pengendalian Banjir.
 - p. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.
 - q. Program Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong.
 - r. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
 - s. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan SDA lainnya.
 - t. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
 - u. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
- 2) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- a. Program Pengembangan Perumahan.
 - b. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Berbasis Kawasan.
 - c. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.



- d. Program Pembangunan, Pemeliharaan Dan Perluasan Utilitas Umum.
 - e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - f. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong.
 - g. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- 3) Urusan Kesehatan**
- a. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
- b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari:
- 1) Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
 - b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - e. Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
 - 2) Urusan Perhubungan
 - a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
 - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
 - e. Program Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
2. **Misi Kedua:** Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya.
- Program untuk mendukung misi ini berdasarkan urusan adalah:
- a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - 1) Urusan Pendidikan
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
 - c. Program Pendidikan Menengah.



- d. Program Pendidikan Non Formal.
 - e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
 - g. Program Dukungan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - h. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
 - i. Program kesehatan sekolah.
- 2) Urusan Kesehatan
- a. Program Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
 - b. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - c. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - f. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - i. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
 - j. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - k. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - l. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
 - o. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - p. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - q. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBH CHT)
 - r. Program Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Pajak Rokok)
 - s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
 - t. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
 - u. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD.

b) Urusan Non Pelayanan Dasar terdiri dari:



- 1) Urusan Perpustakaan
 - a. Program Pengembangan Budaya Membaca dan Pembinaan Perpustakaan.
- 2) Urusan Kebudayaan
 - a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - e. Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan
 - f. Program Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Sosial di bidang Kehidupan Umat.
3. **Misi Ketiga:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Program untuk mendukung misi ini berdasarkan urusan adalah:

- a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - 1) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
 - a. Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - 1) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - 2) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - b. Program Kerjasama Penyebaran Informasi dengan Mass Media
 - c. Program Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi
 - d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - 3) Urusan Perindustrian
 - a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - 4) Urusan Penanaman Modal
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - c) Urusan Penunjang terdiri dari:
 - 1) Urusan Perencanaan



- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - e. Program Perencanaan Tata Ruang
 - f. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 2) Urusan Keuangan
- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 3) Urusan Kepegawaian
- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - b. Program Peningkatan Status Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai
 - c. Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Organisasi KORPRI
 - d. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pemerintah
- 4) Urusan Pendidikan dan Pelatihan
- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - b. Program Pendidikan Kedinasan
- 5) Urusan Kearsipan
- a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- 6) Urusan Penelitian dan Pengembangan
- a. Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
 - b. Program Kerjasama Pembangunan
 - c. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
- 7) Urusan Penunjang Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- a. Program pembinaan dan Kesejahteraan Olahraga
 - b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan PERDA
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah



- d. Program penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - h. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - j. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - k. Program Kerjasama Pembangunan
4. **Misi Keempat:** Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- Program untuk mendukung misi ini berdasarkan urusan adalah:
- a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - 1) Urusan Penanaman Modal
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
 - b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - 1) Urusan Pertanian
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 - b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - d. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
 - e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Karet
 - g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - i. Program perencanaan pembangunan pertanian daerah
 - j. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Sawit



- k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- 2) Urusan Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Peningkatan Budidaya Perikanan
 - b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 3) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
 - b. Program Peningkatan kapasitas iptek sistem Produksi
 - c. Program Pengembangan Industri kecil dan menengah
 - d. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
 - e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- 4) Urusan Perdagangan
 - a. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
 - b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - c. Program perlindungan konsumen dan pengamanan pedagang
 - d. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 5) Urusan Pariwisata
 - a. Program Pengembangan pemasaran Pariwisata
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Kemitraan Bidang Pariwisata
- 6) Urusan Tenaga Kerja
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program peningkatan kesempatan kerja
 - c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan
- 7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - b. Program Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
- 8) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa



- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 - c. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 9) Urusan Lingkungan Hidup
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

5. **Misi Kelima:** Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

Program untuk mendukung misi ini berdasarkan urusan adalah:

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari:

1) Urusan Sosial

- a. Program pelayanan dan rehabilitasi PMKS
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- c. Program Pembinaan Anak Terlantar
- d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- e. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- f. Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- i. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- j. Program Penanggulangan Kemiskinan

b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari:

1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Program Penguatan Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- 2) Urusan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - b. Program Penguatan Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat
 - c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Ibu dan Anak
- 3) Urusan Tenaga Kerja
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
- 4) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Program Keluarga Berencana
 - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - c. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB yang Mandiri
 - d. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - e. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Tumbuh Kembang Anak
 - f. Proram Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - g. Program Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - h. Program Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - i. Program Pendataan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
- 5) Urusan Pemuda dan Olahraga
 - a. Program Kebijakan dan manajemen olahraga
 - b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - c. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga
 - d. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan



- e. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- f. Program Pengembangan Ekstra Kurikuler
- g. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- 6) Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban
 - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - d. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - f. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Pembangunan Kabupaten Tebo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Tebo yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Pada tahun ini pembangunan Kabupaten Tebo mulai mengarahkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia disamping percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sesuai penjelasan diatas tema pembangunan Kabupaten Tebo tahun ini adalah **“PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN DAYA SAING DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”**

Dengan penjabaran prioritas/arah pembangunan sebagai berikut :

- 1). Peningkatan pemerataan aksesibilitas antara Ibu kota Kabupaten dengan Kecamatan dan Desa melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
- 2). Perluasan dan Peningkatan pemerataan akses, kualitas dan relevansi pendidikan dengan meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik



- 3). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penguatan sistem informasi
- 4). Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju layanan publik yang prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif)
- 6). Percepatan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah
- 7). Percepatan peningkatan kualitas prosedur pengurusan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal yang mudah, cepat serta meningkatkan pelayanan yang prima dan professional terhadap publik
8. Perluasan peran serta dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pelibatan tokoh agama, adat dan masyarakat.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan beberapa amanat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, adanya pergeseran makna SPM pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan regulasi sebelumnya. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normative dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Tebo menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsure terciptanya penyelenggaraan yang baik.

1.1.4 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah sesuatu yang strategis untuk dapat dicapai dan memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Fungsi tujuan dan sasaran adalah sebagai dasar dalam penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan atau rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan dan sekaligus menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan pengertian tujuan dan sasaran tersebut, perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD ini mengintegrasikan dan memperhatikan upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan 5 (lima) misi pemerintahan Kabupaten Tebo periode 2017 - 2022, serta komitmen-komitmen lainnya yang bersifat global (MDG's) dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan arahan kebijakan nasional. Dihadapkan dengan kendala sumber daya pembangunan yang dimiliki



terutama kemampuan fiskal daerah, maka tujuan dan sasaran yang direncanakan untuk dicapai dalam RPJMD ini telah disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah pembangunan yang mendesak, aspirasi masyarakat dan kemampuan nyata daerah.

1. Tujuan

Rumusan Tujuan menjabarkan visi dan misi yang telah ditetapkan secara teknokratis dan partisipatif untuk memudahkan mengoperasionalkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam system penyelenggaraan pemerintahan.

Bupati dan Wakil Bupati Tebo periode 2017 - 2022 telah memberikan visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Tebo untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu menuju Tebo TUNTAS 2022 (Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera Tahun 2022).

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tebo 5 (lima) tahun, Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 - 2022 menetapkan 11 tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tebo .yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar daerah
2. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
3. Mewujudkan kualitas kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk
4. Mewujudkan tatanan kehidupan beragama dan berbudaya di tengah masyarakat
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan
9. Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat
10. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
11. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di bidang olah raga

Untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Tebo menetapkan indicator tujuan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:



Tabel I.7
Indikator Tujuan Pembangunan

VISI: TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA 2022)			
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
MISI I: MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR LAYANAN UMUM			
Tujuan 1: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	na	0,02
MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN SERTA TATANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA			
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang beragama dan berbudaya	IPM (indeks Pembangunan Manusia)	69,02	69,55
MISI III: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)			
Tujuan 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B
MISI IV: MENDORONG TUMBUHNYA PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			
Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,78	5,00
	Tingkat kemiskinan	6,47	6,25
	Indeks Gini	0,31	0,28
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,99	1,5
Tujuan 5: Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	IKLH	71	67,5



VISI: TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA 2022)			
Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
MISI V: MENDORONG TERCIPTANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT			
Tujuan 6: Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Kebebasan Demokrasi	na	100%

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kualifikasi lebih lanjut dan lebih teknis, agar dapat dikelola pencapaiannya.

Berdasarkan pada perubahan RPJMD 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Tebo Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan Kabupaten Tebo dalam 5 (lima) Tahun, Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 - 2022 menetapkan 14 sasaran pembangunan berkurang dari sebelumnya yaitu 23 sasaran :

1. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan.
2. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan.
3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.
4. Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
5. Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Budaya serta Kerukunan Antar Umat Beragama.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik.
8. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
9. Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja.
10. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.
11. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.
12. Meningkatnya Pengelolaan Sektor Pariwisata.
13. Meningkatnya Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan.



14. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tebo ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tebo Nomor 175 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tebo. Adapun IKU Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.8
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tebo

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
MISI 1: MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR LAYANAN UMUM			
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan	Persentase jalan dalam kondisi mantap
			Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik
			Persentase infrastruktur pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan) dalam kondisi baik
			Persentase RT pengguna air bersih
			Persentase RT bersanitasi
MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN SERTA TATANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA			
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang beragama dan berbudaya	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)
			Angka harapan sekolah
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup
		Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Budaya serta Kerukunan Antar Umat Beragama	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya
			Indeks kerukunan antar umat beragama
MISI 3: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)			
3	Meningkatkan tata kelola	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP
			Opini BPK Terhadap Laporan



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
	pemerintahan yang baik dan bersih	dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
MISI 4: MENDORONG TUMBUHNYA PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
		Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	LPE sektor pertanian terhadap PDRB
			LPE sektor industri terhadap PDRB
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indek ketahanan pangan kabupaten
		Meningkatnya Pengelolaan Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata
		Meningkatnya Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Air
Indeks Kualitas Udara			
Indeks Tutupan Lahan			
MISI 5: MENDORONG TERCIPTANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT			
14	Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	Angka kriminalitas
			Angka partisipasi pemilih

4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;



2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel menurut 5 misi Pemerintah Kabupaten Tebo berikut:

Tabel I.9
Perjanjian Kinerja Bupati Tebo
Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH UTAMA/PJ
1	2	3	4	5
MISI 1: MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR LAYANAN UMUM				
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	52,50%	Dinas PU dan PR
		Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	60,00 %	Dinas PU dan PR - Dinas LH dan Perhubungan
		Persentase infrastruktur pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan) dalam kondisi baik	70,00%	Dinas PU dan PR
		Persentase RT pengguna air bersih	75,00%	Dinas PU dan PR
		Persentase RT bersanitasi	93,31%	Dinas PU dan PR
MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN SERTA TATANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA				
2	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,60 Tahun	DIKBUD - Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Angka harapan sekolah	12,42 Tahun	DIKBUD - Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka harapan hidup	70,17 Tahun	Dinas Kesehatan dan KB



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH UTAMA/PJ
1	2	3	4	5
	Masyarakat			
4	Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,50	Dinas Sosial P2PA
5	Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Budaya serta Kerukunan Antar Umat Beragama	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya	6	DIKBUD-Dinas Sosial P2PA
		Indeks kerukunan antar umat beragama	72	Kantor Kesbangpol-Pol-PP
MISI 3: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)				
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	B	Bappeda Litbang-Inspektorat dan Sekretariat Daerah
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	Inspektorat-Bakeuda
7	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,07	DPMPTSP-Disdukcapil-RSUD STS
MISI 4: MENDORONG TUMBUHNYA PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP				
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp1.100.000	Disperindagnaker
9	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,51%	Disperindagnaker
10	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	LPE sektor pertanian terhadap PDRB	5,17%	DTPHKP-Disbunnakan
		LPE sektor industri terhadap PDRB	4,75%	Disperindagnaker
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indek ketahanan pangan kabupaten	82,75	DTPHKP-Disbunnakan
12	Meningkatnya	LPE Sektor Pariwisata	1,64%	Disporapar



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH UTAMA/PJ
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Sektor Priwisata			
13	Meningkatnya Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	60,20	Dinas LH dan Perhubungan
		Indeks Kualitas Udara	92,43	Dinas LH dan Perhubungan
		Indeks Tutupan Lahan	55,70	Dinas LH dan Perhubungan
MISI 5: MENDORONG TERCIPTANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT				
14	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	Angka kriminalitas	82	Kesbangpol-Satpol PP
		Angka partisipasi pemilih	83	Kesbangpol

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel II.1 Capaian kinerja makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,35	69,78	0,62
2	Angka Kemiskinan	6,68	6,34	-5.09
3	Angka Pengangguran	2,95	-	-
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,32	-	-
5	Pendapatan Per kapita	49,76	-	-
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,3	0,3	0

Sumber : BPS Kabupaten Tebo

Keterangan:

*) : - Data belum tersedia

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tebo melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel II.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Pendidikan					
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	274	Dikbud	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	500	Dikbud	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	-	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada PAUD	685	Dikbud	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	235	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	131	Dikbud	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	316	Dikbud	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	420	Dikbud	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	150	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	35.160	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	9.944	Dikbud	



		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.4485	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	948	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1108	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	516	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	237	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	166	Dikbud	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	35	Dikbud	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	40	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	649	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	368	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	137	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	58	Dikbud	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	129	Dikbud	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	179	Dikbud	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	316	Dikbud	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	420	Dikbud	



		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	150	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	35.16	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9.944	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.485	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	948	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.108	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	516	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	237	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	166	Dikbud	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	35	Dikbud	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	40	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	649	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	368	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	137	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	58	Dikbud	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang	129		



		sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	179		
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	7	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar	-		
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya	3.022	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	7	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	203	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma	146	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	137		
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	Dikbud	
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Kesehatan					
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	Dinkes	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	544	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	=		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai	544	Dinkes	



		standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	544	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	544		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	20	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Posbindu Kit Tensi Meter Timbangan	55 20 20	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	946	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tensi Meter Timbangan	20 20	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	288	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	288	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	288	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	288	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Media KIE Reagen Zn TB Masker Bedah Masker N95 Pot Dahak Kaca Slide Catridge TCM Formulir	232 45 46 100 11460 38 700 2148	



			Pencatatan		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Test Cepat HIV RDT Vacutainer Blood Lancet Alkohol Swab	11245 11300 15000 10000	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	-	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40	Dinkes	
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Pekerjaan Umum					
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	5146.24	PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	481	PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	TIDK ADA	PUPR	Suket
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	TIDK ADA	PUPR	Suket
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	TIDK ADA	PUPR	Suket
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	TIDK ADA	PUPR	Suket
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	TIDK ADA	PUPR	Suket
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Kab. Tebo tidak Memiliki Kawasan Pesisir		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang			



		rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota			
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota			
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota			
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	-	PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	-	PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-	PUPR	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	-	PUPR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	-	PUPR	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	-	PUPR	SK
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-	PUPR	Suket
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	-	PUPR	Suket
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	-		
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	-		Suket
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	-	LH	



		menggunakan SPALD S dan SPALD T			
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-	LH	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-	LH	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-	LH	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		LH	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		LH	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		LH	Suket
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		LH	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		LH	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		LH	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		LH	Suket
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		LH	Suket
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		PUPR/D PMPTS PKOPU KM	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	19	PUPR/D PMPTS PKOPU KM	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	PUPR/D PMPTS PKOPU KM	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ADA	PUPR/D PMPTS PKOPU KM	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	PUPR/D PMPTS PKOPU KM	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-	PUPR/D PMPTS PKOPU	



				KM	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2465	PUPR/D PMPTS PKOPU KM	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		PUPR/D PMPTS PKOPU KM	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	-	PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	-	PUPR	
		Panjang jembatan yg dibangun	-	PUPR	Suket
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	-	PUPR	Suket
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	-	PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	-	PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	-	PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	-	PUPR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	-	PUPR	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	505	PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	505	PUPR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	-	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber	-	PUPR	



		dari APBN			
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-	PUPR	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	-	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	-	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	-	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang	-	PUPR	



		menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-	PUPR	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	PUPR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	PUPR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	PUPR	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	628	PUPR	
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	TIDAK ADA	SUKET	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	TIDAK ADA		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	TIDAK ADA		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	TIDAK ADA		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	TIDAK ADA		



		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	TIDAK ADA			
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	TIDAK ADA			
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	TIDAK ADA			
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	TIDAK ADA			
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	TIDAK ADA	SUKET		
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	TIDAK ADA			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	TIDAK ADA			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	TIDAK ADA			
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	TIDAK ADA			
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	TIDAK ADA			
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	-		PERKIM	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	-		PERKIM	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0.44	PERKIM		
		Jumlah rumah di kab/kota	84613	PERKIM		
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	3.397	PERKIM		
		Jumlah rumah tidak layak huni	5.957	PERKIM		
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	PERKIM		



		Rasio rumah dan KK	97.65 %	PERKIM	
		Jumlah rumah pembangunan baru	-	PERKIM	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	45016	PERKIM	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	98147	PERKIM	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	TIDAK ADA	PERKIM	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	98147	PERKIM	Suket
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	TIDAK ADA	PERKIM	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	TIDAK ADA	PERKIM	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	TIDAK ADA	PERKIM	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	TIDAK ADA	PERKIM	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	TIDAK ADA	PERKIM	
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Trantibum					
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	81	Pol PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	108	Pol PP	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	29	Pol PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 orang	Pol PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	-	Pol PP	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	TIDAK ADA	Pol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	181598		SUKET
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai			SUKET



		dinyatakan sah/legal			
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		BPBD	SUKET
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	40		SUKET
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	40		SUKET
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			SUKET
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan			SUKET
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	-		SUKET
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	2		SUKET
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	31		SUKET
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	3		SUKET
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	26 Kejadian	Damkar	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	6	Damkar	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	131	Damkar	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	TIDAK ADA	Damkar	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8 Armada	Damkar	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	118	Damkar	



		Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	219	Damkar	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	1		
Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial					
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1		SUKET
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	16319		
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	16319		
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	16319	Sosial P2PA	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	109	Sosial P2PA	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		Sosial P2PA	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia			SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang		Sosial P2PA	SUKET



		memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	14	Sosial P2PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	16319		
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	16319		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar			SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	1	Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	25		
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	161	Sosial P2PA	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0		
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			SUKET
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Sosial P2PA	SUKET



		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	55 Orang	Sosial P2PA	
Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja					
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota		Perinda g Naker	SUKET
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja			SUKET
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		Perinda g Naker	SUKET
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster			SUKET
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi			SUKET
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan			SUKET
		Persentase LPK yang terakreditasi		Perinda g Naker	SUKET
		Persentase LPK yang memiliki perizinan		Perinda g Naker	SUKET
		Jumlah penganggur yang dilatih	90		SUKET
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan		Perinda g Naker	SUKET
		Persentase penyerapan lulusan			SUKET
		Lulusan bersertifikat kompetensi		Perinda g Naker	SUKET
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	12		SUKET
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			SUKET
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas			SUKET
		Data tingkat produktivitas total			SUKET
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	22,97 %	Perinda g Naker	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	14,29	Perinda g Naker	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar	-	Perinda g Naker	



	perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	16,67	Perinda g Naker	
	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	50,55	Perinda g Naker	
	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	10	Perinda g Naker	
	Jumlah mogok kerja	2700		
	Jumlah penutupan perusahaan	TIDAK ADA		
	Jumlah perselisihan kepentingan	3	Perinda g Naker	
	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		
	Jumlah perselisihan PHK	0	Perinda g Naker	
	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	Perinda g Naker	
	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	Perinda g Naker	
	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0		
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Perinda g Naker	
	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0		
	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	5711	Perinda g Naker	
	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	11	Perinda g Naker	
	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	TIDAK ADA		
	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0		
	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	TIDAK ADA		
	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0	Perinda g Naker	
	Jumlah penempatan			



		tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Perinda g Naker	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata			
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan			
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya			
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	25 OPD & 12 Kecamatan	Sosial P2PA/B akeuda	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	25 OPD & 12 Kecamatan	Sosial P2PA/B akeuda	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	TIDAK ADA		
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 LKSA		
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	29	Sosial P2PA/D ukcapil	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Sosial P2PA/D ukcapil	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0		



		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	12	Sosial P2PA/D ukcapil	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0		
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	Sosial P2PA/D ukcapil	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0		
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1		
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	1	Sosial P2PA/D ukcapil	
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	-	DHTP	Perbup Tebo No.17 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Tebo Tahun 2021
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	-	DHTP	Tidak ada kondisi rawan pangan (bencana) yang memerlukan penyaluran beras Cadangan Pangan Daerah (CPD)
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	-	DHTP	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	-	DHTP	Sosialisasi Menu B2SA Tahun 2021
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	-	DHTP	FSVA Tahun 2021
		Tertanganinya kerawanan	-	DHTP	Tidak ada



		pangan			kondisi rawan pangan (bencana) yang memerlukan penanganan kerawanan pangan (penyaluran beras Cadangan Pangan Daerah /CPD)
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	TIDAK ADA	DHTP	Tidak ada kondisi rawan pangan (bencana) yang memerlukan penyaluran beras Cadangan Pangan Daerah (CPD)
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	-	DHTP	Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
10	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	22	BPN	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek			
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee			
		Dokumen Izin membuka tanah			
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota			
11	Lingkungan hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	93.42	DLH HUB	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	22.71	DLH HUB	Tersedianya informasi terkait rasio



					angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	DLH HUB	SUKET
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	3.09	DLH HUB	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0	DLH HUB	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	DLH HUB	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	TIDAK ADA	DLH HUB	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100 %	DLH HUB	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	1023	Dukcapil	
		Penerbitan akta perceraian	10	Dukcapil	



		Penerbitan akta kematian	5136	Dukcapil	
		Penyajian data kependudukan	1	Dukcapil	SUKET
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	77	PMD	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	77	PMD	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	226	PMD	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	24	PMD	
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	77	PMD	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	77	PMD	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	226	PMD	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	24	PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	TIDAK ADA	DINKES -KB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	-		
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	DINKES -KB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi	79,72	DINKES -KB	



		dan KIE)			
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	356	DINKES -KB	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	-	DINKES -KB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	68,79	DINKES -KB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	-	DINKES -KB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	-	DINKES -KB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	-		
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	-		
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	85,71 %	DLH HUB	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	24,57 %	DLH HUB	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	-	DLH HUB	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	-	DLH HUB	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	17	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	17	Kominfo	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	-	Kominfo	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah	85	Kominfo	



		dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015			
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	21`	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	17	Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	-		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	1	Kominfo	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	17	Kominfo	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	17	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	4	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	4	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	-		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	3		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	1	Kominfo	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	1	Kominfo	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan	4	Kominfo	



		kepala daerah terkait implementasi e-government			
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	73	Kominfo /Dukcap il	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	37	Kominfo /Dukcap il	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	450	Kominfo /Dukcap il	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1429		
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-		
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9,309	DPMPPT SPKOP UKM	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25	DPMPPTS PKOPUK M	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,915	DPMPPTS PKOPUK M	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,214	DPMPPTS PKOPUK M	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %	DPMPPTS PKOPUK M	



		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,979	DPMPT SPKOP UKM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %		
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %	DPMPTS PKOPUK M	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,436	DPMPTS PKOPUK M	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,17	DPMPTS PKOPUK M	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	29,32	DPMPTS PKOPUK M	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	-		
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	-		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,992		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,597		
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,302		
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan	1,195		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	77,25 %	Dikbud/Dukcapil	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,35 %	Dikbud/Dukcapil	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	86,87 %	Dikbud/Dukcapil	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,30 %	Dikbud/Dukcapil	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,04 %	Dinkes	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	Dinkes	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	91,06 %	Dinkes	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	87,77 %	Dinkes	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,18 %	Dinkes	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	86,45 %	Dinkes	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68,36 %	Dinkes	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,03 %	Dinkes	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,87 %	Dinkes	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79,19 %	Dinkes	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	124,50 %	Dinkes	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	97,372 %	Dinkes	



		sesuai standar			
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	87,22 %	Dinkes	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	57,076 %	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	1,516 %	PERKIM/PU PR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	65,245%	PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	65,339%	PUPR	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,813%	LH	
		Persentase Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100	PUPR/DPMPT SPKOPUKM	
		Persentase tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	81,853%	PUPR	
		Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	15,951%	PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,48%	PUPR/DPMPT SPKOPUKM	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten		Suket	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten		Suket	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di	3,697	PERKIM	



		kabupaten yang ditangani			
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,803	PERKIM	
		Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	53,202	PERKIM	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95,294	Pol PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	Bagian Hukum	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	84.001		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	44.053		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	15		
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	78.788		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	78,79		
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	1,685	Sosial P2PA	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	91,733	Sosial P2PA	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Perindag Naker	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,602		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	39,262	BPS/Perindag Naker	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100	Perindag Naker	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam	3,922		



		dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	28,107	Sosial P2PA/Bakeuda	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	27,492	Sosial P2PA/Bakeuda	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	836,365		
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	110,51	DHTP	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %		
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.			
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		BPN	Suket
		Tersedianya tanah untuk masyarakat			
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		BPN	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	74,63	DLH HUB	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	22,708	DLH HUB	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	30	DLH HUB	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase mengukur tingkat Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten	99,015	Dukcapil	
		Persentase anak dengan usia 0-17 tahun yang sudah memiliki KIA	35,168	Dukcapil	



		Persentase memiliki Akta Kelahiran	96,785	Dukcapil	
		Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	37,838	Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	=	PMD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	23,636	PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,34 %	DINKES-KB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,788	DINKES-KB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,411		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten	66,306		
		Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota			
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	45,946	Kominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	Kominfo	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten	0,095	Kominfo/Dukcapil	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	71,429	DPMPTSPKO PUKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	45,872	DPMPTSPKO PUKM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	95,104	DPMPTSPKO PUKM	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,569	DISPORAPAR /DUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,448	DISPORAPAR	
		Peningkatan prestasi	1 medali	DISPORAPAR	



		olahraga			
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Bappelitbangda	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Bappelitbangda	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	71	Kominfo	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100		
23	Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	62,58	DPK	
		Indeks membangun literaly masyarakat	62,58		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	2	DPK	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	2	DPK	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten		Bunakan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0 %	Disporapar	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	59,175	Disporapar	
		Tingkat hunian akomodasi	56,303	Disporapar	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	125,463	Disporapar	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	0,372	Disporapar	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4607,505	DHTP	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	54,958		
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			
		Pemulihan ekosistem pada Tahura			
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			



29	Energi Sumber DayaMineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota			
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	12,756	Perindag Naker	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	0,093	Perindag Naker	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	-	Perindag Naker	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	Perindag Naker	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	SUKET		
31	Perindustrian	Mengukur tingkat pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	16,393	Perindag Naker	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1	Perindag Naker	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Perindag Naker	Suket
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Perindag Naker	Suket
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten		Perindag Naker	Suket
		Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini		Perindag Naker	Suket
32	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Bag. Ekonomi PSDA	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Table II.4 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	10,302 %	Bakeuda/BPS	
		Rasio PAD	7,235 %	Bakeuda/BPS	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0,45	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,13	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	77,071	Bakeuda	
		Melihat Opini Laporan Keuangan	1	Inspektorat/ Bakeuda	
2	Pengadaan	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama			
		Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif			
		Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		Bag. PBJ	
3	Kepegawaian	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	318,508%	BKPSDM	
		Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	18,482 %	BKPSDM	
		Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	38,929 %	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	13,7082 %	BAKEUDA	
		Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari	3,864 %	BAKEUDA	



		perencanaan awal			
		Assets Management	1	BAKEUDA	
		Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	9,287 %	BAKEUDA	
5	Transparansi dan Partisipasi publik	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	BAKEUDA	
		Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	BAKEUDA	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 disusun dalam bentuk laporan yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan penyampaian hasil dari Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan akhir dari masa jabatan Bupati Tebo Bapak Dr. H. Sukandar, S.Kom., M.Si bersama Bapak Syahlan, SH selaku bupati dan wakil bupati periode 2017-2022 yang berakhir pada 22 Mei 2022. Selanjutnya pemerintahan kabupaten Tebo dilaksanakan oleh Pj Bupati yaitu Bapak H. Aspan, ST yang dilantik oleh gubernur Jambi pada 23 Mei 2022. Pj Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan menggunakan RPJMD Perubahan 2017-2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan selanjutnya menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati hasil dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Akuntabilitas kinerja tahun 2022 menyajikan perihal capaian kinerja atas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan baik keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan rencana pembangunan selama 5 (lima) Tahun Pemerintahan Suka-Syahlan dimana Capaian kinerja yang diukur adalah kinerja tujuan melalui indikator tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan pada perubahan RPJMD yang ditetapkan pada akhir tahun 2020 indikator kinerja utama ditetapkan sebanyak 6 tujuan, 9 indikator tujuan, 14 sasaran dan 25 Indikator kinerja sasaran. Pada misi 1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum ditetapkan 1 sasaran dan 5 indikator sasaran; misi 2: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanam hidup bergama dan berbudaya ditetapkan 4 sasaran 6 indikator sasaran; misi 3: Mewujudkan tata kelola



pemerintahan yang baik (good governance) ditetapkan 2 sasaran dan 3 indikator sasaran; misi 4: Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ditetapkan 6 sasaran dan 9 indikator sasaran; dan misi 5: Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat ditetapkan 1 sasaran dan 2 indikator sasaran.

2.3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja merupakan upaya untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan sebagai bentuk Akuntabilitas dan wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Perjanjian Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo.

Secara umum rumus yang digunakan untuk menghitung presentase pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian IK} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel II.5
Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90-100	Sangat Memuaskan (SM)
2	>80-90	Memuaskan (M)
3	>70-80	Sangat Baik (SB)
4	>60-70	Baik (B)
5	>50-60	Cukup (C)
6	>30-50	Kurang (K)
7	0-30	Sangat Kurang (SK)

Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah melaksanakan banyak program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017–2022. Dalam RPJMD perubahan terdapat 5 (lima) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 14 (empat belas) sasaran dengan 25 (dua puluh lima) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi IV terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 9 indikator kinerja dan Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017–2022, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja;
2. Misi II terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja;
3. Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja;
4. Misi IV terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 9 indikator kinerja;
5. Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2022 berdasarkan capaian indikator kinerja tujuan dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel II.6
Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian Target	Kategori	Sumber Data
Misi 1: Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Layanan Umum							
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	0,02	*)	na	-	-
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Serta Tatanan Kehidupan Beragama Dan Berbudaya							
2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat beragama dan berbudaya	IPM (indeks Pembangunan Manusia)	69,55	69,78	100,35	Sangat Memuaskan	BPS
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)							
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	B	*)	-	-	-
Misi 4: Mendorong Tumbuhnya Perekonomian Daerah Dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis Dan Agroindustri Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup							
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	6,30	126	Sangat Memuaskan	BPS
		Tingkat kemiskinan	6,25	6,34	101,44	Sangat Memuaskan	BPS
		Indeks Gini	0,28	0,30	93,33	Sangat Memuaskan	BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,5	1,38	108,69	Sangat Memuaskan	BPS
5	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	IKLH	67,5	74,63	110,56	Sangat Memuaskan	Dinas LH-Hub
Misi 5: Mendorong Terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Kehidupan							



Bermasyarakat							
6	Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah	Indeks Kebebasan Demokrasi	100%	*)	-	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa 6 (enam) dari 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki capaian yang sangat memuaskan, sedangkan 3 Indikator tujuan yaitu : Indeks Pembangunan Infrastruktur, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kebebasan Demokrasi belum dapat diketahui capaiannya karena data dimaksud belum tersedia.

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2022 berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang berdasarkan target pada perjanjian kinerja Bupati Tebo pada Januari Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)	Kategori	Sumber Data
Misi 1: Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Layanan Umum							
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	52,50%	81,85 %	155,90	Sangat Memuaskan	Dinas PUPR
		Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	60,00%	50,00%	83,33	Memuaskan	Dinas LH Perhubungan
		Persentase infrastruktur pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan) dalam kondisi baik	70,00%	80,25	114,64	Sangat Memuaskan	Dinkes KB dan Dikbud
		Persentase RT pengguna air bersih	75,00%	65,34	87,12	Memuaskan	Dinas PUPR
		Persentase RT bersanitasi	93,31%	87,81	94,10	Sangat Memuaskan	Dinas PUPR
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Serta Tatahan Kehidupan Beragama Dan Berbudaya							
2	Meningkatnya	Rata-rata lama	7,60	7,70	101,13	Sangat	BPS



	Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	sekolah (tahun)				Memuaskan	
		Angka harapan sekolah (tahun)	12,42	12,65	101,85	Sangat Memuaskan	BPS
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	70,17 Tahun	70,26	100,12	Sangat Memuaskan	BPS
4	Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,50	90,92	99,36	Sangat Memuaskan	-
5	Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Budaya serta Kerukunan Antar Umat Beragama	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya	6	7	116,66	Sangat Memuaskan	Dikbud
		Indeks kerukunan antar umat beragama	72	*)	na	-	-
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)							
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	B	*)	na	-	-
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	*)	na	-	-
7	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,07	83,71	111,50	Sangat Memuaskan	DPMPPT SP, Dukcapil dan RSUD STS
Misi 4: Mendorong Tumbuhnya Perekonomian Daerah Dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis Dan Agroindustri Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup							
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Rupiah)	1.100.000	1.065.590,43	96,87	Sangat Memuaskan	BPS
9	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,51%	69,02	96,51	Sangat Memuaskan	BPS
10	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	LPE sektor pertanian terhadap PDRB	5,17%	2,58%	49,90	Kurang	BPS



	Sektor Unggulan	LPE sektor industri terhadap PDRB	4,75%	2,05%	43,15	Kurang	BPS
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indek ketahanan pangan kabupaten	82,75	70,52	85,22	Memuaskan	Badan Pangan Nasional
12	Meningkatnya Pengelolaan Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata	2,29%	7,50	327,51	Sangat Memuaskan	BPS
13	Meningkatnya Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	60,30	70,00	116,08	Sangat Memuaskan	Dinas LH Hub
		Indeks Kualitas Udara	92,53	93,42	100,96	Sangat Memuaskan	Dinas LH Hub
		Indeks Tutupan Lahan	57,40	47,58	82,89	Memuaskan	Dinas LH Hub
Misi 5: Mendorong Terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat							
14	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	Angka kriminalitas	80	71,66	111,63	Sangat Memuaskan	Polres Tebo
		Angka partisipasi pemilih	83	85	102,40	Sangat Memuaskan	KPU Kab. Tebo

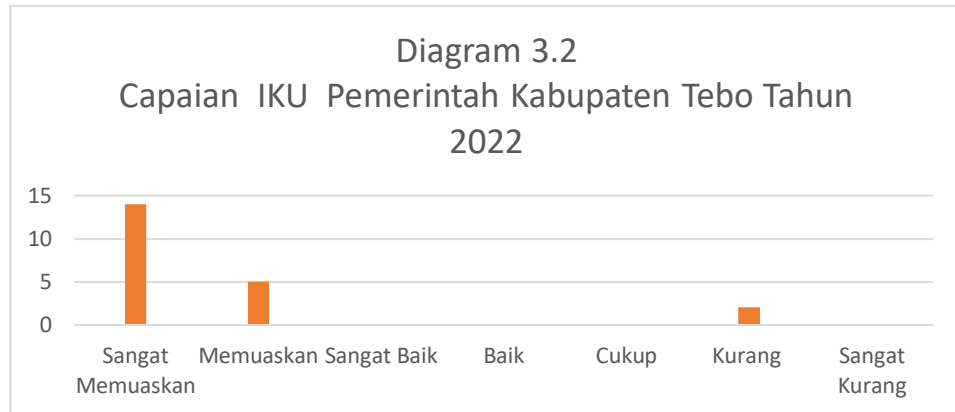
diatas dapatdilihat capaian kinerja dari masing-masing pencapaian Indikator kinerja terhadap 14 sasaran dan 25 indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel II.13 berikut:

Tabel II.8
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Predikat	Rata-Rata Capaian Menurut Predikat	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Seluruh Indikator
1	Sangat Memuaskan	112,63	15	99,99
2	Memuaskan	83,96	4	
3	Sangat Baik			
4	Baik			Sangat Memuaskan
5	Cukup			
6	Kurang	46,52	2	

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran diatas dapat menunjukan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun adalah 2022 dapat dikatakan sangat memuaskan, meskipun ada dua indikator

kinerja dengan capaian kurang. Adapun rincian dari pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada diagram berikut:



Berdasarkan pengukuran kinerja antara target dan realisasi pada diagram diatas dapat disampaikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2022 rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 99,99% kategori sangat memuaskan.

2.3.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Tabel II.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Tebo Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Percepatan/ Perlambatan
Misi 1: Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Layanan Umum						
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	81,85	81,85	0
		Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	%	40	50	10
		Persentase infrastruktur pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan) dalam kondisi baik	%	74,90	80,25	10,85
		Persentase RT pengguna air bersih	%	61,63	65,34	3,71
		Persentase RT	%	86,71	87,81	1,10



		bersanitasi				
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Serta Tataan Kehidupan Beragama Dan Berbudaya						
2	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Tahun	7,59	7,70	0,11
		Angka harapan sekolah	Tahun	12,64	12,64	0
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	70,02	70,26	0,24
4	Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,40	90,92	0,52
5	Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Budaya serta Kerukunan Antar Umat Beragama	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya	Jumlah	6	7	1
		Indeks kerukunan antar umat beragama	Poin	*)	*)	-
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B	*)	na
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	*)	na
7	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,9	83,71	-2,19
Misi 4: Mendorong Tumbuhnya Perekonomian Daerah Dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis Dan Agroindustri Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup						
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	1.011.361,59	1.065.590,43	54.228,71
9	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,57	69,02	-1,55



10	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	LPE sektor pertanian terhadap PDRB	%	3,73	2,58	-1,15
		LPE sektor industri terhadap PDRB	%	3,96	2,05	-1,85
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indek ketahanan pangan kabupaten	Poin	72,73	70,52	-2,21
12	Meningkatnya Pengelolaan Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata	%	5,42	7,50	2,08
13	Meningkatnya Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	Poin	67,78	70,00	2,22
		Indeks Kualitas Udara	Poin	92,03	93,42	1,39
		Indeks Tutupan Lahan	Poin	47,83	47,58	-0,25
MISI 5: MENDORONG TERCIPTANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT						
14	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	Angka kriminalitas	Poin	65,71	73,24	-7,53
		Angka partisipasi pemilih	%	85	85	0

an capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 terhadap 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa terjadi Percepatan pencapaian kinerja. Hasil ini berdasarkan pengukuran kinerja, yang menunjukkan 10 (sepuluh) indikator menunjukkan percepatan, 7 (tujuh) indikator kinerja mengalami perlambatan, 3 (tiga) indikator tidak mengalami perubahan dan 4 (empat) indikator datanya tidak tersedia (n/a) pada tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.

2.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dan Capaian Terhadap RPJMD Akhir Tahun 2022

Tabel II.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Capaian RPJMD Akhir Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Rpjmd 2022	Capaian 2022 Terhadap Akhir Th
1	2	3	4	5	6	7
MISI 1: MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR LAYANAN UMUM						
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	81,85	52,50	155,90
		Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	%	50	60	83,33
		Persentase infrastruktur pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan) dalam kondisi baik	%	80,25	70	114,64
		Persentase RT pengguna air bersih	%	65,34	75	87,12
		Persentase RT bersanitasi	%	87,81	93,31	94,10
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Serta Tatanan Kehidupan Beragama Dan Berbudaya						
2	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Tahun	7,70	7,6	101,13
		Angka harapan sekolah	Tahun	12,64	12,42	101,85
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	70,26	70,17	100,12
4	Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,92	91,5	99,36



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Rpjmd 2022	Capaian 2022 Terhadap Akhir Th
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Budaya serta Kerukunan Antar Umat Beragama	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya	Jumlah	7	6	116,66
		Indeks kerukunan antar umat beragama	Poin	*)	72	na
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP	Predikat	*)	B	na
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	*)	WTP	na
7	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,71	75,07	111,50
Misi 4: Mendorong Tumbuhnya Perekonomian Daerah Dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis Dan Agroindustri Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup						
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	893.750	1.100.000	79,89
9	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,02	71,51	96,51
10	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	LPE sektor pertanian terhadap PDRB	%	2,58	5,17	49,90
		LPE sektor industri terhadap PDRB	%	2,05	4,75	43,15
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indek ketahanan pangan kabupaten	Poin	70,52	82,75	85,22
12	Meningkatnya Pengelolaan Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata	%	7,50	2,29	327,51



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Rpjmd 2022	Capaian 2022 Terhadap Akhir Th
1	2	3	4	5	6	7
13	Meningkatnya Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Air	Poin	70,00	60,3	116,08
		Indeks Kualitas Udara	Poin	93,42	92,53	100,96
		Indeks Tutupan Lahan	Poin	47,58	57,4	82,89
Misi 5: Mendorong Terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat						
14	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	Angka kriminalitas	Poin	73,24	80	109,22
		Angka partisipasi pemilih	%	85	83	102,40

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja indikator terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2017-2022, rata-rata capaian kinerja Tahun 2022 sudah mencapai 100,16%, dari target akhir RPJMD Tahun 2022.

2.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

Tabel II.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tebo	Provinsi	Nasional
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	81,85	70	93,2
2	Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	%	50	-	-
3	Persentase infrastruktur pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan) dalam kondisi baik	%	80,25	-	-
4	Persentase RT pengguna air bersih	%	65,34	-	-
5	Persentase RT bersanitasi	%	87,81	-	-



6	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Tahun	7,70	8,68	8,69
7	Angka harapan sekolah	Tahun	12,65	13,05	13,10
8	Angka harapan hidup	Tahun	70,26	71,50	71,85
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,92	88,95	91,63
10	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya	Jumlah	7	-	-
11	Indeks kerukunan antar umat beragama	Poin	-	-	-
12	Nilai SAKIP	Predikat	-	-	-
13	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	-	-	-
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,71	-	-
15	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	1.065.590,43	1.261.836,79	-
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,02	67,84	68,68
17	LPE sektor pertanian terhadap PDRB	%	2,58	5,00	-
18	LPE sektor industri terhadap PDRB	%	2,05	3,05	-
19	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	Poin	72,73	69,50	60,2
20	LPE Sektor Pariwisata	%	7,50	11,09	-
21	Indeks Kualitas Air	Poin	67,78	48,9	53,88
22	Indeks Kualitas Udara	Poin	93,42	-	88,06
23	Indeks Tutupan Lahan	Poin	47,83	-	60,72
24	Angka kriminalitas	Jumlah	66,13	144,47	100,41
25	Angka partisipasi pemilih	%	85	81,77	81,69

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi

pada indikator sasaran. Rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022, indikator dan target yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 Perubahan, antara lain:

1. Misi I Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Layanan Umum

Sasaran 1 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tebo telah melaksanakan pembangunan infrastruktur, infrastruktur jalan, listrik, air bersih, telepon dan lainnya. Infrastruktur yang dimaksud memiliki nilai strategis dalam upaya pencapaian pemerataan hasil pembangunan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian masing-masingnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	81,85	52,50	81,85	155,90
2	Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	%	40	60,00	50	83,33
3	Persentase infrastruktur pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan) dalam kondisi baik	%	74,90	70,00	80,25	114,64
4	Persentase RT pengguna air bersih	%	61,63	75,00	65,34	87,12
5	Persentase RT bersanitasi	%	86,71	93,31	87,81	94,10
Rata-rata						107,01



Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akumulasi dari Sasaran 1 **Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan**, terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran sebagaimana tersebut pada tabel di atas rata-rata capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 107,01 kategori sangat memuaskan, dengan masing-masing capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- ✚ **persentase jalan dalam kondisi mantap**, melampaui target yang ditetapkan capaian kinerja sebesar 155,90 % dengan kategori sangat memuaskan. Total Panjang jalan dikabupaten Tebo 1.443,33 KM dalam kondisi baik 759,92 KM dan 422,12 KM rusak ringan sesuai formulasi dalam IKU kabupaten Tebo serta Peraturan Menteri PU nomor: 13 Tahun 2011 bahwa jalan kondisi mantap adalah total Panjang jalan dalam kondisi baik dan rusak ringan dibagi dengan total Panjang jalan dikali 100 sehingga diperoleh persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 81,85%. Capaian ini merupakan dampak dari pelaksanaan kegiatan dan program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur.
- ✚ **Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik** tidak mencapai target yang ditetapkan capaian kinerja sebesar 83,33 % dengan kategori memuaskan. Indikator ini tidak tercapai karena keterbatasan anggaran pemeliharaan terhadap infrastruktur perhubungan dalam APBD Tebo terutama setelah digabungnya urusan perhubungan dengan Lingkungan Hidup sehingga mempengaruhi kontribusi APBN dalam peningkatan infrastruktur perhubungan kabupaten Tebo. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 adalah dengan melakukan pemetaan ulang perangkat daerah salah satunya dengan memisahkan urusan Perhubungan dengan urusan Lingkungan Hidup sehingga perhubungan menjadi Perangkat Daerah Tersendiri.
- ✚ **Persentase infrastruktur pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan) dalam kondisi baik** berhasil melampaui target yang telah ditetapkan capaian kinerja sebesar 114,64 % dengan kategori sangat memuaskan. Indikator ini terdiri atas dua komponen yaitu infrastruktur Pendidikan dalam kondisi baik sebesar 72 %. Data ini diperoleh dari total 3.199 sekolah dalam kondisi baik dari mulai TK,SD dan SMP dalam kondisi baik dibandingkan dengan total sekolah dikabupaten Tebo sebanyak 4.462 sekolah dikali 100. sedangkan Infrastruktur Kesehatan dalam kondisi baik sebesar 88,50% dari 20 Puskesmas 41 Pustu dan 100 Poskesdes. Sehingga akumulasi dari

komponen infrastruktur layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan telah melampaui target yang ditetapkan dan meningkat 5,35 poin jika dibandingkan Tahun sebelumnya.

✚ **Persentase RT pengguna air bersih**, tidak mencapai target yang ditetapkan capaian kinerja sebesar 87,12 % dengan kategori memuaskan. Total rumah tangga dikabupaten Tebo sebanyak 64.128 dari total 98.147 rumah tangga telah menggunakan air bersih. Indikator ini tidak tercapai karena Sebagian masyarakat di kabupaten Tebo masih memanfaatkan air sungai sebagai sumber utama dalam memenuhi kebutuhan air rumah tangga secara langsung. Upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan meningkatkan pemasangan sambungan PDAM ke desa/dusun, program PAMSIMAS dan upaya-upaya penyuluhan.

✚ **Persentase RT bersanitasi** tidak mencapai target yang ditetapkan capaian kinerja sebesar 94,10 % dengan kategori sangat memuaskan. Total rumah tangga dikabupaten Tebo sebanyak 86.186 dari total 98.147 rumah tangga telah memiliki akses sanitasi layak.

2. Misi Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan serta Tatanan Kehidupan Beragama dan Berbudaya

Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pembangunan Kabupaten Tebo menuju “**Tebo Tuntas 2022**”. Untuk mengukur capaian dari sasaran Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan telah ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Adapun capaian dari kedua indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan

No	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Tahun	7,59	7,60	7,70	101,13
2	Angka harapan sekolah	Tahun	12,64	12,42	12,65	101,85
Rata-rata						101,49

Sumber : BPS Kabupaten Provinsi Jambi, 2023

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akumulasi dari Sasaran 2 **Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan** terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran telah melampaui target yang ditetapkan.

- ✚ **rata-rata lama sekolah**, melampaui target yang telah ditetapkan capaian kinerja sebesar 101,13 % dengan kategori sangat memuaskan, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan untuk peningkatan RLS yaitu belum optimalnya pemerataan pembangunan prasarana pendidikan dan penyebaran guru/tenaga pendidik terutama pada daerah terpencil terutama disebabkan tenaga pendidik meminta untuk pindah dari tempat tersebut. Upaya yang telah dilakukan diantaranya: mengusulkan penambahan tenaga pendidik pada sekolah yang masih kekurangan, memberikan tambahan khusus bagi tenaga pengajar pada sekolah di daerah terpencil serta mencegah terjadinya pemindahan tenaga pendidik. Dibandingkan dengan kabupaten di Provinsi Jambi rata-rata lama sekolah kabupaten Tebo berada pada peringkat ke 10

Tabel II.14
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten dalam Provinsi Jambi

No	Wilayah	2020	2021	2022	Peringkat
	Nasional	-	8,54	8,69	-
1	Provinsi Jambi	8.55	8.60	8.68	-
2	Kerinci	8.55	8.56	8,57	3
3	Merangin	7.76	7.90	7.91	9
4	Sarolangun	7.87	8.04	8.12	8
5	Batanghari	8.11	8.12	8.21	6
6	Muaro Jambi	8.57	8.58	8.59	4
7	Tanjung Jabung Timur	6.70	6.92	7.19	11
8	Tanjung Jabung Barat	7.71	8.00	8.18	7
9	Tebo	7.58	7.59	7.70	10
10	Bungo	8.27	8.28	8.29	5
11	Kota Jambi	10.92	11.20	11.21	1
12	Kota Sungai Penuh	10.32	10.33	10.34	2

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023



- ✚ **angka harapan lama sekolah** capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan, capaian kinerja sebesar 101,85 % kategori sangat memuaskan. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan 0,23 poin, sedangkan dibandingkan dengan kabupaten tetangga Kabupaten Tebo berada pada peringkat 6 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pencapaian harapan lama sekolah (HLS) ini didukung dengan sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Tebo yaitu : Peningkatan APK PAUD, Peningkatan APM SD, Peningkatan APM SMP, Peningkatan APK SD dan Peningkatan APK SMP. Indikator Kinerja tersebut didukung melalui program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022. Capaian angka harapan lama sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.15
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten di Provinsi Jambi

No	Wilayah	2020	2021	2022	Peringkat
	Nasional	-	13,08	13,10	-
1	Provinsi Jambi	12.98	13.04	13.05	-
2	Kerinci	13.87	13.88	13.89	2
3	Merangin	11.99	12.04	12.05	10
4	Sarolangun	12.27	12.28	12.47	9
5	Batanghari	12.92	12.93	12.94	4
6	Muaro Jambi	12.83	12.84	12.99	3
7	Tanjung Jabung Timur	12.16	12.17	12.18	8
8	Tanjung Jabung Barat	12.62	12.63	12.64	5
9	Tebo	12.60	12.64	12.65	6
10	Bungo	12.62	12.63	12.64	7
11	Kota Jambi	15.10	15.37	15.38	1
12	Kota Sungai Penuh	14.79	14.80	14.81	

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tabel II.16
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Angka harapan hidup	%	70,02	70,17	70,26	100,12

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran 3 **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator sasaran sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dapat diketahui capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran angka harapan hidup melampaui target yang telah ditetapkan, capaian kinerja sebesar 100,12 % dengan kategori **sangat memuaskan**. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terdapat peningkatan 0,9 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten dalam Provinsi Jambi angka harapan hidup kabupaten Tebo berada pada posisi ke 7 (tujuh) dibawah capaian Provinsi Jambi dan masih dibawah rata-rata nasional.

Tabel II.17
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten di Provinsi Jambi dan Nasional

No	Provinsi /Kabupaten	AHH 2020	AHH 2021	AHH 2022	Peningkatan/ Penurunan	Peringkat
	Nasional	-	71,57	71,85	0,28	-
1	Provinsi Jambi	71.16	71.22	71,50	0,28	-
2	Kerinci	69.93	70.00	70.28	0,28	6
3	Merangin	71.26	71.29	71,53	0,24	4
4	Sarolangun	69.17	69.21	69,46	0,25	8
5	Batanghari	70.56	70.64	70,93	0,29	5
6	Muaro Jambi	71.27	71.32	71,58	0,26	3
7	Tanjung Jabung Timur	66.23	66.34	66,66	0,32	11
8	Tanjung Jabung	68.12	68.17	68,43	0,26	9



	Barat					
9	Tebo	69.99	70.02	70,26	0,24	7
10	Bungo	67.74	67.83	68,13	0,30	10
11	Kota Jambi	72.65	72.71	72,99	0,28	1
12	Kota Sungai Penuh	72.11	72.21	72,53	0,32	2

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Sasaran 4 Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Tabel II.18
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	90,40	91,50	90,92	99,36
Rata-rata						99,36

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2023

Dari tabel diatas disampaikan bahwa sasaran **Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat** dengan indikator kinerja **Indeks pembangunan Gender (IPG)** pada tabel di atas, dapat diketahui capaian kinerja hamplr mencapai target yang telah ditetapkan, capaian kinerja sebesar 96,36 % dengan kategori **sangat memuaskan**. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terdapat peningkatan 0,52 poin. Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam provinsi Jambi capaian pemerintah kabupaten Tebo berada pada peringkat ke 4 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.19
Capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi/Kabupaten

No	Provinsi /Kabupaten	IPG 2021	IPG 2022	Peningkatan/ Penurunan	Peringkat
	Nasional	91,27	91,63	0,36	-
1	JAMBI	88,62	88,95	0,33	-
2	Kerinci	86,81	87,03	0,22	8
3	Merangin	88,24	88,35	0,11	6
4	Sarolangun	90,81	91,65	0,84	3



5	Batang Hari	85,23	85,44	0,21	10
6	Muaro Jambi	81,06	81,55	0,49	11
7	Tanjung Jabung Timur	87,43	87,68	0,25	7
8	Tanjung Jabung Barat	85,79	86,17	0,38	9
9	Tebo	90,40	90,92	0,52	4
10	Bungo	88,49	88,61	0,12	5
11	Kota Jambi	94,42	94,80	0,38	1
12	Kota Sungai Penuh	94,41	94,49	0,08	2

Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Tebo dalam meningkatkan peranan Wanita dalam kegiatan pembangunan seiring dengan banyak Wanita yang menduduki jabatan penting.

Sasaran 5 Meningkatkan Pengembangan dan Pelestarian Budaya serta Kerukunan Antar Umat Beragama

Tabel II.20
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Budaya serta Kerukunan Antar Umat Beragama

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya	Angka	6	6	7	116,66
2	Indeks kerukunan antar umat beragama	Indeks	-	72	-	na
Rata-rata						-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Sasaran 5 **Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Budaya serta Kerukunan Antar Umat Beragama** dengan 2 (dua) indikator sasaran sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dapat diketahui capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran

✚ **HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Seni dan Budaya**, capaian kinerja sebesar 116,66 % dengan kategori **sangat memuaskan**. Pada tahun 2022 HAKI didapatkan diantaranya :

1. Duhai Ibu, Lagu musik dengan teks (Ciptaan : Awang Permadi)



2. Melepeh Hao, Lagu musik dengan teks (Ciptaan: Syafaruddin)
3. Abang Dirantau, Lagu musik dengan teks (Abu Bakar)
4. Seni Budaya, Lagu musik dengan teks (Ciptaan: Hendri Iskandar)
5. Karya Seni Batik Motif Batik Sekar Jagat (Ciptaan: Upekha Arkya Satriya Pradana)
6. Karya Seni Batik Motif Batik Baibat (Ciptaan: Khoiriah)
7. Untuk Negeriku, Lagu musik dengan teks (Ciptaan: Majdid Muaz dan Syafarudin)

Pencapaian Haki 2022, masih terdapat permasalahan yang cukup menghambat untuk peningkatan haki di Kabupaten Tebo yaitu belum optimalnya para pelaku seni dalam menterjemahkan irama lagu ke notasi balok dan keterbatasan anggaran kegiatan. Namun untuk menutupi kekurangan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya melakukan pembinaan kepada pelaku seniman lokal serta melakukan pengajuan penambahan anggaran kegiatan untuk mendongkrak capaian HAKI Kabupaten Tebo.

✚ **Indeks Kerukunan Umat Beragama** Tahun 2022 tidak dapat disampaikan karena pada tahun 2022 belum diperoleh hasil survey sebagaimana mengacu pada formulasi pada Indikator Kinerja Utama, namun demikian berdasarkan informasi dari kantor Kesbangpol kerukunan umat beragama di kabupaten Tebo sangat baik ditandai dengan tidak ada laporan terkait konflik umat beragama pada tahun 2022. Konflik yang terjadi yang dilaporkan adalah masalah tumpang tindih lahan.

3. Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good governance*)

Sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan misi ke 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, bersih transparan dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Tebo telah menetapkan sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah** dan untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan indikator sasaran yaitu **Nilai Sakip dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**. Adapun capaian terhadap sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.21
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1	Nilai Sakip	Predikat	B	B	*)	na
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	*)	na
Rata-rata						na

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat untuk sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi** pada tahun 2022 belum diketahui karena masih menunggu proses evaluasi dari BPK dan Kemenpan RB Republik Indonesia, sedangkan untuk Tahun 2021 sudah dapat diketahui:

- ✚ **Nilai SAKIP** Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tebo memperoleh penghargaan SAKIP yang disampaikan oleh Kementerian PAN RB secara virtual dengan nilai memperoleh nilai 65,93 dengan predikat B (baik) capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat memuaskan, nilai tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap evaluasi.
- ✚ **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan** Pada Tahun 2022 BPK memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil meraih target tersebut dengan capaian kinerja sebesar 100 % berkategori baik. Pemerintah Kabupaten Tebo telah berhasil memperoleh opini WTP 7 (tujuh) kali berturut-turut semenjak tahun 2015 hingga tahun 2021 sedangkan tahun 2022 belum diperoleh karena masih dalam proses evaluasi oleh BPK RI.

Sasaran 7 *Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik*

Dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran meningkatnya kepuasan pelayanan publik diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei internal yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin pada tahun 2022 dengan capaian sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel II.22
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Pelayanan Masyarakat Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai Ikm	Kategori
1	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah	89,71	Baik
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,92	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin	74,50	Kurang Baik
Rata-rata		83,71	Baik

Tabel II.23
Evaluasi Analisis Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,92	75,07	83,71	111,50
Rata-rata						111,50

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 sasaran **Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik** dengan indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat** telah melampaui target yang telah ditetapkan meskipun sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Tahun 2021 terutama pada layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah memperoleh nilai kurang baik, namun demikian akumulasi pelayanan publik secara umum nilai capaian sebesar 111,50% kategori sangat memuaskan. Indikator ini tercapai karena Perangkat Daerah pelaksana pelayanan publik terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan arahan Bupati Tebo dengan melakukan inovasi pelayanan seperti melakukan layanan jemput bola kepada masyarakat dalam layanan capil, perekaman suku anak dalam dan penggunaan teknologi berbasis aplikasi maupun media Whatsapp meskipun terkendala oleh terbatasnya anggaran .

Sebagai pembanding dari survei internal juga dilakukan penilaian kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun

2022 Pemerintah Kabupaten Tebo memperoleh zona hijau dengan nilai 92,50 memperoleh peringkat ke 10 (sepuluh) secara Nasional dan ke 1 (satu) se-Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan hasil survey internal tidak terpaut jauh dibandingkan dengan penilaian Ombudsman RI.

Salah satu upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tebo telah membuat Mall Pelayan Publik dan sudah pada tahap uji coba pelaksanaan pelayanan. Namun demikian dalam pelaksanaan pelayanan public tentu terdapat masalah seperti yang sedang dihadapi saat ini Pemerintah Kabupaten Tebo belum melakukan SKM secara eksternal sehingga sering menjadi catatan, untuk saat ini sedang dilakukan pengusulan untuk dilaksanakan.

4. Misi Mendorong Tumbuhnya Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran 8 *Meningkatnya Pendapatan Masyarakat*

Tabel II.24
Evaluasi Analisis Sasaran *Meningkatnya Pendapatan Masyarakat*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Pengeluaran Perkapita	angka	1.011.361,59	1.100.000	1.065.590,43	96,87
Rata-rata						96,87

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2023

Menurut data BPS pada Tahun 2022 sasaran **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** dengan indikator **sasaran pengeluaran perkapita** ditargetkan sebesar 1.100.000 realisasi capaian sebesar 1.065.590,43 tidak mencapai target capaian sebesar 96,87% dengan kategori sangat memuaskan. Pengeluaran perkapita Kabupaten Tebo pada Tahun 2022 ini terdiri atas pengeluaran makanan dan bukan makanan, meningkat sebesar 54.228,84 (lima puluh empat ribu rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya jika dibandingkan dengan pengeluaran perkapita rata-rata provinsi dan Nasional kabupaten Tebo masih dibawah rata-rata provinsi dan nasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.25
Pengeluaran Perkapita Kabupaten dalam Provinsi Jambi dan Nasional (ribu rupiah)

No	Wilayah	2020	2021	2022	Peringkat
	Nasional		12.410,00	12.410,00	-
	Provinsi Jambi	10.392.00	10.588.00	10.871.00	-
1	Kerinci	9.995.00	10.184.00	10.570.00	7
2	Merangin	10.279.00	10.380.00	10.714.00	6
3	Sarolangun	11.616.00	11.792.00	12.069.00	2
4	Batanghari	9.825.00	10.032.00	10.173.00	8
5	Muaro Jambi	8.556.00	8.825.00	9.118.00	11
6	Tanjung Jabung Timur	9.026.00	9.163.00	9.503.00	10
7	Tanjung Jabung Barat	9.480.00	9.699.00	9.968.00	9
8	Tebo	10.389.00	10.546.00	10.725.00	5
9	Bungo	11.471.00	11.670.00	11.956.00	3
10	Kota Jambi	12.056.00	12.240.00	12.597.00	1
11	Kota Sungai Penuh	10.248.00	10.454.00	10.745.00	4

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja

Tabel II.26
Evaluasi Analisis Pencapaian Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
				Target	Realisasi	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	angka	70,62	71,51	69,02	96,51
	Rata-rata					96,51

Sumber : BPS Kabupaten Tebo, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 sasaran **Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja** dengan indikator sasaran **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** hampir mencapai target yang telah ditetapkan nilai capaian sebesar 96,51% dengan kategori sangat memuaskan. Dibandingkan pada tahun 2021 penurunan sebesar 1,63 poin dan jika dibandingkan dengan kabupaten di provinsi Jambi tebo berada

pada peringkat ke 5 (lima). Jika dibandingkan rata-rata provinsi TPAK Kabupaten Tebo masih lebih tinggi seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten di Provinsi Jambi dan Nasional

No	Kabupaten/Kota	TPAK 2021	TPAK 2022	Peningkatan/ Penurunan	Peringkat
	Nasional	68,08		-	-
	Provinsi Jambi	67,17	67,84	0,67	-
1	Kerinci	70.90	73,53	2,63	1
2	Merangin	69.85	69,50	-0,35	4
3	Sarolangun	64.86	66,74	1,88	8
4	Batang Hari	68.81	63,42	-5,49	10
5	Muaro Jambi	62.78	67,21	4,7	7
6	Tanjab Timur	71.22	72,85	1,63	2
7	Tanjab Barat	73.89	70,00	-3,89	3
8	Tebo	70.65	69,02	-1,63	5
9	Bungo	63.58	67,83	4,25	6
10	Kota Jambi	63.12	64,52	1,4	9
11	Kota Sungai Penuh	64,92	63,02	-1,9	11

Sumber: BPS Provinsi Jambi,, 2023

Sasaran 10 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Tabel II.28
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1	LPE sektor pertanian terhadap PDRB	%	3,73	5,17	2,58	49,90
2	LPE sektor industri terhadap PDRB	%	3,96	4,75	2,05	43,15
Rata-rata						46,52

Sumber: BPS Kabupaten Tebo, 2023

Menurut data BPS pada Tahun 2023 **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan** dengan indikator sasaran:

✚ **LPE sektor pertanian terhadap PDRB** LPE sektor pertanian terhadap PDRB ditargetkan sebesar 5,17 % tidak mencapai target, realisasi capaian sebesar 2,58 % capaian sebesar 49,90% dengan kategori kurang. Dibandingkan capaian tahun sebelumnya terjadi pelemahan laju pertumbuhan sebesar 1,15 poin. Indikator ini tidak mencapai target salah satunya disebabkan oleh tingginya laju inflasi Kabupaten Tebo/Provinsi Jambi pada tahun 2022 yang berdampak pada kenaikan harga sarana produksi seperti : benih pertanian, pupuk, dan pestisida sementara harga komoditas yang menjadi andalan petani seperti karet dan kelapa sawit tidak mengalami kenaikan sehingga berdampak terhadap daya beli.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo berkolaborasi dengan berbagai unsur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sekaligus menahan laju inflasi seperti diantaranya dengan memberikan bantuan sarana produksi kepada petani, penyuluhan dan motivasi secara berkala yang seringkali dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tebo.

✚ **LPE sektor industri terhadap PDRB** LPE sektor industri ditargetkan sebesar 4,75 % realisasi sebesar 2,05 % tidak mencapai target yang ditetapkan capaian kinerja sebesar 43,15 % kategori kurang. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pelemahan 1,91 poin. Penyebab tidak tercapainya indikator ini adalah banyak industry di Kabupaten Tebo yang masih mendapat imbas wabah Covid-19 dan tingginya laju inflasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan permodalan kepada UMKM terdampak dan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait.

Sasaran 11 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Tabel II.29

Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

No	Indikator Kerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks ketahanan pangan kabupaten	angka	72,73	82,75	70,52	85,22
Rata-rata						85,22

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Sasaran 11 **Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah**, dengan indikator sasaran sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dapat diketahui capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran **Indeks ketahanan pangan kabupaten**, tidak mencapai target, capaian kinerja sebesar 85,22 % dengan kategori memuaskan. Dibandingkan realisasi capaian tahun sebelumnya terjadi pelemahan sebesar 2,21 poin, pelemahan juga berlaku pada hamper seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi kecuali Tanjung Jabung Barat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.30
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Jambi 2021 dan 2022

No	Provinsi, Kabupaten/Kota	IKP 2021	IKP 2022	Penambahan/ Pengurangan
	Provinsi Jambi	74,18	69,50	-4,68
1	Kerinci	83,31	81,94	-1,37
2	Merangin	77,23	71,02	-6,21
3	Batang Hari	73,52	70,52	-3,00
4	Muara Jambi	72,79	65,37	-7,42
5	Tebo	72,73	70,52	-2,21
6	Tanjung Jabung Timur	72,21	70,65	-1,56
7	Sarolangun	70,82	64,47	-6,35
8	Bungo	70,69	62,93	-7,76
9	Tanjung Jabung Barat	68,54	69,66	1,12
10	Kota Jambi	79,73	77,50	-2,23
11	Kota Sungai Penuh	74,45	59,92	-14,53

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Sasaran 12 Meningkatkan Pengelolaan Sektor Pariwisata

Tabel II.31

Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Sektor Pariwisata

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1	LPE Sektor Pariwisata	%	5,42	2,29	7,50	327,51
	Rata-rata					327,51

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Sasaran 12 **Meningkatnya Pengelolaan Sektor Pariwisata**, dengan indikator sasaran LPE Sektor Pariwisata ditargetkan sebesar 2,29 realisasi sebesar 7,50 melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 327,51 % kategori sangat memuaskan. Capaian ini dilihat dari pertumbuhan/meningkatnya penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2022 sebesar 7,50%. Berbagai upaya pemerintah Kabupaten Tebo untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata seperti diantaranya: melakukan revitalisasi taman Tanggo Rajo, pembuatan taman terpadu di Rimbo Bujang serta memberikan penguatan terhadap industri pariwisata sebagaimana yang dilakukan terhadap Riverra Park sebuah Inovasi Wisata yang berhasil mengubah area bekas tambang emas ilegal menjadi tempat wisata yang indah dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan secara luar biasa sehingga mampu memperoleh Anugrah Pesona Indonesia (API) award Tahun 2021.

Sasaran 13 Meningkatkan Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan

Tabel II.32
Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air	Angka	67,78	60,30	70	116,08
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	92,03	92,53	93,42	100,96
3	Indeks Tutupan Lahan	Angka	47,83	57,40	47,58	82,89
Rata-rata						99,97

Sumber: Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kemen LHK, 2023

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akumulasi dari Sasaran 13 **Meningkatnya Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan**, terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sebesar 99,97% kategori sangat memuaskan.

Indikator kinerja sasaran **Indeks Kualitas Air**, mencapai target yang ditetapkan capaian kinerja sebesar 116,08 % dengan kategori sangat memuaskan. Nilai ini diperoleh dari pengukuran sungai terbesar dan

terpanjang di pulau sumatera yakni sungai Batang Hari yang melintas secara memanjang di wilayah Kabupaten Tebo dari hulu ke hilir. Sampel yang dilakukan penilaian berada di desa Teluk Kepayang, Teluk Singkawang dan Teluk Kayu Putih. Adapun dalam pengujian terhadap kualitas air yang dilihat secara Biologi untuk melihat apakah air mengandung bakteri berbahaya seperti *faecal coli*, selanjutnya secara fisika untuk melihat adanya sendimen dan secara kimia untuk melihat PH air, BOD5, COD, Oksigen, Total Phospat (P) maupun Nitrat (N).

Indikator kinerja sasaran **Indeks Kualitas Udara** memperoleh capaian kinerja sebesar 100,96% dengan kategori sangat memuaskan. Indikator ini merupakan parameter untuk melihat kualitas udara secara umum di Kabupaten Tebo. Dianggap baik jika indicator kualitas udara berada

diatas 70 yaitu 93,42 sehingga dapat disimpulkan indeks kualitas udara di Kabupaten Tebo sangat baik.

Indikator kinerja ke-tiga **Indeks Tutupan Lahan**, tidak mencapai target yang telah ditetapkan capaian kinerja sebesar 82,89% dengan kategori kinerja memuaskan. Nilai ini diperoleh melalui perhitungan antara luas wilayah, Luas Hutan, Luas belukar dalam Kawasan, luas belukar fungsi lindung, luas ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

5. Misi Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sasaran 14 *Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat*

Tabel II.33

Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja *Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1	Angka kriminalitas	Angka	66,13	80	71,66	111,63
2	Angka partisipasi pemilih	Angka	85	83	85	102,40
Rata-rata						107,01

Sumber: Polres Tebo, KPU Tebo, 2023

Dari Tabel dia atas dapat dijelaskan bahwa akumulasi dari Sasaran 14 *Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan*



Bermasyarakat, terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sebesar 107,01% kategori sangat memuaskan capaian tersebut diperoleh dari indikator kinerja sasaran **Angka Kriminalitas**, capaian kinerja sebesar 111,63% , angka tersebut berasal dari jumlah laporan kriminalitas yang diterima Kepolisian Resort Tebo disampaikan dalam konferensi pers oleh Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega, Sabtu 31/12/2022 sebanyak 251 kasus. Sesuai formulasi dalam indikator kinerja utama kabupaten Tebo untuk mengetahui angka kriminalitas dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kasus yang terjadi} \times 100.000}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$251 \times \frac{100.000}{350.234} = 71,66$$

Sehingga dapat diketahui angka kriminalitas kabupaten Tebo pada tahun 2022 sebesar 71,66 melampaui target yang ditetapkan sebesar 80, menurun 5,53 poin dibanding tahun sebelumnya sebesar 66,13 dengan asumsi semakin rendah angka kriminalitas maka semakin baik.

Sedangkan untuk indikator **angka partisipasi pemilih** pada tahun 2022 mengacu pada saat Pemilihan Umum tahun 2019 dimana partisipasi pemilih dikabupaten Tebo sebesar 85%, dimana dari total 238.198 data pemilih tetap sebanyak 202.168 masyarakat menggunakan hak pilihnya sehingga diperoleh persentase 85%.

2.3.6 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022

Pemerintah kabupaten Tebo menyiapkan anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo yakni **Rp. 1.448.960.037.377,00** yang didistribusikan kepada 27 Perangkat Daerah, 12 Kecamatan dan 5 Kelurahan, dapat terealisasi sebesar **Rp. 1.338.008.631.206,07** dengan demikian, realisasi anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2022 sebelum diaudit BPK mencapai **92,34%**, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.34
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.175.676.863.205,61	1.174.828.858.764,31	99,93	1.167.195.696.528,30



4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.740.463.914,03	86.173.364.002,31	90,01	92.915.275.640,96
4.1.01	Pajak Daerah	20.423.730.743,00	23.343.449.484,64	114,30	22.539.888.831,22
4.1.01.06	Pajak Hotel	35.000.000,00	42.518.500,00	121,48	39.585.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.899.013.784,64	158,25	1.581.681.220,22
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.000.000,00	2.943.350,00	147,17	150.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	375.000.000,00	478.883.804,00	127,70	446.673.022,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	14.500.000.000,00	16.170.889.499,00	111,52	15.895.146.082,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	75.000.000,00	107.352.000,00	143,14	90.250.400,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00	2.516.163,00	100,65	3.114.422,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	12.835.000,00	128,35	12.657.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	460.458.243,00	92,09	489.437.987,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.593.230.743,00	2.261.737.973,00	87,22	2.342.386.948,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.131.000.000,00	1.904.301.168,00	168,37	1.638.806.750,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.908.000.000,00	3.071.828.524,00	78,60	2.830.768.040,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.912.000.000,00	2.409.094.790,00	82,73	2.292.448.400,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	896.000.000,00	565.243.450,00	63,09	500.363.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	97.490.284,00	97,49	37.956.640,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.693.391.104,03	10.693.391.104,03	100,00	8.777.303.549,16
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	8.777.303.549,16
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.693.391.104,03	10.693.391.104,03	100,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.715.342.067,00	49.064.694.889,64	80,81	58.767.315.220,58
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	556.104.800,00	287.125.800,00	51,63	656.939.500,00
4.1.04.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	(103.316,84)	0,00	103.316,84
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000,00	400.000,00	40,00	135.500.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.900.000.000,00	2.421.589.013,93	127,45	1.636.531.639,04
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.415.503.867,00	2.431.052.126,72	23,34	3.945.071.429,77
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.250.000.000,00	8.338.834.577,11	81,35	1.276.114.100,49
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.022.234.000,00	1.542.200.088,54	150,87	715.753.678,99



4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.730.000.000,00	1.191.130.265,28	43,63	814.009.352,61
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	26.148.499.400,00	25.821.133.886,90	98,75	41.646.710.902,84
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.500.000.000,00	7.029.522.448,00	93,73	7.932.581.300,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	192.000.000,00	1.810.000,00	0,94	8.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.740.463.914,03	86.173.364.002,31	90,01	92.915.275.640,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.079.936.399.291,58	1.075.002.494.762,00	99,54	1.017.377.596.682,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.003.793.125.541,00	999.216.814.233,00	99,54	950.568.704.531,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	883.326.202.541,00	878.749.933.533,00	99,48	830.312.232.151,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	883.326.202.541,00	878.749.933.533,00	99,48	830.312.232.151,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.781.555.000,00	19.781.555.000,00	100,00	8.806.688.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	100.685.368.000,00	100.685.325.700,00	100,00	111.449.784.380,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	120.466.923.000,00	120.466.880.700,00	100,00	120.256.472.380,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.143.273.750,58	75.785.680.529,00	99,53	66.808.892.151,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.743.273.750,58	64.385.680.529,00	99,45	60.088.892.151,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	100,00	6.720.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	76.143.273.750,58	75.785.680.529,00	99,53	66.808.892.151,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.079.936.399.291,58	1.075.002.494.762,00	99,54	1.017.377.596.682,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	13.653.000.000,00	0,00	56.902.824.205,34
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	13.653.000.000,00	0,00	11.230.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	13.653.000.000,00	0,00	11.230.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	45.672.824.205,34
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	45.672.824.205,34
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	13.653.000.000,00	0,00	56.902.824.205,34



	JUMLAH PENDAPATAN	1.175.676.863.205,61	1.174.828.858.764,31	99,93	1.167.195.696.528,30
5	BELANJA DAERAH	1.448.960.037.377,00	1.338.008.631.206,07	92,34	1.145.760.283.465,25
5.1	BELANJA OPERASI	839.764.850.401,00	774.282.457.062,07	92,20	740.017.958.805,14
5.1.01	Belanja Pegawai	416.213.775.834,00	380.310.681.385,00	91,37	395.520.603.353,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	253.073.222.886,00	237.177.863.062,00	93,72	249.029.086.830,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	64.161.543.802,00	59.584.095.453,00	92,87	55.412.926.567,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.204.722.926,00	64.941.206.348,00	80,97	72.342.788.709,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.999.331.501,00	17.866.488.905,00	99,26	17.823.583.098,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	266.854.719,00	232.927.617,00	87,29	311.018.149,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	508.100.000,00	508.100.000,00	100,00	601.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	405.243.737.356,00	379.865.428.669,07	93,74	301.502.764.818,14
5.1.02.01	Belanja Barang	105.722.063.452,00	100.490.280.770,00	95,05	69.912.802.267,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	131.719.889.377,00	124.087.341.407,00	94,21	107.093.285.946,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	51.319.828.641,00	49.850.431.826,00	97,14	48.698.552.076,10
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.201.053.054,00	70.695.772.900,66	95,28	49.601.175.629,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.353.710.220,00	2.144.433.650,00	91,11	2.523.363.700,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.927.192.612,00	32.597.168.115,41	81,64	23.673.585.200,04
5.1.04	Belanja Subsidi	1.070.513.315,00	1.055.683.730,00	98,61	1.070.513.315,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.070.513.315,00	1.055.683.730,00	98,61	1.070.513.315,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.076.823.896,00	12.890.663.278,00	75,49	41.924.077.319,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	790.000.000,00	780.000.000,00	98,73	100.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.807.773.475,00	8.267.625.155,00	93,87	40.803.709.196,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	6.158.682.298,00	2.522.670.000,00	40,96	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.368.123,00	1.020.368.123,00	100,00	1.020.368.123,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	0,00



	JUMLAH BELANJA OPERASI	839.764.850.401,00	774.282.457.062,07	92,20	740.017.958.805,14
5.2	BELANJA MODAL	431.859.093.974,00	387.530.343.306,00	89,74	222.212.719.378,11
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.163.451.195,00	71.223.599.340,00	74,84	31.186.838.055,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.052.902.400,00	3.926.770.800,00	64,87	18.695.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.361.959.580,00	4.083.885.580,00	93,63	3.399.553.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	84.283.846,00	38.543.196,00	45,73	123.768.524,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	224.821.550,00	183.440.230,00	81,59	56.549.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.796.807.009,00	14.180.476.408,00	95,83	5.844.342.140,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	583.003.126,00	579.789.066,00	99,45	351.520.220,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	30.666.330.299,00	26.681.261.224,00	87,01	11.999.422.660,20
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.401.739.926,00	11.301.060.907,00	99,12	948.564.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.389.566.215,00	6.210.924.360,00	97,20	8.396.345.410,80
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	84.714.400,00	81.429.000,00	96,12	237.600,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	19.100.000,00	19.100.000,00	100,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	7.775.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	43.525.600,00	43.522.000,00	99,99	15.765.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	20.454.697.244,00	3.893.396.569,00	19,03	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.125.781.089,00	84.642.985.302,00	98,28	57.478.356.391,03
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	79.533.929.389,00	78.067.366.319,00	98,16	53.443.265.218,03
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.591.851.700,00	6.575.618.983,00	99,75	4.035.091.173,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	245.703.928.906,00	226.851.955.350,00	92,33	127.881.482.652,08
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	216.508.284.897,00	198.974.295.679,00	91,90	106.203.006.768,30
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.555.103.300,00	13.972.182.440,00	96,00	8.082.590.089,28
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	191.669.310,00	189.914.000,00	99,08	410.829.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.448.871.399,00	13.715.563.231,00	94,92	13.185.056.794,50
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.865.932.784,00	4.811.803.314,00	98,89	5.666.042.280,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan	4.434.853.034,00	4.381.300.854,00	98,79	5.291.569.780,00



	Perpustakaan				
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	147.103.650,00	146.918.760,00	99,87	76.168.500,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	125.250.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	283.976.100,00	283.583.700,00	99,86	133.054.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	431.859.093.974,00	387.530.343.306,00	89,74	222.212.719.378,11
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.414.341.874,00	357.750.000,00	25,29	2.722.884.380,00
5.4	BELANJA TRANSFER	175.921.751.128,00	175.838.080.838,00	99,95	180.806.720.902,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.433.173.074,00	2.349.545.084,00	96,56	2.202.349.122,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.042.373.074,00	1.973.354.429,00	96,62	1.763.753.307,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	390.800.000,00	376.190.655,00	96,26	438.595.815,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	173.488.578.054,00	173.488.535.754,00	100,00	178.604.371.780,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	173.488.578.054,00	173.488.535.754,00	100,00	178.604.371.780,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	175.921.751.128,00	175.838.080.838,00	99,95	180.806.720.902,00
	JUMLAH BELANJA	1.448.960.037.377,00	1.338.008.631.206,07	92,34	1.145.760.283.465,25

2.3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pemerintah kabupaten Tebo berusaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya, baik dari sumber daya manusia maupun anggaran dalam menjalankan Visi dan Misi menuju **Tebo Tuntas 2022**.

2.3.7.1 Sumberdaya Manusia

Jumlah ASN di Kabupaten Tebo Tahun 2022 sebanyak 3.538 orang masih dibawah angka ideal yakni 1,5 % dari total jumlah penduduk Tebo sebanyak 350.234 yaitu 5.253 ASN dengan tingkat keterpenuhan sebesar 67,35 %. Melihat rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 99,99

% dibandingkan tingkat keterpenuhan ASN sebesar 67,35 % dapat diartikan telah terjadi efisiensi penggunaan Sumberdaya Manusia sebesar 1,48.

3.3.7.1 Anggaran

Serapan anggaran pada tahun 2022 sebesar 92,34 % dibandingkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 99,99 % dapat diartikan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,08. Untuk melihat efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.35 Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran

No	Sasaran	% Rata-rata capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Kehidupan	107,01	205.610.982.012,00	202.426.210.430,58	97,45	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	101,49	275.675.295.920,71	264.412.825.812,00	95,91	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	100,12	143.054.270.965,00	116.089.191.705,03	81,15	Efisien
4	Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat		9.833.213.950	9.636.978.818	98	Efisien
5	Meningkatnya Pengembangan Dan Pelestarian Budaya Serta Kerukunan Antar Umat Beragama	116,66	4.002.348.915	3.912.343.100	97,75	Efisien
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	746.161.644.236	730.122.443.124	97,85	-
7	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	111,50	4.456.354.106,00	4.273.239.729,00	95	Efisien
8	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	96,51	233.983.496	213.823.678	91,38	Efisien



9	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja	96,51	111.799.687	101.892.787	91,11	Efisien
10	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	46,52	4.132.393.422	4.074.568.586	95,62	Tidak Efisien
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	85,22	11.578.056.731,00	11.072.177.021,00	95,62	Tidak Efisien
12	Meningkatnya Pengelolaan Sektor Pariwisata	164,11	576.833.042	502.234.887	92,06	Efisien
13	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan	99,97	1.047.431.374	988.098.764	94,33	Efisien
14	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat	107,01	5.151.247.489	5.098.786.121	98,98	Efisien



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tebo

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI dalam bentuk Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi. Adapun program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.

3.1.1 Target Kinerja

Adapun target dari pelaksanaan program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan adalah terbangunnya sarana UPPO di Desa Kuamang Kecamatan VII Koto, terkelolanya Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dan terlaksananya Budidaya Padi Inbrida Lahan Kering.

3.1.2 Realisasi

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo sebesar Rp. 9.308.692.000,- dengan realisasi Rp.8.244.081.090,-..

Tabel III.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Pertanian RI	Nomor SP DIPA. 018.08.4.109125/2020 Tanggal 21 November 2019	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		DTPH KP	940,340,000	905,144,400	96.26			TP
			Pembangunan UPPO	Desa Kuamang Kec. VII Koto		200,000,000	200,000,000	100.00	1 unit	100.00	



			Pembangunan Embung/Dam Wilayah Barat (Persiapan)	Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebolir dan Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu		240,000,000	240,000,000	100.00	2 unit	100.00	
			Layanan Dukungan Manajemen Satker	Kab. Tebo		150,000,000	137,124,800	91.42	12 bulan	100.00	
			E-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis	Kab. Tebo		159,350,000	145,640,000	91.40	12 bulan	100.00	
			Pelaksanaan KP3 Mendukung Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Kab. Tebo		84,500,000	84,415,000	99.90	10 bulan	100.00	
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Linngkup Pembiayaan	Kab. Tebo		106,490,000	97,964,600	91.99	12 bulan	100.00	
2	Kementerian Pertanian RI	Nomor SP DIPA : 018.03.4.109119/2020 Tanggal 12 November 2019	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan		DTPH KP	7,461,777,000	6,446,015,690	86.39			TP
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi			3,684,942,000	2,893,422,040	78.52			
			Kedelai (3600 Ha)	Kec. VII Koto (Teluk Kayu Putih, Aur Cino, Dusun Baru, Muara Niro)		3,684,942,000	2,893,422,040	78.52			
				Kec. VII Koto Ilir (Sungai Karang, Balai Rajo, Teluk Kepayang Pulau Indah)							
				Kec. Tebo Ulu (Malakointan)							
				Kec. Serai Serumpun (Sako Makmur, Napal Putih, Pagar Puding Lamo)							
				Kec. Sumay (Suo-Suo, Muara Sekalo, Pemayungan)							
				Kec. Tebo Tengah (Mangun Jayo)							
				Kec. Tengah Ilir (Muara Kilis, Lubuk Mandrasah)							
				Kec. Tebolir (Betung Berd arah Timur, Teluk Rendah Ilir, Tuollir)							
				Kec. Muara Tabir (Sungai Jernih,							



				OlakKemang)							
				Kec. RimboBujan g (TirtaKencana)							
				Kec. Rimbo Ulu (SidoRukun dan sumber Sari)							
			BenihTahap 1		222,064,425	197,374,000	88.88	16600 kg	100.00		
			BenihTahap 2		205,476,480	182,630,400	88.88	15360 kg	100.00		
			BenihTahap 3		133,773,750	118,900,000	88.88	10000 kg	100.00		
			BenihKontrak Panjang		1,365,027,345	1,213,357,640	88.89	102040 kg	100.00		
			Herbisida		648,000,000	611,820,000	94.42	10800 ltr	100.00		
			Pengadaan Rhizobium		203,400,000	198,900,000	97.79	900000 gr	100.00		
			PengadaanPupukHayatiCair		907,200,000	370,440,000	40.83	10800 ltr	100.00		
			KegiatanPengelolaanProduksiTanamanSerelia		3,776,835,000	3,552,593,650	94.06				
			Padilnbrida (3500 Ha)	Kec. VII Koto Ilir (Paseban, CerminAlam)	875,000,000	869,750,000	99.40				
				Kec. Tengah Ilir (Penapalan)							
				Kec. Sumay (TelukSingkawang, Teriti, Puntikalo, TelukSingkawang, TelukLangkap, LebakBungur)							
				Kec. Tebollir (Sungai Aro, Sungai Bengkal, BetungBedarah Timur, Sungai Bengkal Barat, Muara Ketalo, TelukRendahilir, TelukRendah Pasar, TelukRendah Ulu, BetungBedarah Barat, Tuollir)							
				Kec. Tebo Tengah (Mangun Jayo, Pelayang, Semabu)							
				Kec. VII Koto (Kuamang, Sungai Abang, Muara Niro, Dusun Baru, Tabun)							



				Kec. Serai Serumpun (Tanjung Aur Seberang, Teluk Melintang, Pagar Puding Lamo)						
				Kec. Tebo Ulu (Pulau Temiang, Malakolintang, Pagar Puding, Bungo Tanjung, Pulau Jelmu, Jambu, Teluk Kembar, Medan Seri Rambahan, Tanjung Aur, Rambahan, Teluk Pandan Rambahan)						
				Kec. Muara Tabir (Embacang Gedang, Pintas Tuo, Tambun Arang)						
			Benih Tahap I		483,750,000	480,847,500	99.40	48375 kg	100.00	
			Benih Tahap II		391,250,000	388,902,500	99.40	39125 kg	100.00	
			Padi Rawa (700 Ha)	Kec. Sumay (Tuo Sumay, Teluk Langkap Tabun Arang)	1,003,275,000	792,931,650	79.03			
				Kec. Tebo Ulu (Malakolintang, Pulau Temiang, Lubuk Benting, Jambu, Teluk Kual, Medan Seri Rambahan, Rambahan, Teluk Pandan Rambahan)						
				Kec. Tebo Tengah (Tebing Tinggi)						
				Kec. Tebolir (Sungai Bengkal, Sungai Aro, Betung Bedarah Timur)						



				Kec. Sumay (TuoSumay, TelukLangka p, Tabun Arang, Malakolntan, PulauTemia ng, LubukBente ng, Jambu, Teluk Kual i, Medan Seri Rambahan, Rambahan, TelukPadan Rambahan)						
				Kec. Tebo Tengah (Tebing Tinggi)						
			BenihPadiRawa			350,000,000	208,740,000	59.64	21000 kg	100.0 0
			Herbisida			126,000,000	118,965,000	94.42	2100 ltr	100.0 0
			NPK Non Subsidi			285,775,000	223,726,650	78.29	35000 Kg	100.0 0
			Dolomit			105,000,000	105,000,000	100.0 0	70000 kg	100.0 0
			PupukHayati			136,500,000	136,500,000	100.0 0	2100 ltr	100.0 0
			JagungUmum 3 (1280 Ha)	Kec. VII Koto (Teluk Kayu Putih, Kuamang)		710,400,000	710,400,000	100.0 0		
				Kec. VII Koto ilir (TelukKepay angPulau Indah)						
				Kec. Tebo Ulu (Teluk Kuali, PagarPuding)						
				Kec. Serai Serumpun (PagarPudin gLamo, TanjungAur Seberang)						
				Kec. Sumay (Suo-Suo, Semambu, Pemayunga n)						
				Kec. Tengah ilir (LubukMand arsah)						
				Kec. Rimbo Ulu (SukaiDamai)						
				Kec. Muara Tabir (Sungai Jernih)						
				Kec. Rimboilir (Giriwinangu n)						
				Kec. RimboBujan g (TirtaKencan a)						



			BenihJagungUmum 3			710,400,000	710,400,000	100.0 0	19200 kg	100.0 0	
			Padi Ladang Kering (1280 Ha)	Kec. VII Koto (Teluk Kayu Putih, AurCino)		1,188,160,000	1,179,512,000	99.27			
				Kec. VII Koto Iilir(BalaiRajo, Sungai Karang)							
				Kec. Tebo Ulu (Teluk Kasai Rambahan, Malakolntan)							
				Kec. Sumay (Suo-Suo, Muara Sekalo, Semambu, Pemayunga n)							
				Kec. Tengah Iilir (Muara Kilis, LubukManda rsyah)							
				Kec. Tebollir (Muara Ketalo, Kunangan)							
				Kec. Muara Tabir (PintasTuo, EmbacangG edang)							
			BenihPadi Ladang			512,000,000	508,928,000	99.40	51200 Kg	100.0 0	
			NPK Non Subsidi			522,560,000	522,560,000	100.0 0	64000 Kg	100.0 0	
			Herbisida			153,600,000	148,024,000	96.37	2560 Ltr	100.0 0	
3	Kement erian Pertania n RI	Nomor : SP DIPA/018.11.3.10 9019/2020 Tanggal 27 April 2020	Program PeningkatanDiversi fikasi dan KetahananPangan Masyarakat		DTPH KP	314,435,000	314,221,000	99.93			Dekon
			KegiatanPengemban ganPenganekaraga manKonsumsi dan KeamananPangan								
			PekaranganPangan Lestari	KecamatanT ebo Tengah, VII Koto Iilir, RimboBujan g, Muara Tabir dan Sumay		295,625,000	295,625,000	100.0 0	5 Kelompo k	100.0 0	
			KegiatanDukunganM anajemen dan Teknis Lainnya Badan KetahananPangan	Kab. Tebo		18,810,000	18,596,000	98.86	12 bulan	100.0 0	
4	Kement erian Pertania n RI	Nomor : DIPA – 018.10.3.418000/ 2020 Tanggal 10 Desember 2020	Program PemantapanSistem PenyuluhanPertani an		DTPH KP	592,140,000	578,700,000	97.73			Dekon
			HONOR THL-TBPP	Kab. Tebo							
			- TINGKAT SLTA	Kab. Tebo		118,800,000	118,800,000	100.0 0	99 OB	100.0 0	
			- TINGKAT D3	Kab. Tebo		148,500,000	148,500,000	100.0 0	99 OB	100.0 0	



			- TINGKAT S1	Kab. Tebo		88,000,000	88,000,000	100.00	44 OB	100.00	
			BOP THL-TBPP	Kab. Tebo		57,600,000	57,600,000	100.00	150 OB	100.00	
			Honor PenyusunanProgram a THL-TBPP	Kab. Tebo		4,800,000	4,800,000	100.00	15 OK	100.00	
			BOP Penyuluh PNS	Kab. Tebo		145,920,000	132,480,000	90.79	414 OB	90.79	
			Honor Admin Simluhkec	Kab. Tebo		10,800,000	10,800,000	100.00	48 org/triwulan	100.00	
			Honor Admin SimluhKab	Kab. Tebo		720,000	720,000	100.00	4 org/triwulan	100.00	
			Honor PenjabKostarada	Kab. Tebo		1,400,000	1,400,000	100.00	4 triwulan	100.00	
			Honor OpperatorKostarada	Kab. Tebo		1,000,000	1,000,000	100.00	4 triwulan	100.00	
			BelanjMakanMinum Update data Simluhtan TK Kec	Kab. Tebo		6,000,000	6,000,000	100.00	10 BPP	100.00	
			Belanja ATK Validasi dan verifikasi data Simluhtan di Kecamatan	Kab. Tebo		2,400,000	2,400,000	100.00	12 BPP	100.00	
			Transportasi admin Simluhtan pada Keg Verval di Kab.	Kab. Tebo		2,400,000	2,400,000	100.00	12 BPP	100.00	
			Honor Fasilitator dalam Rangka Verval di kabupaten	Kab. Tebo		600,000	600,000	100.00	1 paket	100.00	
			Honor Narasumber Validasi dan verifikasi data Simluhtan	Kab. Tebo		1,500,000	1,500,000	100.00	1 paket	100.00	
			BelanjaMakanMinum Update data Simluhtan TK Kabupaten	Kab. Tebo		1,700,000	1,700,000	100.00	1 kali	100.00	
			Jumlah			9,308,692,000	8,244,081,090	88.56			

3.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Ketersediaan benih dengan jadwal tanam petani terkadang tidak sesuai, dimana petani ingin semai padi tetapi benih masih dalam proses pengadaan, sedangkan jika benih dari luar harus menunggu hasil uji;
2. Harga pupuk pada e-katalog yang tersedia tidak sesuai/pas dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA;
3. Ketersediaan benih Padi dan benih kedelai pada DIPA kg per hektarnya melebihi kebutuhan



3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Menggiatkan petani penangkar benih agar dapat membuat dan menyediakan stok benih sesuai dengan jadwal tanam
2. Menyampaikan kepada pusat tentang standar harga barang agar harga satuan barang dalam DIPA dapat masuk dalam e-katalog sehingga penggunaan anggaran dapat lebih diefektifkan.
3. Menyampaikan kepada pusat anggaran dalam menganggarkan benih
4. disesuaikan dengan kebutuhan benih di daerah sehingga penggunaan anggaran dapat lebih diefektifkan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tebo yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Pendidikan anak usia dini (PAUD);
- Pendidikan Dasar (SD);
- Pendidikan Menengah Pertama (SMP); dan
- Pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel IV.1 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	12.400	Orang	2022
2.	Pendidikan Dasar	40.584	Orang	2022
3.	Pendidikan Menengah Pertama	19.294	Orang	2022
4.	Pendidikan Kesetaraan	16.761	Orang	2022

4.1.3 Realisasi

Tabel IV.2 Relaisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	12.400	9.580	Orang	77.26
2.	Pendidikan Dasar				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	40.584	38.205	Orang	94.14
3.	Pendidikan Menengah Pertama				
	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP	19.294	16.761	Orang	86.87
4.	Pendidikan Kesetaraan				



	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar dan Menengah	16.761	952	Orang	5.68
--	---	--------	-----	-------	------

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tebo pada tahun 2022 sebesar **Rp.346.676.352.514,- (Tiga ratus empat puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah)** dari total belanja Langsung APBD sebesar **Rp.313.382.347.878,-(Tiga ratus tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)** jika dikalkulasikan ada **persentase sebesar 90,40%** anggaran yang di alokasi kan untuk penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Sedang total keseluruhan belanja langsung dan tidak langsung dengan rincian sebagai berikut:

APBD sebesar Rp. **313.382.347.878,-**

4.1.5 Dukungan Personil

Untuk pencapaian target SPM dinas Pendidikan dan kebudayaan memiliki dukungan personel terdiri dari tenaga fungsional guru 788 Guru PNS dan Honorer di PAUD, 1.158 Guru PNS dan 2.282 Guru Honorer di Sekolah Dasar, 558 Guru PNS dan 681 Guru Honorer di Sekolah Menengah Pertama, Sedangkan satuan Pendidikan terdiri dari Paud berjumlah 285 unit negeri dan swasta, Sekolah Dasar terdiri dari 250 unit negeri dan swasta sedangkan smp terdiri dari 60 sekolah negeri dan swasta dan PKBM terdiri dari 7 lembaga PKBM.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tebo secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternative pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

Acuan Data dari rapor mutu Pendidikan dan angka APK, APM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkendala terkait dengan rilis resmi dari pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan data tersebut setelah tahun anggaran berakhir ini yang menjadi kendala dalam evaluasi dan laporan

penerapan SPM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Dan selanjutnya permasalahan belum diterapkannya SPM yang berkaitan dengan biaya pribadi peserta didik bagi masyarakat yang tidak mampu.

b. Solusi

Solusi yang diharapkan pihak satuan Pendidikan, Pengawas, Penilik, LPMP, dan BPS agar dapat mempercepat mengeluarkan data rapormutu Pendidikan ataupun angka partisipasi sekolah, diharapkan bulan Februari tahun berikutnya setelah tahun anggaran berakhir dan terhadap permasalahan SPM yang berkaitan dengan biaya pribadi peserta didik yang tidak mampu akan dibuat program dan kegiatan di dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja Pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiapTahun.

Tabel IV.3 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.965	Orang	2022



2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.649	Orang	2022
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.921	Orang	2022
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	24.642	Orang	2022
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	55.075	Orang	2022
6.	Pelayanan Pada Usia Produktif	232.122	Orang	2022
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	36.354	Orang	2022
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80.274	Orang	2022
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)	2.416	Orang	2022
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	649	Orang	2022
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.457	Orang	2022
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan tubuh	6.197	Orang	2022

4.2.3 Realisasi

Tabel IV.4 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	6.965	6.342	Orang	91.06
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	6.649	5.836	Orang	87.77
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan layanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	5.921	5.932	Orang	100.19
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	24.642	21.303	Orang	86.45
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55.075	37.651	Orang	68.36



6.	Pelayanan Pada Usia Produktif				
	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	232.122	202.446	Orang	87.22
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	36.354	33.037	Orang	90.88
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	Jumlah penderita hipertensi usia > 15 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80.274	63.571	Orang	79.19
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)				
	Jumlah penderita diabetes militus usia > 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2.416	3.008	Orang	124.50
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	649	630	Orang	97.07
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.457	2.143	Orang	87.22
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan tubuh				
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.197	3.537	Orang	57.08

4.2.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saipuddin Kabupaten Tebo dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Tebo sebesar **Rp. 7.641.082.014 (Tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu empat belas rupiah)** yang terdiri dari program rutin, teknis, DAK dan BLU.

4.2.5 Dukungan Personil

Personil yang melaksanakan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo sebagai berikut :

Tabel IV.5 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pegawai		Ket
		Dokter	Perawat/Bidan/LL	
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	41	262	



2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	41	262	
3.	Pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir	41	262	
4.	Pelayanan Kesehatan pada balita	41	262	
5.	Pelayanan Kesehatan pada anakusia Pendidikan dasar	47	784	
6.	Pelayanan Kesehatan pada warga negara usia 15-59 tahun	7	58	
7.	Pelayanan Kesehatan pada warga negara usia 60 tahun	41	755	
8.	Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi	7	58	
9.	Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus	7	58	
10.	Pelayanan Kesehatan pada penderita ODGJB	22	50	
11.	Pelayanan Kesehatan pada orngterduga TBC	20	34	
12.	Pelayanan Kesehatan pada orang beresiko HIV	20	38	

Pesonil yang melaksanakan Urusan Kesehatan pada RSUD STS Kabupaten Tebo sebagai berikut :

Tabel IV.6 Jumlah Pegawai RSUD

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket
1	2	3	4
1.	Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan: - SD - SMP - SMA Sederajat - Sarjana Muda (D.I-D.III) - S-1 dan D-IV - S2 - S3	- - 15 121 51 17 -	
2.	Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan: - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV	1 44 151 8	
3.	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan: - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Eselon V	- 4 7	



	- Jabatan Fungsional	-	
	- Staf (termasuk CPNS)	193	
		-	
	Jumlah	204	

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Masih kurangnya kesadaran pada ibu hamil untuk melakukan kunjungan ulangan K4.
- Masih adanya daerah yang memiliki akses jalan yang rusak menuju fasilitas Kesehatan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melahirkan di Fasyankes.
- Pada masa pandemic membatasi kunjungan kepada kelompok Resti.
- Dikarenakan Masa Pandemi mengakibatkan Kunjungan Balita ke Posyandu jadi Berkurang.
- Masih dalam situasi Pandemi sehingga kegiatan belajar dan mengajar tidak seperti biasanya sehingga Pelayanan kesehatan pada Pendidikan Dasar tidak mencapai 100%.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan.
- Masa Pandemi mengakibatkan Kunjungan lansia ke Posyandu jadi Berkurang.
- Belum semua penderita dilayani di masa pandemi dan penderita akan mengunjungi faskes bila ada gejala yang dirasakan.
- Belum semua penderita dilayani di masa pandemi dan penderita akan mengunjungi faskes dan masih kurangnya pengadaan stik untuk pemeriksaan gula darah.
- Belum semua sasaran dapat di temukan dan masih terbatasnya jumlah tenaga Laboratorium yang ada di Puskesmas.
- Belum semua kelompok resiko dilakukan skrining HIV di karenakan sulitnya menemukan sasaran orang yang beresiko HIV.

b. Solusi

- Mengajukan untuk melengkapi Sarana dan Prasarana, melakukan Penyuluhan kepada ibu akan pentingnya untuk memeriksakan Kehamilanya.
- Mengajukan untuk melengkapi Sarana dan Prasarana, melakukan Penyuluhan kepada ibu akan pentingnya melahirkan di Fasyankes dan membentuk kader siaga untuk membantu ibu hamil bersalin ke Fasyankes.
- Melakukan kunjungan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- Petugas akan melakukan kunjungan rumah untuk mengatasi Masalah tersebut dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan.
- Melakukan Pemantauan kesehatan secara Online.

- Seksi P2PTM akan membuat kesepakatan dengan pemegang program yang ada di Puskesmas untuk melaksanakan dan lebih aktif untuk melakukan kegiatan kepada sasaran Usia Produktif.
- Petugas akan melakukan kunjungan rumah untuk mengatasi Masalah tersebut dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan.
- Petugas akan melakukan kegiatan posbindu secara rutin sehingga semua penderita dapat terlayani sesuai dengan standar.
- Melakukan bimbingan Teknis kepenanggungjawab program Puskesmas sehingga sasaran tercapai dan mengajukan pengadaaan untuk alkes pemeriksaan Gula darah.
- Meningkatkan bimbingan teknis pelaporan TB kepada Petugas TB Puskesmas dan Rumah Sakit dan Mengadakan pelatihan bagi petugas pengelola Program Puskesmas dan RumahSakit.
- Melakukan penyuluhan tentang penyakit HIV terutama Penularannya, akan melakukan skinning terpadu pada semua kelompok beresiko terinfeksi HIV dan akan melakukan pendekatan kepada Tokoh Masyarakat Agar Penderita tidak di diskriminasikan.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiapTahun.

Tabel IV.7 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	65.63	%	2022
2.2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	87.81	%	2022

4.3.3 Realisasi

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah KabupatenTebo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.8 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Satuan
	Indikator	Target	Realisasi	
1.1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	65.63	75,00	%
2.2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	87.81	93,31	%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Tebo sebesar **Rp.38.111.744.840 (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

- a. Jumlah Pegawai Keseluruhan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR TA 2022

Tabel IV.9 Jumlah Pegawai Bidang Cipta Karya

No	Bidang	Eselon			Staf PNS	Honor	TKS	Jumlah
		II	III	IV				
1	Cipta Karya	-	1	-	7	5	13	-

- b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel IV.10 Komposisi Pegawai Bidang Cipta Karya berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Teknik	Non Teknik	Jumlah	Ket.
1	S2	2	-	2	
2	S1	2	2	4	
3	D.3.	3	-	3	
4	SLTA	-	4	4	
5	SLTP	-	-	-	
6	SD	-	-	-	
	J UML AH	7	6	13	

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah- langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh Secara umum permasalahan yang dihadapi Bidang Cipta Karya terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

1) *Permasalahan Internal*

- a) Sumber daya personil belum memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas untuk focus penanganan pelayanan air minum



dan sanitasi/limbah domestik

- b) Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya alokasi anggaran/APBD

2) *Permasalahan Eksternal*

- a) Belum sinerginya upaya implementasi SPM

Salah satu permasalahan pokok yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan sektoral minum dan sanitasi/limbah domestik di Kabupaten Tebo adalah belum adanya sinergi dariseluruh komponen masyarakat dalam penanganan penyediaan air minum dan sanitasi. Seluruh komponen pemangku kepentingan baik ditingkat eksekutif dan legislative disemua level harus memiliki pemahaman yang sama serta berkomitmen penuh dalam upaya penanganan. Penuntasan SPM dua sub sector tersebut sangat tidak memadai apabila hanya bertumpu pada Bidang Cipta Karya saja.

- b) Akurasi ketersediaan data

Sebagai salah satu komponen paling menentukan maka data penyediaan air minum dan air limbah domestik menjadi faktor penentu peningkatan capaian pelayanan. Kebijakan yang tepat hanya dapat dilakukan apabila didasari data yang valid dan *up to date*. Personil Bidang Cipta Karya yang hanya 13 orang sangat tidak memadai untuk penyediaan data sebagaimana diharapkan. Keterlibatan berbagai komponen masyarakat khususnya penyelenggara Pemerintahan sampai level terendah ditingkat desa/kelurahan sangat menentukan akurasi penyiapan data. Komitmen bersama menjadi kata kunci dalam upaya tersebut.

- c) Alokasi Pendanaan belum memadai

Meskipun bukan satu-satunya faktor penting, aspek pendanaan memegang peran utama dalam pelaksanaan penuntasan pelayanan sector air minum dan air limbah. Alokasi pendanaan yang bahkan setelah ada tambahan pendanaan yang ditopang melalui Dana Alokasi Khusus(DAK), Hibah dan HID belum mencukupi dari kebutuhan pendanaan yang diproyeksikan diawal penyusunan Renstra turut berakibat pada belum terpenuhinya target pelayanan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah. Belum lagi ditambah kondisi bahwa asumsi-asumsi serta beberapa parameter yang ditetapkan pada saat penyusunan Renstra tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta ketersediaan rincian data yang tidak memadai.

b. Solusi

Dari berbagai permasalahan yang ada, komitmen bersama untuk bersama-sama melakukan langkah besar untuk mengupayakan

pemenuhan target pelayanan air minum dan air limbah menjadi kunci pokok pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ketentuan yang ada.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Adapun Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.11 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	--	--	2022
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	--	--	2022

4.4.3 Realisasi

Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.12 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Daerahan Th. 2022	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	80%	--	--
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik			
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	80%	--	--

4.4.4 Alokasi Anggaran

Jumlah total keseluruhan belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo pada Tahun 2022 sebesar **Rp.20.103.144.575,- (Dua Puluh Milyar Seratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Empat Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Rupiah)** yang bersumber dari APBD.

4.4.5 Dukungan Personil

Adapun personil dan pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2022 adalah sebanyak 12 orang, sebagai berikut :

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2022, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala, diantaranya sebagai berikut :

- Banyaknya masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai khususnya sungai batanghari.
- Rendahnya alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo.

b. Solusi

Adapun solusi yang ditempuh guna menghadapi permasalahan tersebut diatas diantaranya :

- Segera melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal disempadan sungai.
- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar menaikkan alokasi anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo dimasa yang akan datang.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah:
 - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum

- b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:
- Pelayanan informasi Rawan Bencana
 - Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- c. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM Daerah

- a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

Tabel IV.13 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Terlaksananya Pengamanan dalam Kegiatan Masyarakat	100	%	2022
2.	Meningkatkan Trantibum dan Tranmas	100	%	2022
3.	Terlaksananya Sosialisasi Bagi Linmas	100	%	2022

- b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

Tabel IV.14 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Pelayanan informasi Rawan Bencana	100	Persen	2022
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan	100	Persen	2022
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Persen	2022

- c. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

Tabel IV.15 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	2022

4.5.3 Realisasi

- a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi PamongPraja adalah:

Tabel IV.16 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Terlaksananya Pengamanan dalam Kegiatan Masyarakat	100	100	2022
2.	Meningkatkan Trantibum dan Tranmas	100	98	2022
3.	Terlaksananya Sosialisasi Bagi Linmas	100	100	2022

- b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

Tabel IV.17 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Pelayanan informasi Rawan Bencana			
	Persentase masyarakat yang mengetahui informasi rawan bencana	100%	84,04%	2022
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan			
	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	80,00%	2022
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Persentase masyarakat yang terselamatkan	100%	30.00%	2022

- c. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

Tabel IV.18 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	Tingkat waktut anggap (respon time rate)	30	26	2022

4.5.4 Alokasi Anggaran

- a. Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah total keseluruhan belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo pada Tahun 2022 sebesar **Rp.849.840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** yang bersumber dari APBD.
- b. Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah total keseluruhan belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun 2022 sebesar **Rp.4.100.755.122,- (Empat Milyar Seratus Juta Tujuh**

Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari APBD.

- c. Organisasi Perangkat Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Jumlah total keseluruhan belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo pada Tahun 2022 sebesar **Rp.8.514.585.696,- (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)** yang bersumber dari APBD.

4.5.5 Dukungan Personil

- a. Satuan Polisi Pamong Praja

Sampai dengan tahun 2022 personil aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo berjumlah 145 orang yang terdiri dari 30 orang PNS dan 115 orang pegawai honorer/tidak tetap. bila dilihat dari golongan ruang dan kepangkatan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel IV.19 Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja

No	Golongan	Eselon	Jumlah
1	IV.c	II.b	1
2	IV.a	III.b	2
3	III.d	IV.a	5
4	III.c	IV.a	2
5	III.b	-	2
6	III.a	-	5
7	II.d	-	12
8	II.b	-	1
9	Tenaga Kontrak	-	115
Total Keseluruhan			145

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sampai dengan tahun 2022 personil aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo berjumlah 59 orang yang terdiri dari 18 orang PNS dan 41 orang pegawai honorer/tidak tetap.

Tabel IV.20 Jumlah Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jabatan	Kalsifikasi Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	
1	Struktural	4	8		9		21
2.	Honorer/PTT		5		33		38

- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sampai dengan tahun 2022 personil aparatur pemadam kebakaran berjumlah 142 orang yang terdiri dari 27 orang PNS dan 115 orang pegawai honorer/tidak tetap, bila dilihat dari golongan ruang dan

kepangkatan aparatur pemadam kebakaran dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel IV.21 Jumlah Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Jabatan	Kalsifikasi Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1	Struktural	1	8		1			10
2	Staf Adm		2	1	5			8
3.	Staf Pelaksana	1		9	11	3	1	12
4.	Honorar/PTT		21	10	106	3	1	112
Total								142

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) OPD Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

- Lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga/instansi terkait mengenai penanggulangan bencana.
- Kendala Pemadaman KARHUTLA, karena lokasi sulit dijangkau
- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar
- Rendahnya kepedulian masyarakat secara sukarela terhadap bahaya KARHUTLA
- Lambatnya upaya Mitigasi bencana
- Kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian sarana dan prasarana pengendalian KARHUTLA

- 3) OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi unit kerja pemadam kebakaran Kabupaten Tebo pada saat kinerja baik oleh sebagian masyarakat memang cukup klasik, diantara lain:

- Kesulitan mencapai lokasi kebakaran yang disebabkan jauhnya jarak tempuh dan kondisi wilayah yang rural.
- Volume kendaraan / lalulintas makin padat dan perilaku pengguna jalan
- Kondisi lingkungan yang tidak menunjang operasional pemadam kebakaran, seperti minimnya reservoir, penataan bangunan dan budaya masyarakat.
- Kurangnya peralatan pemadam kebakaran.

b. Solusi

1) OPD Satuan Polisi iPamong Praja

2) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam mengatasi permasalahan yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya meningkatkan pelayanan dengan berbagai cara diantaranya:

- Menjalinkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi mengenai penanggulangan bencana.
- Mengadakan kerjasama dengan masyarakat disekitar pelaku usaha.
- Memberikan sosialisasi tentang menangani KARHUTLA.
- Membentuk dan memberikan binaan kepada masyarakat peduli api.
- Meningkatkan sosialisasi mitigasi dan upaya penanggulangan bencana.
- Memberikan pelatihan pengoperasian sarana dan prasarana pengendalian KARHUTLA.

3) OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam mengatasi permasalahan yang ada pada UPT pemadam kebakaran telah berupaya meningkatkan pelayanan dengan berbagai cara diantaranya:

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebakaran.
- Menambah armada pemadam kebakaran volume 5000 liter sesuai yang dipersyaratkan dalam standar SPM.
- Rekrutmen dan pendidikan pelatihan petugas pemadam kebakaran.
- Menekankan strategi pencegahan melalui himbauan poster /spanduk, leaflet, koran, radio tv lokal, melakukan penyuluhan, pembentukan satlakar dan inspeksi bangunan.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

- Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- Perlindungan dan Jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

4.6.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiapTahun.

Tabel IV.22 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100 %	Tahun 2022
2.	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100 %	Tahun 2022
3.	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100 %	Tahun 2022
4.	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti	100 %	Tahun 2022
5.	Perlindungan dan Jaminan social pada saattanggap dan pascabencana bagi korban bencana	Jumlahwarga Negara korban bencanakab/kota yang memperolehperlindungan dan jaminansosial	100 %	Tahun 2022

4.6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Tebo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.23 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No.	JenisPelayanan Dasar	IndikatorPencapaian	Target Capaian (Jiwa)	Realisasi Capaian (Jiwa)	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	50	156	Tahun 2022
2.	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luarpanti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	50	50	Tahun 2022



3.	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	250	180	Tahun 2022
4.	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti	-	-	Tahun 2022
5.	Perlindungan dan Jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	200	1215	Tahun 2022

4.6.4 Alokasi Anggaran

Jumlah keseluruhan anggaran yang dipergunakan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tebo pada tahun 2022 sebesar **Rp. Rp. 6.455.103.270,- dari anggaran sebesar Rp. 6.566.316.737,-**

4.6.5 Dukungan Personil

- a. Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial sejumlah 111- orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH sebanyak 40 Orang, Pendamping BPNT 1 Orang, Sakti Peksos 2 orang, 12 TKSK, 55 TAGANA, 1 PSM Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat Kabupaten Tebo yang menangani Orang Terlantar, Orang dengan Tempat Tinggal Tidak Tetap, Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya.
- b. Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak **41 Orang**.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di tengah Bencana Luar Biasa Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) sehingga kurang tercapai target.
 - Adanya pengalihan/pembatasan Anggaran dan diberlakukannya Work From Home (WFH), Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Social Distance sehingga kurang optimalnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - Bertambahnya jumlah keluarga miskin dikarenakan meluasnya dampak bencana Corona Virus Disease (COVID-19).



- Kurang updatenya data base kemiskinan di Kabupaten Tebo sehingga menjadi hambatan dalam menghitung total data kemiskinan.
- Pola hidup Suku Anak Dalam (SAD) yang tidak menetap / Nomaden, sehingga mempengaruhi pemberdayaan SAD di Kabupaten Tebo.
- Akurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kurang valid, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan.
- Belum adanya panti resmi Pemerintah Kabupaten Tebo, sehingga kegiatan rehabilitasi social dalam panti terhambat.
- Rendahnya alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.
- Belum semua PMKS dapat menerima bantuan karena masih terbentur dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus memiliki badan hukum dan penerima bantuan harus masuk dalam Basis Data Terpadu.
- Acuan target yang digunakan sudah terlalu lama yaitu target tahun 2017, seharusnya diperbarui karena sudah tidak sesuai dengan realitanya sekarang ditahun 2022. Hal itu membuat kurang adanya pergerakan untuk meningkatkan target Standar Pelayanan Minimal ditahun selanjutnya.
- Definisi operasionalnya dari Standar Pelayanan Minimal itu sendiri dirasa kurang begitu jelas, karena realitanya masih ada persepsi yang berbeda dari tiap orang yang terkesan juga masih membingungkan.

b. Solusi

- Segera melakukan Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tebo dan saat ini menunggu verifikasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana diunduh melalui aplikasi [Siks.Kemsos.go.id](https://siks.kemsos.go.id) Tanggal 05 Oktober 2022.
- Menyediakan tempat dan lokasi khusus pemukiman Suku Anak Dalam (SAD), sehingga SAD dapat menetap di suatu tempat.
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bagi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), serta meningkatkan kesejahteraan TKSK di Kabupaten Tebo.
- Membangun panti resmi Pemerintah Kabupaten Tebo.
- Mengajak masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Mengajak masyarakat untuk dapat membentuk LKS dan LKSA mandiri.

- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar menaikkan alokasi anggaran untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dimasa yang akan datang.
- Menunggu aturan yang jelas sehingga dapat mengakomodir penerima bantuan.
- Calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu diusulkan melalui mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu.
- Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendaftarkan dan mengajukan izin.
- Dengan permasalahan tersebut, maka perlu diadakannya pertemuan atau koordinasi kembali membahas pembaruan terkait dengan target maupun definisi operasional Standar Pelayanan Minimal. Dalam menyusun pembaruan Standar Pelayanan Minimal itu perlu melibatkan Instansi yang berkompeten didalamnya agar target capaiannya relevan dengan realitanya.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.24 Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan

Uraian Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Persen (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 218,989,268,967	Rp 192,152,840,868	87.74%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 975,000,000	Rp 921,550,600	99.29%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 200,000,000	199,530,000	99.77%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 50,000,000	49,750,000	99.50%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp. 50,000,000	49,9100,000	99.82%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 50,000,000	50,000,000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 50,000,000	48,934,650	98,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 500,000,000	494,950,000	97.89%



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 75,000,000	75,000,000	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 214,032,266,857	Rp 187,499,782,404	87,60%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 214,982,266,857	Rp 187,499,782,404	87,60%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 50,000,000	49,860,000	99.72%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 150,000,000	Rp 118,739,000	79,15%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 150,000,000	118,739,000	79.15%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,272,200,000	Rp 1,269,644,037	99.79%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 93,600,000	Rp 93,600,000	100.00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 350,000,000	349,320,000	99.80%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 95,000,000	95,000,000	100.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 184,600,000	Rp 184,600,000	100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 80,000,000	78,200,000	97,75%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000	100.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 394,000,000	393,923,677	99.38%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,983,802,110	Rp 1,756,851,639	88.55%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 803,802,200	743,802,200	92.25%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 224,659,910	Rp 102,010,041	44.96%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 955,340,000 955,340,000	911,039,398 911,506,398	95.36%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 576,000,000	Rp 539,749,138	93.71%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 401,000,000	364,749,138	93.71%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 175,000,000	175,000,000	100.00%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 120,449,578,487	Rp 111,639,375,801	92.69%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 75,061,889,674	Rp 68,309,773,167	91.00%



Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp 1,003,904,000	981,258,772	97.74%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 193,000,000	190,370,000	98.64%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 29,961,251,210	29,649,623,275	99.96%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 200,000,000	191,600,000	95.80%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 850,000,000	788,591,139	92.78%
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 500,000,000	493,419,000	98.68%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp 175,000,000	168,772,380	99.40%
Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 500,000,000	493,419,000	94.07%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp 175,000,000	168,772,380	96.44%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp 0	0	0
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rp 491,686,900	491,311,900	99.92%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 303,172,000	276,906,810	91.34%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 195,000,000	180,383,920	92.50%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 120,000,000	119,636,700	99.70%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 40,728,875,564	34,437,939,280	84.55%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 340,000,000	339,960,000	99.99%
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Rp		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 32,189,762,863	Rp 31,429,723,004	97,64%
Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp 1,459,270,000	1,157,915,295	79.35%
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Rp 650,000,000	627,730,911	96.57%
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 416,000,000	Rp 411,732,000	98.99%
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 15,214,086,100	14,890,896,681	97.86%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Rp 0	0	0



Guru Sekolah			
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp 0	0	0
Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 346,000,000	Rp 340,000,000	98,27%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp 75,000,000	75,000,000	100%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp 200,000,000	192,000,000	96%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	102,982,080	80,354,120	78,03%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 312,203,360	Rp 293,310,500	93,95%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 200,000,000	182,657,021	91,33%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 150,000,000	Rp 145,519,159	97.01%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 12,410,501,110	12,391,345,104	99,85%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 653,720,213	Rp 640,442,213	97,97%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 11,015,325,950	Rp 9,754,712,290	91.83%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 3,832,865,950	3,739,613,673	97,57%
Pengadaan Mebel PAUD	Rp 500,000,000	118,216,480	23,64%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp 200,000,000	199,938,800	99,97%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Rp 400,000,000	351,000,000	87,75%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp 285,860,000	262,118,000	91,69%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Rp 150,000,000 75,790,000	134,648,147 51,890,000	89,76%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp 172,000,000	171,722,180	99,84%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp 215,000,000	186,094,900	86,56%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 150,000,000	147,280,000	98,19%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp		86,69%



	5,109,600,000	4,444,080,110	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 2,182,600	Rp 2,145,167,340	94.27%
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 50,000,000	49,961,240	99,92%
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Rp 450,000,000	438,579,300	97.50%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 100,000,000	99,798,000	99,80%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 160,000,000	149,618,800	93,51%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 100,000,000	99,980,000	99,98%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 1,322,600,000	1,307,050,000	98,82%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp 500,000,000	Rp 457,068,084	91,31%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp 300,000,000	Rp 289,560,084	96,52%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp 300,000,000	289,560,084	96,52%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 200,000,000	Rp 167,507,424	83,75%
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 200,000,000	167,507,424	83,75%
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp -	-	0.00%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 2,865,500	Rp 2,787,036,000	97,26%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 2,865,500,000	Rp 2,787,036,000	97,26%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 2,865,500,000	2,787,036,000	97,26%
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp 2,005,350,000	Rp 1,949,643,044	97,22%
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 2,005,350,000	Rp 1,949,643,044	97,22%



Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 2,005,350,000	1,949,643,044	97,22%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 1,866,655,060	Rp 1,865,646,110	99.95%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,866,655,060	Rp 1,865,646,110	99,95%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp 546,212,500	545,424,200	99,86%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp 120,000,000	119,918,600	99.99%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 120,000,000	Rp 119,997,800	99.88%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Rp 120,000,000	119,997,800	99.88%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 311,500,000	Rp 311,442,150	99,99%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Rp 311,500,000	311,442,150	99.99%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp 493,942,560	Rp 493,942,560	100%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 493,942,560	Rp 493,942,560	100%
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp 493,942,560	493,942,560	100%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 275,000,000	Rp 274,920,800	9997%
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp 275,000,000	Rp 274,920,800	99.97%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rp 100,000,000	100,000,000	100%
Jumlah	Rp. 346,676,352,514	Rp. 313,382,347,878	94.82%

4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel IV.25 Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	1.084.671.300	998.155.344	92
	Cakupan Pelayanan ibu bersalin sesuai standar	955.320.320	44.145.754	5



	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	200.907.300	185.315.040	92
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	911.416.540	859.721.500	94
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	1.137.152.020	1.102.780.500	97
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) sesuai standar	657.969.040	629.178.160	96
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun keatas) sesuai standar	534.689.820	501.921.051	94
	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar	52.039.910	49.682.237	95
	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes militus sesuai standar	1.122.393.700	1.052.089.580	94
	Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar	229.902.950	209.897.413	91
	Cakupan pelayanan kesehatan pada orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	525.714.620	501.177.520	95
	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar	228.904.494	220.073.334	96
	Jumlah	7.641.082.014	6.354.137.443	83

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.26 Program Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum

PROGRAM KEGIATAN	PENDANAAN APBN (Juta)	PENDANAAN APBD
PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	9.606.661.000	13.740.481.840
PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH	5.079.329.000	9.885.273.000
JUMLAH	14.586.990.000	23.625.754.840

4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.27 Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Perumahan			
	-Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	99.967.510,-	57.309.200,-	57.33



	-Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	69.997.599,-	65.769.500,-	93.95
2.	Program Kawasan Permukiman			
	-Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	0.00,-	0.00,-	0
	-Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	145.830.410,-	121.730.600,-	84.47
3.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.617.196.820,-	18.363691.081,-	98.67
4.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
	-Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.283.896.241,-	10.218.775.797,-	95.31
	JUMLAH TOTAL	29.262.870.131,-	28.827.276.178,-	98.51

4.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel IV.28 Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

U r a i a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah Kabupaten /Kota			
Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan ,pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	849.840.000	849.840.000	100
Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa	253.800.000	248.875.000	98.05
JUMLAH	1.103.640.000,-	1.098.715.000,-	98

b. Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel IV.29 Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program / Kegiatan	Pagu Dana
1	Program Penanggulangan Bencana	
	• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	34.309.840
	• Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.231.889.490
	• Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	657.982.000
	• Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Membakar (DBH DR)	121.500.000

c. Program Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel IV.30 Program Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program / Kegiatan	Pagu Dana
1	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
	• Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota	1.712.550.000
	• Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	248.520.000
	• Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	18.600.000
	Inspeksi Peralatan Pencegahan Kebakaran	
	• Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	5.250.000
	• Penilaian Sarana dan Prasarana Pencegahan	4.410.000
	Investigasi kejadian kebakaran	
	Investigasi kejadian kebakaran penelitian dan pengujian penyebab kebakaran	15.000.000
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	
	• Sosialisasi dan edukasi masyarakat	15.000.000

4.7.6 Bidang Urusan Sosial

Program kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Tebo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.31 Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial

URUSAN/BIDAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.566.316.737	6.455.103.270	98.31%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.937.955.847	3,865.165.666	98.15%
Perencanaan ,Panganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.349.940	13.234.500	99.14%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.349.940	13.234.500	99.14%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.985.240.273	2.922.888.740	97.91%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.869.501.873	2.808.379.740	97.87%
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	115.738.400	114.509.000	98.94%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.999.690	33.955.900	99.87%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.999.690	33.955.900 14,940,000	83.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.205.850	381.132.317	99.72%



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,985,860	4,982,500	99.93%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.010.030	41.924.500	99.80%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	59.859.700	99.77%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.289.960	24.199.300	99.63%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	5.040.000	87.50%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.160.000	20.150.000	99.95%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	224.976.317	99.99%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	178,240,692	164,973,956	92.56%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.004.150	33.943.299	84.85%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135,940,394	133.319.999	98.07%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.791.550	308.290.111	99.84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.599.760	19.241.050	98.17%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.766.990	250.651.811	99.95%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.424.800	38.397.250	99.93%
Penataan Organisasi	38.424.000	38.400.800	99.94%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	38.424.000 9,248,000	38.400.800	99.94%
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN SOSIAL	2.129.978.590	2.094.112.181	98.31%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	145.065.720	144.405.060	99.54%
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	145.065.720	144.405.060	99.54%
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	145.065.720	144.405.060	99.54%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	248.252.180	247.195.880	99.55%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	227.292.300	226.275.180	99.55%
Penyediaan Permakanan	148.292.300	148.182.700	99.93%
Penyediaan Alat Bantu	79.000.000	78.092.480	98.85%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-	-	0.00%
Pemberian Layanan Rujukan	-	-	0.00%



Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	20.959.880	20.920.700	99.81%
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA	20.959.880	20.920.700	99.81%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.298.389.270	1.289.403.791	99.31%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.298.389.270	1.289.403.791	99.31%
Penyediaan Makanan	-	-	0.00%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.208.035.480	1.206.669.991	99.89%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90.353.790	82.733.800	91.57%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	347.977.94.	325.335.550	93.49%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	200.977.940	178.398.750	88.77%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	52.645.000	52.613.450	99.94%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	147.000.000	146.938.800	99.96%
Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	147.000.000	146.938.800	99.96%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	90.293.480	87.671.900	97.10%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	90.293.480	87.671.900	97.10%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	90.293.480	87.671.900	97.10%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	498.382.300	495.925.423	99.51%
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	326.206.150	323.976.968	99.32%
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	89.236.000	88.539.699	99.22%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	71.816.000	71.305.899	99.29%
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	17,420.000	17.233.800	98.93%



Pemberdayaan perempuan bidang politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pda Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	166.073.610	164.791.069	99.23%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	166.073.610	164.791.069	99.23%
penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupate/Kota	70.896.540	70.646.200	99.65%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.896.540	70.646.200	99.65%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	40.136.230	40.080.600	99.86%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.136.230	40.080.600	99.86%
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40.136.230	40.080.600	99.86%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	132.039.920	131.867.855	99.87%
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	24.170.490	24.082.200	99.63%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.170.490	24.082.200	99.63%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.869.430	107.785.655	99.92%
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.869.430	107.785.655	99.92%
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13.349.940	13.234.500	99.14%
Evaluasi kinerja perangkat daerah	13.349.940	13.234.500	99.14%
Administrasi keuangan perangkat daerah	2.985.240.273	2.922.888.740	97.91
Penyediaan gaji dan tunjangan asn	2.869.501.873	2.808.379.740	97.87



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tebo merupakan gambaran kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Sistematika yang disesuaikan dalam laporan ini pada dasarnya melaporkan seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Laporan ini disajikan dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran ini adalah merupakan cerminan adanya kerjasama yang baik antara Eksekutif, Legislatif dan Instansi vertikal serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tebo. Diharapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tebo ini dapat menjadi acuan atau tolak ukur bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tebo dalam peningkatan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Disadari bahwa laporan ini disusun masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka oleh sebab itu diharapkan pembinaan yang lebih intensif oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi yang pada akhirnya laporan ini dapat lebih sempurna dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik di masa – masa yang akan datang.

Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

LAMPIRAN III.3
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
URUSAN WAJIB							
	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	9580	DIKBUD/ DUKCAPIL	
----- X 100%				-----X 100 %	77.26%		
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	12400		
		1	Output	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	274		
		2		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	500		
		3		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0		
		4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	0		
		5		Jumlah pendidik pada PAUD	685		
		6		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	235		
		7		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	131		
		2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	38205	DIKBUD/ DUKCAPIL
----- X 100%					-----X 100 %	96.36%	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	39649		
		1	Output	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	316		
		2		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	420		
		3		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	150		
		4		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	35160		
		5		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9944		
		6		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2485		
		7		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	948		
	8		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1232			
	9		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	516			

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7		
1		10		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	237			
		11		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	166			
		12		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	35			
		13		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	40			
		14		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	649			
		15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	368			
		16		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	137			
		17		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	58			
		18		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	129			
		19		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	179			
		3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- X 100% -----X 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	16761	86.87%	DIKBUD/ DUKCAPIL
		1		Output	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	299		
		2			Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
		3			Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		
		4			Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	37701		
		5			Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	16409		
		6			Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2445		
		7			Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	946		
		8			Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1232		
		9		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	445			
		10		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	237			

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		11		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	60	
		12		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	35	
		13		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	52	
		14		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1854	
		15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	982	
		16		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	222	
		17		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	58	
		18		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	155	
		19		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-	<p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan</p>	<p>952</p> <p>-----X 100 %</p> <p>16761</p>	<p>5.68%</p> <p>DIKBUD</p>
		1	Output	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	7	
		2		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	0	
		3		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3022	
		4		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	7	
		5		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	203	
		6		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	146	
		7		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	137	
		8		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
Kesehatan		5	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{146}{350234} \times 100\% = 0.04\%$	Dinkes/dukcapil	
		1	Output	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2		
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100.00\%$	DINKES	
		1	Output	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2		
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{6342}{6965} \times 100\% = 91.06\%$	Dinkes	
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	544		
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{5836}{6649} \times 100\% = 87.77\%$	Dinkes	
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	544		
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{5836}{6649} \times 100\% = 87.77\%$	Dinkes	
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	544		
		10	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{21303}{24642} \times 100\% = 86.45\%$	DIKBUD	
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standa	544		
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{37651}{55075} \times 100\% = 68.36\%$	Dinkes	
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0		
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	20		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5		6	7	
2		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	202025	87.03%	Dinkes/Dukcapil	
				----- X 100%	-----X 100 %			
					Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	232122		
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0			
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	288			
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33037	90.88%	Dinkes/Dukcapil	
				----- X 100%	-----X 100 %			
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	36354			
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0			
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	288			
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63571	79.19%	Dinkes	
				----- X 100%	-----X 100 %			
				Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	80274			
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0			
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	288			
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3008	124.50%	Dinkes	
----- X 100%	-----X 100 %							
		Jumlah penderita DM di Kabupaten	2416					
1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0					
2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	288					
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	630	97.37%	Dinkes			
		----- X 100%	-----X 100 %					
		Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	647					
1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0					
2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40					

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<p>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah penderita TBC di Kabupaten</p>	<p>2143</p> <p>-----X 100 %</p> <p>2457</p>	<p>87.22%</p> <p>Dinkes</p>
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten</p>	<p>3537</p> <p>-----X 100 %</p> <p>6197</p>	<p>57.08%</p> <p>Dinkes</p>
		1	Output	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	0	
		2		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40	
	Pekerjaan Umum	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)</p> <p>----- X 100%</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)</p>	<p>78</p> <p>----- X 1</p> <p>5146,24</p>	<p>1.52%</p> <p>PERKIM/PUPR</p>
		1	Output	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	5146,24	
		2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	481	
		3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	
		4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	
		5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	
		6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	
		7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	<p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)</p> <p>-----</p> <p>X 10000%</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)</p>	<p>0</p> <p>----- X 1</p> <p>0</p>	Tidak Ada / Suket	Kab. Tebo Tidak memiliki kawasan pesisir
		1	Output	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	5146,24		
		2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	481		
		3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		
		4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0		
		5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0		
		6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0		
		7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0		
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	<p>Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting</p> <p>-----</p> <p>X 100%</p> <p>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten</p>	<p>5874</p> <p>----- X 1</p> <p>9003</p>	65.24%	PUPR
		1	Output	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	-		
		2		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	-		
		3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	-		
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	<p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.</p> <p>-----</p> <p>X 100%</p> <p>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten</p>	<p>64128</p> <p>----- X 1</p> <p>98147</p>	65.34%	PUPR

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		1	Output	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	-	
		2		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	-	
		3		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	-	
		4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-	
		5		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	-	
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah rumah di Kabupaten</p>	<p>86186</p> <p>----- X 1</p> <p>98147</p>	<p>PUPR</p> <p>87.81%</p>
		1	Output	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	-	
		2		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	-	
		3		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	-	
		4		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-	
		5		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-	
		6		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-	
		7		<p>Σ rumah yang memiliki akses seperti cubluk/septi tank</p> <p>0</p> <p>----- x 1</p> <p>0</p> <p>Σ rumah diwilayah pengembangan SPALD pada wilayah terbangun (< dri 25 jiwa/ha)</p>		
			Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar			

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
3		8		<p>Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman</p> $\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya sudah di olah di IPLT}}{\sum \text{rumah diwilayah pengembangan SPALD pada wilayah terbangun (> dri 25 jiwa/ha)}} \times 1$		
		9		<p>Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman</p> $\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan air dan limbahnya di olah di IPLD}}{\sum \text{rumah diwilayah pengembangan SPALD T}} \times 1$		
		10		<p>Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat</p> $\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{rumah diwilayah pengembangan SPALD S}} \times 1$		
		11		<p>Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja</p> $\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang di butuhkan kabupaten}} \times 1$		
		12		<p>Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja</p> $\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten}} \times 1$		
		13		<p>Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD</p> $\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPLD}}{\sum \text{jumlah rumah yang di layani SPALD T}} \times 1$		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		14		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah rumah Yng tangki septitanknya sudah di sedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk di dalam wilayah pengembangan SPALD S}} \times 1$	
		24	Persentase Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan IMB yang sesuai dengan Peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang Berlaku}} \times 100\%$	$\frac{37252}{37252} \times 100\% = 100.00\%$	PUPR

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		1	Output	$\frac{\text{Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi}}{\sum \text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 1$		
		2		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	19	
		3		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	
		4		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ADA	
		5		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	
		6		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	
		7		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		
		8		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		
		25	Persentase tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Panjang jalan Kewenangan Provinsi yang mantap $\frac{\text{-----} \times 100\%}{\text{-----} \times 100\%}$ Panjang jalan Keseluruhan di wilayah Kabupaten	1181.41 -----X 100 % 1443.33	81.85% PUPR
		1	Output	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	-	
		2		Panjang jalan yang dibangun	-	
		3		Panjang jembatan yg dibangun	-	
		4		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	-	
		5		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	
		6		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	-	
		7		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	
		8		Panjang jalan yang dipelihara	0	
		9		Panjang jembatan yang dipelihara	0	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		26	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<p>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten</p>	<p>505</p> <p>----- X 1</p> <p>3166</p>	15.95%	PUPR
		1	Output	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	-		
		2		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	505		
		3		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	505		
		4		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-		
		5		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	-		
		6		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-		
		7		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-		
		8		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-		
		9		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	ADA		
		10		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	-		
		11		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	-		
		12		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	-		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		13		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	
		14		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	
		15		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	
		16		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	
		17		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	
		18		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-	
		19		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-	
		20		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-	
		21		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-	
		22		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-	
		23		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	
		24		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-	
		25		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	628	
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang tanpa kecelakaan konstruksi ----- X 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	628 ----- X 1 625	100.48% PUPR

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.		
1	2	3	4	5		6	7		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n <hr/> <p style="text-align: right;">X 100%</p> Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		Tidak Ada	Suket	PERKIM	
1				Output	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	-			
2			Jumlah rumah yang terkena bencana alam	-					
3			Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	-					
4			Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	TIDAK ADA					
5			Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-					
6			Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-					
7			Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-					
8			Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	-					
9			Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-					
		29		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni <hr/> <p style="text-align: right;">X 100%</p> Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		Tidak Ada	Suket	PERKIM
1					Output	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
2						Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
3						Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
4						Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
4		5		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
		6		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-		
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- X 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	0 Ha ----- X 1 12 HA	3.70%	PERKIM
		1	Output	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	11,9		
		2		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	3397		
		3		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,44		
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ----- X 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten	5957 ----- X 1 87559	6.80%	PERKIM
		1	Output	Jumlah rumah di kab/kota	84613		
		2		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	3397		
		3		Jumlah rumah tidak layak huni	5957		
		4		Jumlah rumah yang tidak dihuni	-		
		5		Rasio rumah dan KK	Jumlah KK ----- Jumlah Total unit rumah kabupaten	97,65%	PERKIM
		6		Jumlah rumah pembangunan baru	3165		
		32	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- X 100% jumlah unit rumah di kabupaten	45016 ----- X 1 84613	53.20%	PERKIM
		1	Output	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	45016		
		2		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	98147		
		3		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-		
		4		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	98147		
		5		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	-		
		6		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-		
		7		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-		
		8		Jumlah pengembang yang teregistrasi	-		
		9		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{81}{85} \times 1$	95.29%	PoI PP
		1	Output	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	81		
		2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	108 Orang		
		3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	29 Perda		
		4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 Orang		
		5		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	-		
		6		Tersedianya sarana prasarana minimal	-		
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 1$	100.00%	Bagian Hukum
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{181518}{216089} \times 1$	84.00%	BPBD
		1	Output	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 1$	0.00%	SUKET
		2		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana}}{\text{seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana}} \times 1$	0.00%	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{80}{181598} \times 1$	0.00%	BPBD

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
5		1	Output	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{jumlah satu dokumen PRb yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 1$	0.04%	
		2		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{jumlah satu dokumen Rekon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 1$	1 dokumen	
		3		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{jumlah aparatur dan warga yang mengikuti pelatihan}}{\text{jumlah aparatur dan warga di wilayah rawan bencana}} \times 1$	40	
		4		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan}}{\text{jumlah warga negara di wilayah rawan bencana}} \times 1$	0.00%	
		5		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops}}{\text{jumlah warga negara di wilayah rawan bencana}} \times 1$	0.00%	
		6		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{jumlah warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan}}{\text{jumlah warga negara di wilayah rawan bencana}} \times 1$	10000 masker	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{.....} \times 1}{20}$	15.00%	BPBD
		1	Output	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{.....} \times 1}{\text{jumlah seluruh penetapan kasus KLB}}$	%	covid, karhutla, banjir
		2		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{.....} \times 1}{\text{jumlah seluruh penetapan kasus darurat bencana}}$	%	
		3		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{.....} \times 1}{\text{jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}}$	%	
		4		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{.....} \times 1}{\text{perkiraan jumlah korban bencana}}$	%	
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<p>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah</p> $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ <p>Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten</p>	$\frac{26}{33} \times 1$	78.79%	Damkar
		1	Output	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	26 Kejadian		
		2		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	6 pos	Ada	
		3		Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	131 pos	Ada	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7		
		4		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	-	tidak ada		
		5		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8 armada	terlampir		
		6		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	118	Ada		
		7		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	219 orang			
		8		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1	tidak ada		
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		78.79%	Damkar	
		40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	275	----- X 1	1.69%	Sosial P2PA
					----- X 100%	-----		
Sosial	1	Output	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1				
	2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	16319				
	3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0				
	4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	16319				
	5		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0				
	6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	16319				
	7		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0				

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7		
6		8		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0			
		9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	109			
		10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0			
		11		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0			
		12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0			
		13		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0			
		14		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	14			
		15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	16319			
		16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	16319			
		17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0			
		18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0			
		19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	1			
		20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0			
		21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	25			
		41		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- X 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	1376 ----- X 1 1500	91.73%	Sosial P2PA

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		1	Output	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	161		
		2		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0		
		3		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		
		4		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		
		5		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		
		6		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	55	55 Orang	
	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	6 $\text{-----} \times 1$ 6	100.00%	Perindag Naker
		1	Output	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	0		
		2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0		
		3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	8		
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ Jumlah tenaga kerja keseluruhan	56 $\text{-----} \times 1$ 9306	0.60%	Perindag Naker
		1	Output	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n $\text{-----} \times 1$	0.00%	
		2		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah instruktur bersertifikat koompetensi pada tahun n $\text{-----} \times 1$ jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	0.00%	
		3		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\text{-----} \times 1$ jumlah peserta pelatihan pada tahun n	0.00%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{jumlah selirih LPK pada tahun n}} \times 1$	0.00%	
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{jumlah LPK yang terdata pada tahun n}} \times 1$	0.00%	
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	90		
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 1$	0.00%	
		8	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{jumlah lulusan yang berkerja pada tahun n}}{\text{jumlah lulusan pada tahun n}} \times 1$	0.00%	
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 1$	0.00%	
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	12		
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	$\frac{10625}{27062} \times 1$	39.26%	BPS/Perindag Naker
		1	Output	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 1$	0.00%	
		2		Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).	0.00%	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	$\frac{35}{35} \times 1$	100.00%	Perindag Naker
		1	Output	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n}}{\text{jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 1$	22.97%	
		2		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 1$	14.29%	
		3		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	-		
		4		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang di atur dalam PP dan PKB)}} \times 1$	16.67%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		5		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan $\frac{46}{91} \times 1$ jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 46 ----- 91 jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	50.55%	
		6		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih $\frac{16}{91} \times 1$ jumlah perusahaan yang berselisih 16 ----- 91 jumlah perusahaan pada tahun n	17.58%	
		7		Jumlah mogok kerja	3	
		8		Jumlah penutupan perusahaan	0	
		9		Jumlah perselisihan kepentingan	3	
		10		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	
		11		Jumlah perselisihan PHK	11	
		12		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	-	
		13		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	
		14		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	-	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		15		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	jumlah perjanjian bersama 9 ----- x 1 16 jumlah kasus perselisihan	56.25%	
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- X 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	224 ----- X 1 5711	3.92%	Perindag Naker
		1	Output	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0		
		2		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	5711		
		3		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	11		
		4		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0		
		5		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0		
		6		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		
		7		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	-		
		8		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0		
		9		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	∑ CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ----- x 1 ∑ CPM/CTKI	0.00%	
		10		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0		
		11		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi keputungan	∑ fasilitasi PMI yang dipulangkan ----- x 1 ∑ PMI yang pulang	0.00%	
		12		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	∑ (PMI/TKI) yang mendapatkan pendidikan ----- x 1 ∑ PMI/TKI		
		13		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	∑ PMI/ TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan ----- x 1 ∑ jumlah PMI/ TKI purna dan keluarganya	0.00%	
		14		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	∑ LTSA yang terbentuk ----- x 1 jumlah daerah kantong PMI/TKI	0.00%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	208010815320	28.11%	Sosial P2PA/BAPELITBANG DA	
				----- X 100%	----- X 1			
		Jumlah seluruh belanja langsung APBD				740060445048		
		1	Output	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		25 OPD dan 12 Kecamatan	-	
				Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		25 OPD dan 12 Kecamatan	-	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi		29	0.03%	Sosial P2PA/CAPIL
				----- X 100%	----- X 1			
		Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)				105485		
		1	Output	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		-	-	
				Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		4 LKSA		
		3		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		jumlah korban kekerasan yang dilayani 29	-	
						----- x 1 -		
						jumlah korban kekerasan di kabupaten		
		4		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		0		
		5		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		0		
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan Kabupaten		1	0.001%	Sosial P2PA/DUKCAPIL
				----- X 100%	----- X 1			
		Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten				119565		
		1	Output	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		17		
				Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		12		
		3		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		0		
		4		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		3		
		5		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		0		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		6		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1		
		7		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan}}{\text{jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 1$	0.00%	
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	$\frac{1070700}{0 \text{ Kg}} \times 1$	0.00%	DHTP
		1		Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada	Perbup Tebo No.17 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Tebo Tahun 2021
		2		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	TIDAK ADA	Tidak ada kondisi rawan pangan (bencana) yang memerlukan penyaluran beras Cadangan Pangan Daerah (CPD)
		3		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	TIDAK ADA	
		4		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	Sosialisasi Menu B2SA Tahun 2021
		5	Output	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	FSVA Tahun 2021
		6		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	TIDAK ADA	Tidak ada kondisi rawan pangan (bencana) yang memerlukan penanganan kerawanan pangan (penyaluran beras Cadangan Pangan Daerah /CPD)
		7		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	TIDAK ADA	Tidak ada kondisi rawan pangan (bencana) yang memerlukan penyaluran beras Cadangan Pangan Daerah (CPD)

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5		6	7
		8		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7		
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100\%$	$\frac{22418 \text{ HA}}{22418 \text{ HA}} \times 1$	100.00%		
		1	Output	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	22	ADA		
		2		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee ----- x 1			
		3		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah (kelebihan maksimum/absentee) ----- x 1			
		4		Dokumen Izin membuka tanah	jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek jumlah dokumen membuka izin membuka tanah yang disetujui+jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- x 1			
		5		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- x 1 jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun			

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- X 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0 ----- X 1 0	SUKET PERKIM
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ----- X 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	22418 ----- X 1 22418 HA	SUKET PERKIM
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL); ----- X 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	0 ----- X 1 0	SUKET PERKIM
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- X 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0 ----- X 1 0 HA	SUKET PERKIM
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- X 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0 ----- X 1 0	SUKET PERKIM/ Bag. Hukum
	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten dengan rumus KLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).	IKLH= (0,376 X IKA) + (0,405 X IKD) + (0,219 X ITH) IKLH= 22,56 + 37,341 + 10,45944	74.63 DLH
		1	Output	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA)	70
		2			Indeks Kualitas Udara (IKU)	93.42
		3			Indeks Kualitas Tutupan Hutan (ITH)	47.83
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- X 100% Total vol timbunan sampah Kabupaten	11612 ----- X 1 51136	22.71% DLH
		1	Output	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	ADA
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ----- X 100%	15 ----- X 1	30% DLH

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
			Kabupaten	Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	50	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
11		1	Output	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	0.00%	
		2		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	jumlah PPLHD yang ada ----- x 1	3.09%	
		3		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten 2 ----- x 1 4	50.00%	
		4		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	jumlah MHA yang diakui jumlah MHA yang ada ----- x 1	TIDAK ADA	
		5		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat atau rencana ----- x 1	TIDAK ADA	
		6		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	target lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 10 ----- x 1 10	100.00%	
			Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Persentase mengukur tingkat Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- X 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	247838 ----- X 1 250303

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5		6	7
12		1	Output	Penerbitan akta perkawinan	jumlah akta perkawinan yang diterbitkan 1023 / 1023 x 1 peristiwa perkawinan yang dilaporkan	100%	
		2		Penerbitan akta perceraian	jumlah akta perceraian yang diterbitkan 45209 x 1 peristiwa perceraian yang dilaporkan	100%	
		3		Penerbitan akta kematian	jumlah akta kematian yang diterbitkan 5136 / 5136 x 1 peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	
		4		Penyajian data kependudukan	jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun ----- x 1 2 tahun	0%	
		61	Persentase anak dengan usia 0-17 tahun yang sudah memiliki KIA	Jumlah Anak berumur 0- 17 tahun kurang satu hari yang sudah memiliki KIA ----- X 100% Jumlah ank usia 0-17 Tahun	36270 ----- X 1 103133	35.17%	Dukcapil
		62	Persentase memiliki Akta Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran ----- X 100% Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	102094 ----- X 1 105485	96.79%	Dukcapil
		63	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- X 100% Jumlah OPD	14 ----- X 1 37	37.84%	Dukcapil
		64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- X 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	0 ----- X 1 0	#DIV/0!	PMD
		1	Output	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	77		
		2		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	77		
3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	226				
4		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	24				
65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- X 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	13 ----- X 1 55	23.64%	PMD		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		1	Output	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	77		
		2		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	77		
		3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	226		
		4		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	24		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.34	DINKES-KB
		1	Output	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	TIDAK	
		2		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia	-	
		3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{\sum_{p=15}^{19} b_{ip} \times k}{\sum_{p=15}^{19} p_{ip} \times k}$	-	
		4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan kie)}}{\text{jumlah sasaran masyarakat proram KKBPK (advokasi dan kie)}} \times 1$	79.72%	
		5		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK sda	356	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	41569 $\text{-----} \times 1$	68.79%	DINKES-KB

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
14		1	Output	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{jumlah faskes}} \times 1$	68.79%	
				Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{jumlah peserta KB Aktif}}{\text{jumlah PUS}} \times 1$	-	
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	-	
				Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{jumlah peserta kb pasca persalinan menurut metode kontrasepsi modern}}{\text{jumlah sasaran peserta kb pasca persalinan}} \times 1$	-	
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$	$\frac{8709}{60431} \times 1$	14.41%	DINKES-KB
		1	Output	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	-	
				Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{jumlah peserta KB dari Keluarga penerima PBI}}{\text{jumlah keluarga PBI}} \times 1$	-	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas Kabupaten	<p>Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut)</p> <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>	<p>Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota = (6x50) + (0x0)</p>	66.31%	DISHUB
		1 Output	<p>Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C</p>	<p>jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia</p> $\frac{\text{jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{14} \times 100$ <p>jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan</p>	85.71%		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5		6	7
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala		$\frac{608}{2475} \times 100$ jumlah kendaraan yang diuji per tahun 608 ----- x 100 2475 jumlah kendaraan wajib uji	24.57%	
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ----- x 100 jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten	TIDAK ADA	
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota		$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten ----- x 100 target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten	TIDAK ADA	
		70	Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	$\frac{193+54000}{\text{-----}} \times 100$ jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten 193+54000	0.00%	DISHUB
		1 Output	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota		$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 1$ jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten ----- x 1 target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten	TIDAK ADA	
	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{17}{37} \times 100\%$ 17 ----- X 1 37	45.95%	Kominfo
		1 Output	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		$\frac{17}{37} \times 1$ jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah 17 ----- x 1 37 jumlah perangkat daerah	45.95%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{17}{37} \times 1$ jumlah perangkat daerah	45.95%	
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	Ya	
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{17}{17} \times 100\%$ Jumlah Layanan Publik	100.00%	Kominfo
		1	Output Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	$\frac{85}{37} \times 1$ jumlah kegiatan perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan pelayanan publik sesuai dengan Pm kominfo no 5/2015	229.73%	
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{21}{37} \times 1$ jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standar	56.76%	
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{17}{37} \times 1$ jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dn khusus sesuai dngan undang"	45.95%	
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\quad}{\quad} \times 1$ jumlah layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	TIDAK ADA	
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	$\frac{1}{\quad} \times 1$ Jumlah layanan PSBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5.88%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
				yang memanfaatkan sertifikat elektronik	----- x 1 17 jumlah layanan		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
16		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{17}{17} \times 1$ jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai perundang-undangan jumlah sistem elektronik	100.00%	
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{17}{17} \times 1$ jumlah layanan publik dan layanan administrasi terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah jumlah layanan publik dan layanan administrasi	100.00%	
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{4}{37} \times 1$ jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah jumlah perangkat daerah	10.81%	
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{4}{37} \times 1$ jumlah PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah jumlah PD	10.81%	
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{0}{37} \times 1$ Jumlah PD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data jumlah PD	TIDAK ADA	
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{0}{37} \times 1$ jumlah data yang dapat berbagi pakai jumlah data yang dimiliki Pemerintah daerah	TIDAK ADA	
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{2}{37} \times 1$ jumlah PD yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city Jumlah PD	5.41%	
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{1}{17} \times 1$ jumlah ASN pengelola TIK yang bersertifikat kompetensi di bawah naungan pengelolaan kominfo	5.88%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah ASN pengelola TIK		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		14		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: ♣ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ♣ Penganggaran ♣ Strategi ♣ Peta Jalan ♣ Arah Kebijakan ♣ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab		
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ----- X 100% Jumlah penduduk	331800 ----- X 1 350234	94.74%	Kominfo
		1	Output	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah 73 ----- x 1 90	81.11%	
		2		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategis komunikasi 37 ----- x 1 50	74.00%	
		3		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategis komunikasi dan SOP 450 ----- x 1 280	160.71%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
					diseminasi dan layanan informasi publik	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	<p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset</p> $\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	<p>30</p> <p>----- x 1</p> <p>42</p>	71.43%	DPMPTSPKOPUKM
		1	Output	<p>Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>jumlah penerbitan usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan</p> $\frac{1}{70} \times 1$ <p>jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum memiliki izin usaha</p>	1.43%	
		2		<p>Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Idalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</p> $\frac{0}{0} \times 1$ <p>jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, kas usaha pada tahun yang dilaporkan</p>	0.00%	
		3		<p>Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi</p> $\frac{35}{376} \times 1$ <p>Jumlah Koperasi yang ada</p>	9.31%	
		4		<p>Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</p> $\frac{20}{80} \times 1$ <p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</p>	25.00%	
		5		<p>Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> $\frac{26}{376} \times 1$ <p>Jumlah koperasi yang ada</p>	6.91%	
		6		<p>Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>	<p>jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</p> $\frac{34}{\text{-----}} \times 1$	0.21%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
					15873	
				jumlah anggota koperasi yang ada		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
17			7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{376} \times 1$ jumlah koperasi yang ada	0.00%	
			8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		TIDAK ADA	
			9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{30}{376} \times 1$ jumlah koperasi yang ada	7.98%	
			10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{376} \times 1$ jumlah koperasi yang ada	0.00%	
			11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{376} \times 1$ jumlah koperasi yang ada	0.00%	
			12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{43}{376} \times 1$ jumlah koperasi yang ada	11.44%	
			13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{42}{376} \times 1$ jumlah koperasi yang ada	11.17%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{50}{109} \times 1 = 45.87\%$	DPMPTSPKOPUKM
		1	Output	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro $\frac{\text{jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{jumlah wirausaha yang ada}} = \frac{2454}{8370} \times 1 = 29.32\%$	29.32%	
		2		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) $\frac{\text{jumlah usah mikro yang dinput kedalam sistim data online}}{\text{jumlah usaha mikro yang ada}} = \frac{0}{8370} \times 1 = 0.00\%$	0.00%	
		3		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra $\frac{\text{jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{jumlah usaha mikro yang ada}} = \frac{0}{8370} \times 1 = 0.00\%$	0.00%	
		4		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha $\frac{\text{jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi}}{\text{jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} = \frac{83}{8370} \times 1 = 0.99\%$	0.99%	
		5		Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran $\frac{\text{jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas pemasaran}}{\text{jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan fasilitas pemasaran}} = \frac{50}{8370} \times 1 = 0.60\%$	0.60%	
		6		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan $\frac{\text{jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan}}{\text{jumlah usaha mikro yang ada}} = \frac{109}{8370} \times 1 = 1.30\%$	1.30%	
		7		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan $\frac{\text{jumlah usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kelembangaan dan usaha}}{\text{jumlah usaha mikro yang ada}} = \frac{100}{8370} \times 1 = 1.19\%$	1.19%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5		6	7
			39039297067		jumlah usaha mikro yang ada		
	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Realisasi PMDN thn 2022 - Realisasi PMDN 2021 ----- X 100% Realisasi PMPDN 2021	735258077296 - ##### ----- X 1 696218780229	5.61%	DPMP TSPKOPUKM
		1	Output	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak Ada / Suket	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
18		2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Tidak Ada / Suket	
		3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Tidak Ada / Suket	
		4		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting		
		5		Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Tidak Ada / Suket	
		6		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal		
		7		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	77	
		8		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	4492	
		9		Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota		
		10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal		
		11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal		
		12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	5	
			Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	473
----- X 100%	----- X 1						
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	83179						
	1	Output		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	50		
	2			Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
19		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten}}{\text{jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{5363}{83179} \times 100\%$	6.45%	DISPORAPAR
		1	Output	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	600		
		2		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	PON XX PAPUA	1 Mendali	DISPORAPAR
		1	Output	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	16	
		2		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	9	
20	Statistik	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{37}{37} \times 100\%$	100.00%	Bappeda & Litbang
		1	Output	Tersedianya buku profil daerah	ada/tidak		
		2		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	-		
		3		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-		
		4		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-		
		5		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	-		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5		6	7
		6		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	jumlah metadata data statistik sektoral ----- x 1 kegiatan statistik sektoral	0.00%	
		7		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	jumlah indikator metada statistik sektoral ----- x 1 jumlah indikator statistik sektoral	0.00%	
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- X 100% Jumlah PD	37 ----- X 1 37	100.00%	Bappeda & Litbang
21	Persandian	83	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- X 100% Jumlah area penilaian	355 ----- X 1 5	7100.00%	Kominfo
		1	Output	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	jumlah kegiatan strategis teramankan ----- x 1 jumlah kegiatan strategis yang ada	Tidak Ada	
		2		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik ----- x 1 jumlah SE yang ada	Tidak ada	
		3		Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- x 1 jumlah SE yang ada	Tidak Ada	
		4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	jumlah titik yang teramankan ----- x 1 jumlah titik pada PHKS	Tidak Ada	
22	Kebudayaan	84	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- X 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	7 ----- X 1 7	100.00%	DIKBUD
		1	Output	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang diliindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)		
		2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)		
		3		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	jumlah obyek dimanfaatkan		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		4		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola		
		5		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan		
		6		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar sda		
		7		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota		
		8		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)		
		9		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan		
		10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)		
		11		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum		
		12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			
		13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk		
		14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB		
		15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi		
		16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum		
		17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)		
		18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)		
		19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
23	Perpustakaan	85	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dengan hasil survey	----- x 1	44.6	DPK
		1	Output	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{737165}{350234}$ koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan diwilayahnya jumlah penduduk diwilayahnya (dalam jiwa)	210.48%	
		2		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{152964}{350234}$ jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik sevara online/offline jumlah penduduk diwilayahnya	43.67%	
		3		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{2330}{350234}$ ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya jumlah penduduk diwilayahnya (dalam jiwa)	0.67%	
		4		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 1$ jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya		
		5		Jumlah pasyarakat gemar membaca di masyarakat	152964		
		86	Indeks membangun literaly masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\Sigma \text{-----} \times 100$ UPLM _{MALM}	$\frac{337669}{118971} \times 1$	283.82%	DPK
		1	Output	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya			

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5		6	7
		2		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5		6	7
		3		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan		
24	Kearsipan	87	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1. $T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		1.98%	DPK
		1	Output	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 1 jumlah seluruh arsip aktif	4.00%	
		2		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 1 jumlah seluruh arsip inaktif	4.00%	
		3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ----- x 1 jumlah seluruh arsip status	2.00%	
		4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- x 1 jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi	0.00%	
		88	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		2.00%	DPK

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		1	Output	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Tidak ada
		2		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Tidak ada
		3		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	Tidak ada
		4		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	Tidak ada
		5		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tidak ada
		6		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Tidak ada

URUSAN PILIHAN

25	Kelautan dan Perikanan	89	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)		97.661%	Bunakan
		1	Output	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		
		2		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	jumlah TPI yang operasional ----- x 1 jumlah seluruh TPI di wilayah Kabupaten		
		3		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		
		4		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun		
		5		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
26	Pariwisata	90	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{(\text{Jumlah wisatawanMancanegara tahun 2021} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2022})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2022}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 1$	0.00%	DISPORAPAR
		1	Output	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas	1	
		2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	0	
		3		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa	3	
		4		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	9	
		5		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	2	
		6		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5		6	7
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	14	
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		jumlah tenaga kerja pariwisata terferifikasi ----- x 1 jumlah tenaga kerja pariwisata	0	
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan 96 ----- x 1 0 jumlah sasaran pembekalaan sektor kepariwisataan	0%	
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	
		91	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan nusantara tahun 2021 – Jumlah wisatawan tahun 2022) ----- X 100% Jumlah wisatawan tahun 2022	96341 ----- X 1 162808	59.17%	DISPORAPAR
		92	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- X 100% Jumlah kamar yang tersedia	57747 ----- X 1 102565	56.30%	DISPORAPAR
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- X 100% Jumlah total PDRB	5.42 ----- X 1 4.32	125%	BPS
		94	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- X 100% Jumlah total PAD	39419.2 ----- 1 10597493.2	0.37%	BPS
	Pertanian	95	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- X 100% Luas Panen	500636 ----- X 1 10865663	4.61%	DHTP
		1	Output	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	1) Benih Padi Sawah 6000 kg 2) Benih padi penangkar 500 kg 3) Pupuk Majemuk 1000 kg	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
27					4) Pompa Air 3" sebanyak 1 unit	alsintan	
					5) Mesin Combine Harvester sebanyak 1 unit	alsintan	
					6) Power Thresher sebanyak 1 unit	alsintan	
					7) Hand Trantor sebanyak 3 unit	alsintan	
					8) pupuk hayati 15800l liter		
					9) Pompa Air 4" sebanyak 5 unit	alsinan	
					10) Cultivator sebanyak 2 unit	alsintan	
					11) Mesin Combine Hrsester Sedang sebanyak 2 unit	alsintan pasca panen	
					12) Mesin Combine Harvester Kecil sebanyak 2 unit	alsintan pasca panen	
					13) Power Thresher sebanyak 4 unit	alsintan pasca panen	
					14) Power Thresher Multi Guna sebanyak 13 unit	alsintan pasca panen	
						Prasarana :	
						1) Irigasi Air Tanah Dangkal 3 unit;	
						2) Jalan Usaha Tani 2 unit;	
						3) Unit Pengolahan Hasil (UPH) Kedelai sebanyak 1 unit	
						4) Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	
						5) Lumbung sebanyak 1 unit	
					Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	1) RJIT 17 unit
							2) Embung 12 unit

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
					3) Dam Parit 12 unit	
					4) Long Storage 5 unit	
					5) Irigasi Perpompaaan 5 unit	
					6) Irigasi Perpipaan 10 unit	
					7) Irigasi Air Tanah Dalam/Dangkal 8 unit	
					8) Pintu Air 3 unit	
					9) lumbung sebanyak 2 unit	
					10)Jalan Usaha Tani 30 unit	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	Tidak ada mengeluarkan izin usaha pertanian	
		4	Persentase prasarana yang digunakan	jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- x 1 jumlah prasarana yang dibuat		
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	jumlah usulan yang difasilitasi ----- x 1 jumlah usulan usaha pertanian		
		96	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- X 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-2433 ----- X 1 4427	-54.96% Bunakan
		1	Output	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	jumlah area yang dapat ditanggulangi ----- x 1 luas area terkena bencana	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7		
28	Kehutanan	97	Tidak ada judul halaman 450			SUKET		
		1	Output	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	SUKET		
		2		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	SUKET		
		3		Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	SUKET		
		4		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	SUKET		
29	Energi Sumber DayaMineral	98	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	----- X 1	SUKET	Urusan Provinsi	
		1	Output	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	SUKET	Urusan Provinsi	
	Perdagangan	99	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	0	SUKET	Perindag Naker	
				----- X 100%	----- X 1			
		1	Output	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	jumlah izin perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	----- x 1	-	
					jumlah dokumen izin perbelanjaan yang sudah lengkap dan benar			
2		Persentase penerbitan TDG	jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	----- x 1	-			
			jumlah dokumen izin toko swalayan yang sudah lengkap dan benar					
			jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	----- x 1	28.57%			
			jumlah permohonan penerbitan TDG					

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		3		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{jumlah penerbitan TDG}}{\text{jumlah gudang yang ada di kabupaten}} \times 1$	0.18%	
		4		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	$\frac{\text{jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar}}{\text{jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri}} \times 1$	-	
		5		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{\text{jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } 2 \text{ harikerja sejak berkas diterima lengkap dan benar}}{\text{jumlah STPW untuk oenerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 1$	50.00%	
					$\frac{\text{jumlah peneriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten}}{\text{jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 1$	-	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	jumlah SKA yang terbit kurang dari 1 hari kerja $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 1$	-	
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	-	
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	-	
		100	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi $\frac{\text{-----}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	9470 $\frac{\text{-----}}{\text{10207}} \times 1$	92.78% Perindag Naker
		1	Output Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(b \times c) \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	-	
		101	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	80 $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 1$ 80	100.00% Perindag Naker
		1	Output Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan $\frac{34}{\text{-----}} \times 1$ 100 jumlah total UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	100.00%	
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 1$ Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	100.00%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7		
31	Perindustrian	102	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$	$\frac{2052 - 1763}{1763} \times 1$	16.39%	Perindag Naker	
		1	Output	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 1$	SUKET		
		103	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Data RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi)			SUKET	Perindag Naker
		1	Output	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK			
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 1$	0.00%	Perindag Naker	
		1	Output	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan atau izin yang masuk}} \times 1$	65.52%		
		105	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 1$	$\frac{\text{jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan atau izin yang masuk}} \times 1$	SUKET	Perindag Naker	
		1	Output	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{jumlah permohonan atau izin yang masuk}} \times 1$	65.52%		

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	
		106	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	----- X 1	SUKET	Perindag Naker
		107	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>		SUKET	Perindag Naker
		1 Output	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{9}{2061} \times 1$ <p>jumlah data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri kabupaten di SIINas</p> <p>total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan di kawasan industri</p>	0.44%		
32	Transmigrasi	108	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah	SUKET	PEREKONOMI
		1 Output	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	SUKET	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	SUKET	
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		SUKET	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
FUNGSI PENUNJUANG URUSAN PEMERINTAH						
	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- X 100% Jumlah APBD	121222890784 ----- X 1 1176703968567	10.30%	Bakeuda/BPS
	2	Rasio PAD	Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah PDRB non migas	82967503267 ----- X 1 1146703968567	7.235%	Bakeuda
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	LEVEL 3	3.21%	Inspektorat
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	LEVEL 3		Inspektorat
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD	906896895829 ----- X 1 1176703968567	77.07%	Bappeda & Litbang/Bekauda
	6	Melihat Opini Laporan Keuangan	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir		8 WTP	
FUNGSI PENUNJUANG URUSAN PEMERINTAH (PENGADAAN)						
	7	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun berjalan ----- X 100% jumlah kontrak keseluruhan pada tahun berjalan	0 ----- X 1 0	SUKET	
	8	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- X 100% jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	126 ----- X 1 374	33.69%	
	9	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja langsung	289699779106 ----- X 1 971228557267	29.828%	

No	Urusan	No	IKK	Rumus/Persamaan/Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
FUNGSI PENUNJUANG URUSAN PEMERINTAH (KEPEGAWAIAN)						
		10	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT keatas ----- X 100% jumlah seluruh pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	1153 ----- X 1 362	318.51%
		11	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% Seluruh jumlah Pegawai PNS (diluar guru dan tenaga kesehatan)	280 ----- X 1 1515	18.48%
		12	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	Jumlah seluruh pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	109 ----- X 1 280	38.93%
FUNGSI PENUNJUANG URUSAN PEMERINTAH (MANAJEMEN KEUANGAN)						
		13	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	nilai absolut dari total belanja dalam realisasi ----- (- X 100% 1) total belanja APBD	1338008631206 ----- X 1 1176703968567	113.71%
		14	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	nilai absolut dari total PAD dalam realisasi ----- (- X 100% 1) total PAD dalam APBD	86173364002 ----- X 1 82967503267	103.86%
		15	Assets Management	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada		ADA
		16	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA ----- X 100% Total Belanja Anggaran Pada Tahun sebelumnya	112977971927 ----- X 1 1216523470890	9.29%
FUNGSI PENUNJUANG URUSAN PEMERINTAH (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)						
		17	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan yang dapat di akses di website pemda ----- X 100% realisasi belanja untuk unit pelayanan yang dapat di akses di website pemda	6 ----- X 1 6	100%
		18	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda ----- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	9 ----- X 1 9	100%